

**Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan
Ekonomi sebagai Input dalam Formulasi Kebijakan Publik
Di Bidang Ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Kosentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :
I Gusti Ngurah Heru Mahaputra
D4E001041

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

LPT-PUSTAK-JNDP

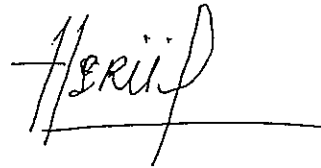
No. Daft: 1739/K/MMP/CI

Tgl. 02/05 03

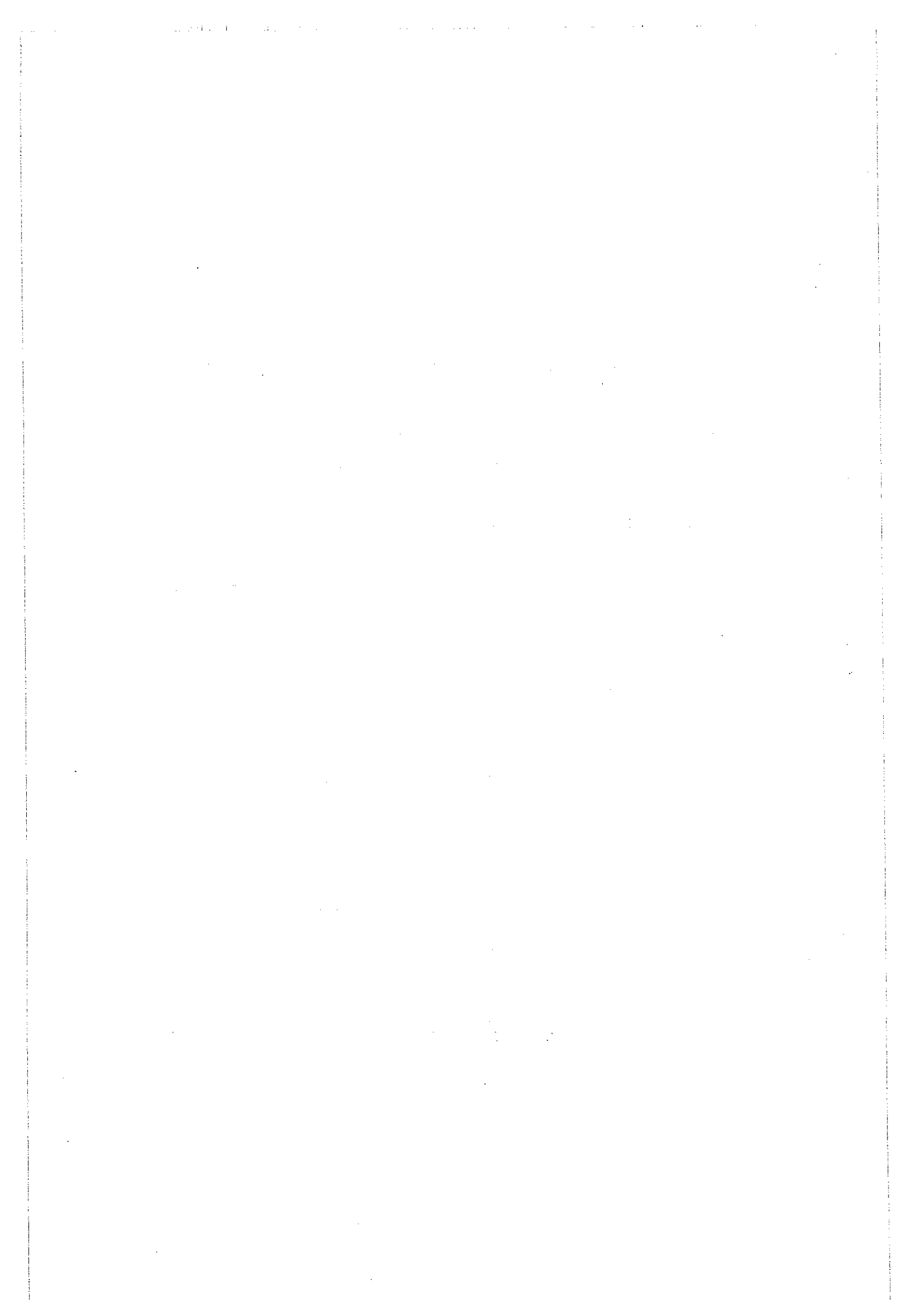
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Nopember 2002



I Gusti Ngurah Heru Mahaputra



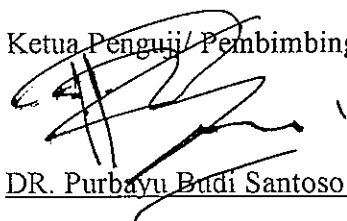
Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Input dalam Formulasi Kebijakan Publik Di Bidang Ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali

Dipersiapkan dan disusun oleh :
I Gusti Ngurah Heru Mahaputra
D4E001041

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji :
Pada tanggal : 18 Nopember 2002


Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/ Pembimbing I,



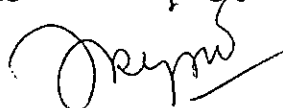
DR. Purbayu Budi Santoso, MS.

Sekretaris Penguji/ Pembimbing II

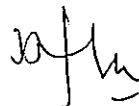


Drs. Hardi Warsono, MTP.

Anggota Dewan Penguji Lain :



1. DR. Ari Pradhanawati, MS.

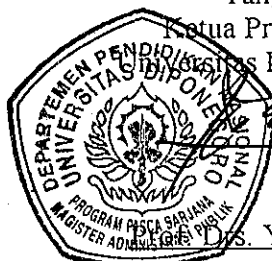


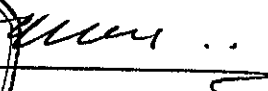
2. Dra. Dyah Hariani, MM.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain.

Tanggal : **18 NOV 2002**

Ketua Program Studi MAP
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Diponegoro Semarang




Drs. Y. Warella, MPA. PhD.

Kata Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Ida Sanghyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Esa atas asung wara kertanugrahanya akhirnya tesis dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Input Kebijakan Publik di Bidang Ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali dapat penulis selesaikan pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan koreksi dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Purbayu Budi Santoso, MS dan Bapak Drs. Hardi Warsono, MTP, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktunya dan mengarahkan penulis hingga rampung nya tesis ini;
2. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajaran nya, yang telah memberikan kesempatan emas kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Publik Undip - Semarang.
3. Bapak Prof. Drs. Y. Warella. MPA., PhD, selaku Ketua Program MAP Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA selaku Dosen Wali, Segenap Pengelola dan Dosen Pengajar, MAP Undip - Semarang, yang telah memberikan bantuan administrasi maupun akademis yang sangat mendukung kelancaran penulisan tesis ini.

5. Pimpinan Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia P3KT BUIP – Bali, yang memberikan dorongan untuk kelancaran pendidikan selama kuliah di Program MAP Undip – Semarang.
6. Ayah dan Ibu serta Kakak yang telah memberikan dorongan moril yang tak ternilai harganya.
7. Teman –teman satu angkatan yang telah banyak membantu penulis baik semasa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini serta Ngurah Partama, Gek Tri dan Wah Eka sebagai teman diskusi sewaktu awal- awal perkuliahan.

Penulis berharap meskipun tulisan ini masih banyak kekurangan semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

Semarang, Nopember 2002
Penulis

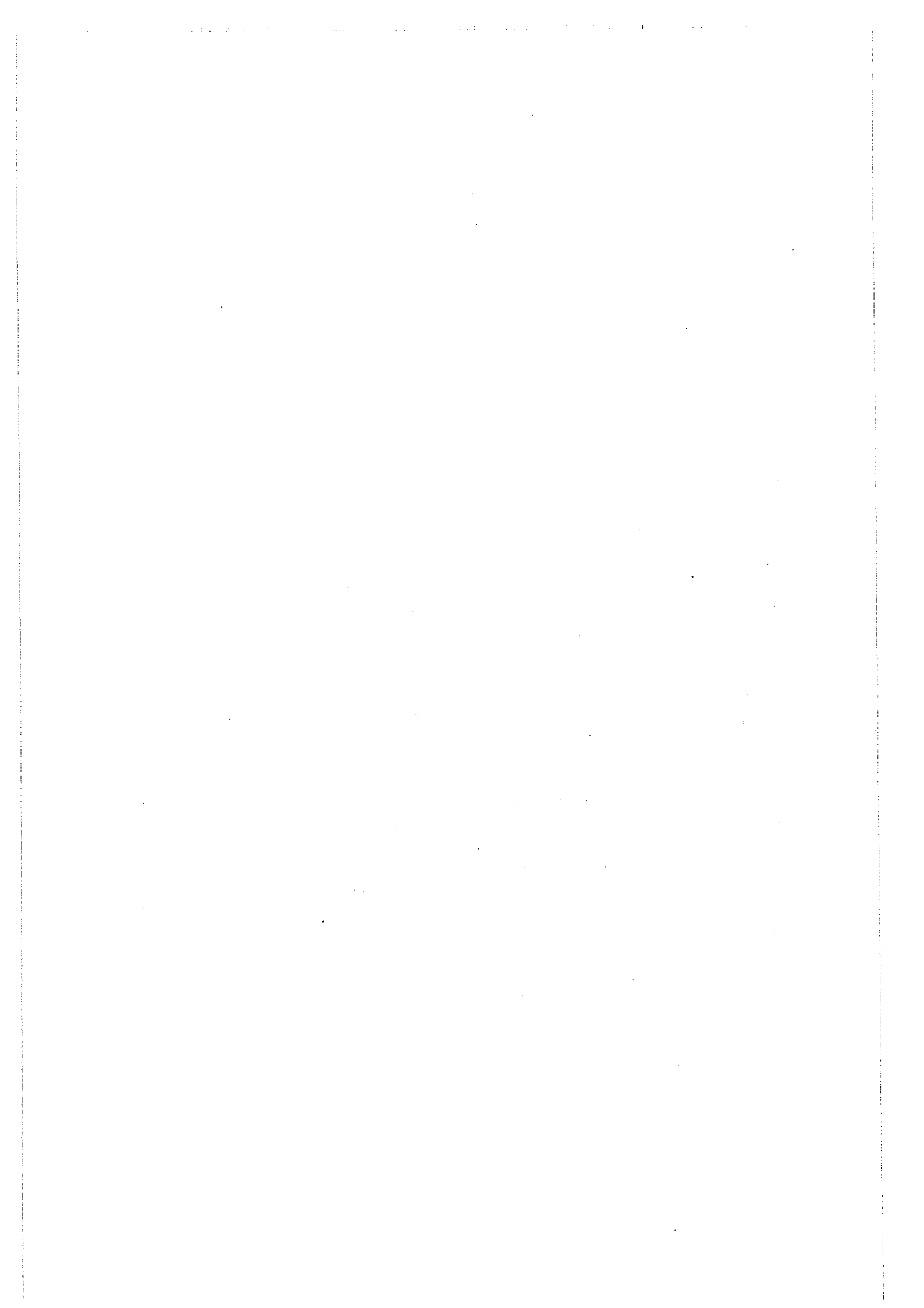
I Gusti Ngurah Heru Mahaputra

RINGKASAN

Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan karena tidak saja berdampak pada aspek ekonomi semata tetapi dapat berimbas pada aspek lainnya yaitu sosial, politik, hukum dan sarana fisik lainnya. Masalah ini lebih penting lagi karena dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan selalu lebih rendah dari beberapa Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali. Oleh karenanya diperlukan suatu rumusan kebijakan di bidang ekonomi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah, maka tesis ini ditulis untuk mengkaji Faktor-faktor apa yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya untuk mendapatkan kajian secara komprehensif serta memilih alternatif terbaik dari faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya dipergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan publik di bidang ekonomi.

Kajian dalam tesis ini dilakukan dengan persefektif kebijakan publik dalam tahap rumusan kebijakan publik, yaitu dengan mengkaji input-input yang akan dijadikan rumusan kebijakan publik, dengan menganalisis faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, metode yang digunakan yaitu *method Enter* dalam SPSS 10.0. Dari analisis menunjukkan faktor-faktor yang diteliti seperti investasi swasta, pertumbuhan penduduk, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

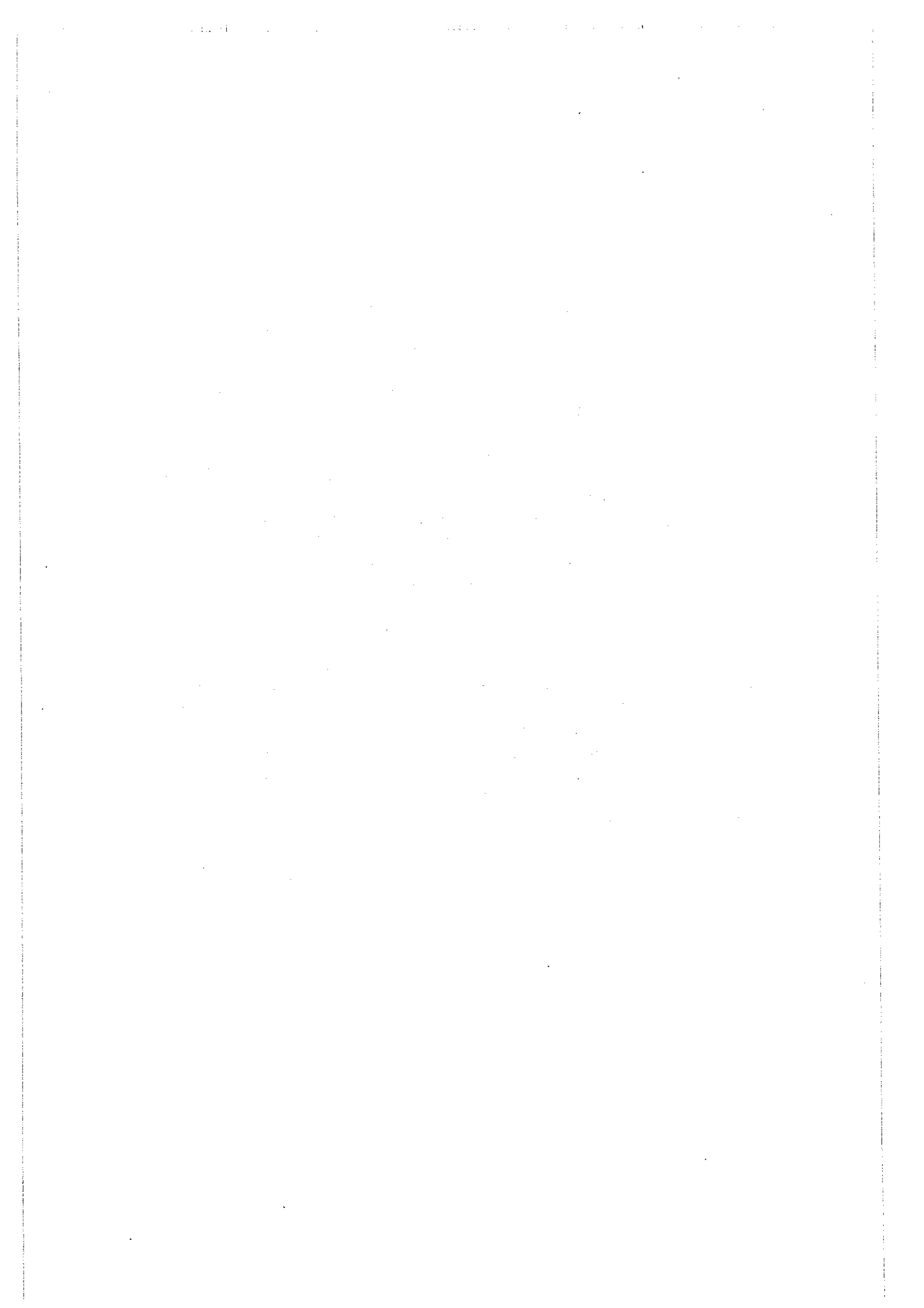
Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut selanjutnya dikembangkan dengan menilai secara komprehensif meliputi aspek : ekonomi, teknis, administrasi, hukum, sosial dan politik, untuk mendapatkan alternatif pilihan terbaik dari faktor –faktor tersebut, dari analisis tersebut maka diperoleh faktor investasi swasta mendapatkan prioritas utama karena mempunyai nilai ekonomis dan resiko yang rendah selanjutnya pajak walaupun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi tetapi mempunyai resiko yang tinggi pula sedangkan ekspor kurang memiliki nilai ekonomis tetapi dapat merangsang kegiatan ekonomi dan resikonya juga rendah, kesemuanya ini nantinya digunakan sebagai input rumusan kebijakan publik di bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali.



ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengkaji dan membuat alternatif rumusan kebijakan pengembangan dari faktor-faktor yang berpengaruh tersebut di Kabupaten Tabanan Bali. Faktor-faktor yang diteliti adalah investasi swasta, pertumbuhan penduduk, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor sebagai independen variabel sedangkan dependen variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan ialah PDRB dengan harga konstan, data pertumbuhan penduduk, data investasi swasta yang dicatat dari PMA & PMDN, investasi pemerintah yang tercermin dalam pengeluaran pembangunan, konsumsi pemerintah yang merupakan belanja rutin, PAD yang bersumber dari pajak dan volume ekspor kesemuanya ini data kurun waktu dari tahun 1990 – 2001. Model diestimasi dengan regresi linier berganda dengan metode enter dari SPSS Ver. 10.0 dan dilakukan beberapa pengujian antara lain uji signifikansi parsial, uji signifikansi bersama-sama dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan investasi swasta, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan penduduk dan pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah dikembangkan dengan penilaian yang komprehensif yaitu dilihat aspek ekonomi, teknis, administrasi, hukum sosial dan politik, yang selanjutnya untuk mendapatkan alternatif pilihan terbaik dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, maka investasi swasta mendapat prioritas utama selanjutnya pajak dan Ekspor yang nantinya diusulkan sebagai input rumusan kebijakan publik dalam hal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali



ABSTRACT

The objective of this research is to understand and to analyze the factors that brought a dominant influence toward economic development, and to review and propose an alternative formula for developmental policy for Kabupaten Tabanan, Bali. Factors to be examined are private investments, population growth, developmental expenditures, routine expenditures, taxes, and export as independent variables, and economic growth as the dependent variable. Data to be applied are PDRB at constant price rate, data about population growth, data about private investments on PMA & PMDN, data on governmental investments that reflected from developmental expenditure, data on governmental consumption as part of routine expenditure, data on PAD that source from taxes and export volume. All of these data is collected from period 1990 to 2001. Model is estimated using multiple linear regression using enter method by SPSS Ver 10.0. Several tests are performed to examine the data, such as partial significance test, simultaneous significance test, and coefficient determination test.

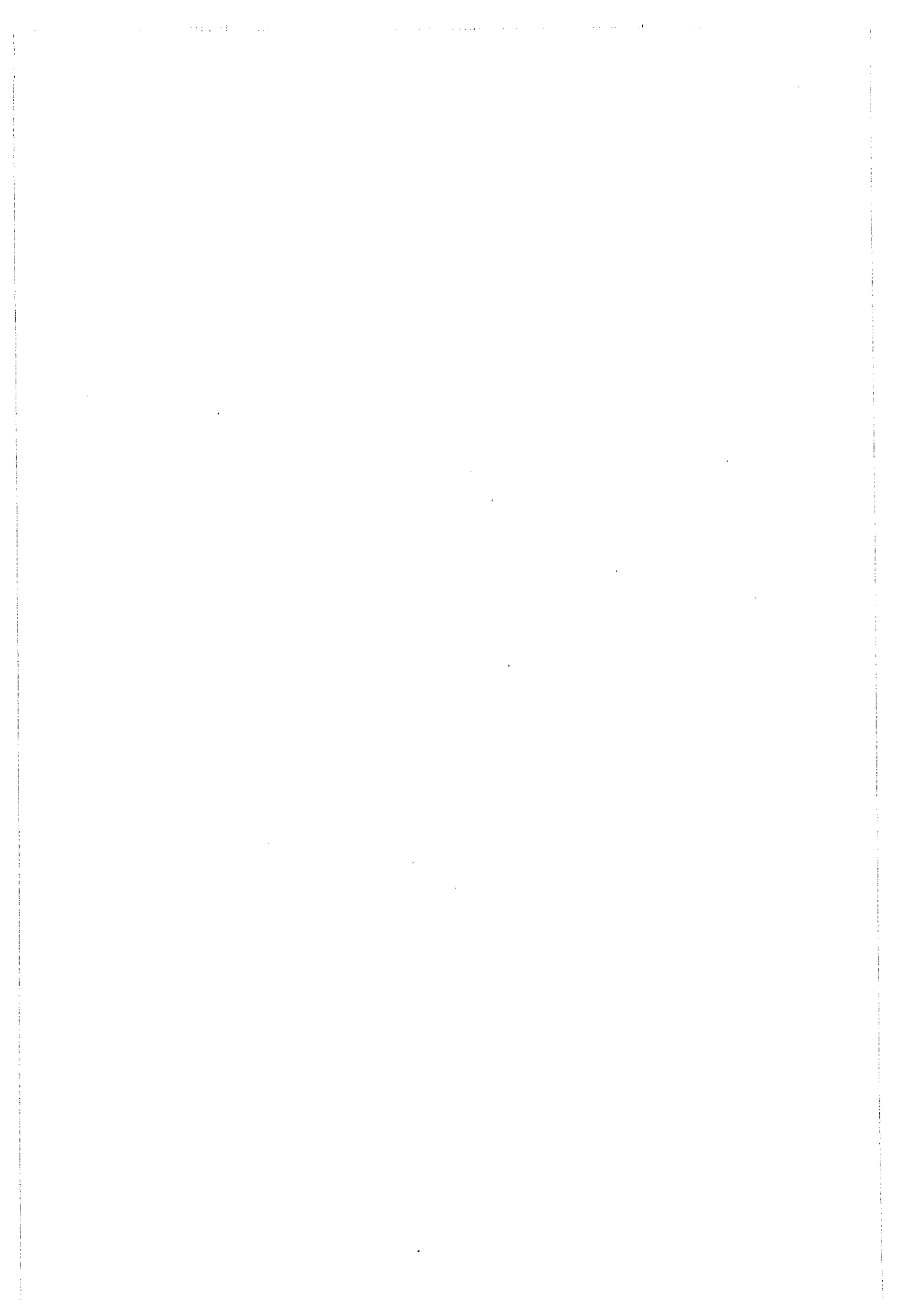
Results of the study show that private investments, routine expenditure, taxes, and export has significant influences toward economic development. However, population growth and developmental expenditure has no significant influences toward economic development. After the observation being expanded by a comprehensive assessment that include aspects such as economy, technical, administration, law, social, and politic in order to propose the best alternative option from the factors that influence economic development, therefore, it is concluded that private investments option get the major priority, followed by taxes, and export. This results will finally be proposed as the input for public policy formulation regarding economic development in Kabupaten Tabanan, Bali.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Landasan Teori	21
1. Pertumbuhan Ekonomi	21
a. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah ..	23
b. Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi	26
c. Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi .	27
d. Investasi Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi....	28

e.	Pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	29
f.	Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi	30
g.	Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi	32
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Input dalam proses Perumusan Kebijakan Publik di bidang Ekonomi	35
B.	Pembahasan Penelitian yang Relevan	49
C.	Hipotesis	53
BAB III	: METODE PENELITIAN	55
A.	Rancangan Penelitian/ Fenomena yang diamati	55
B.	Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian	56
C.	Lokasi Penelitian	56
D.	Variabel Penelitian	57
1.	Klasifikasi Variabel	57
2.	Definisi Konsep	58
3.	Operasional Variabel	59
E.	Jenis dan Sumber Data	60
F.	Instrumen Penelitian	61
G.	Obyek Kajian	62
H.	Teknik Pengumpulan Data	62
I.	Teknik Analisis Data	63
1.	Analisis Regresi Berganda	63
2.	PETS Analysis	67
BAB IV	: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	71
A.	Deskriptif Wilayah Penelitian	71
B.	Hasil Penelitian	82

C. Analisis Hasil Penelitian	107
D. Diskusi	146
BAB V : SIMPULAN DAN SAR	163
A. Simpulan	167
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	171
Lampiran – Lampiran	

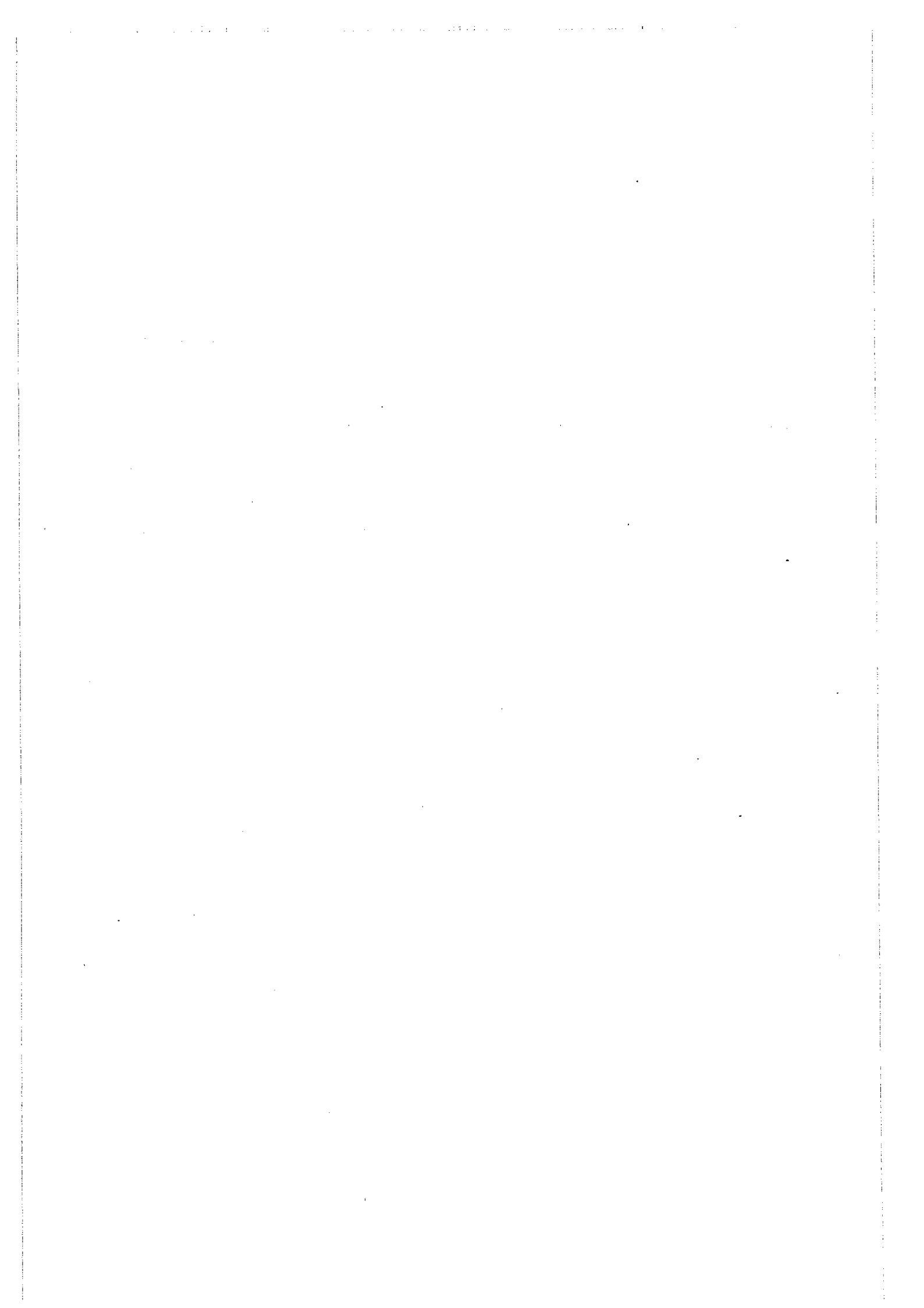


DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali, Tahun 1996/1997 (Berdasarkan Harga Konstan)	2
2.	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 1996 – 2000, (Berdasarkan Harga Konstan)	5
3.	Perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Tahun 1995/1996 – 2000, (Berdasarkan Harga Konstan)	8
4.	Investasi Swasta Kabupaten Tabanan Bali, 1995 – 2000 (Berdasarkan Harga Konstan)	9
5.	Investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan Bali, 1993/1994- 2000 (Berdasarkan Harga Konstan)	11
6.	Belanja Rutin Kabupaten Tabanan Bali, 1993/1994 – 2000 (Berdasarkan Harga Konstan)	12
7.	Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabanan Bali, Tahun 1996/1997 – 2000	14
8.	Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Tabanan Bali, Tahun 1993/1994 – 2000 (Berdasarkan Harga Konstan)	15
9.	Total Ekspor Provinsi Bali Tahun 1996 – 2000 (Berdasarkan Harga Konstan)	17
10.	Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Tabanan	72
11.	Pembagian Wilayah Menurut Keadaan Topologi di Kabupaten Tabanan	73
12.	Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan	78

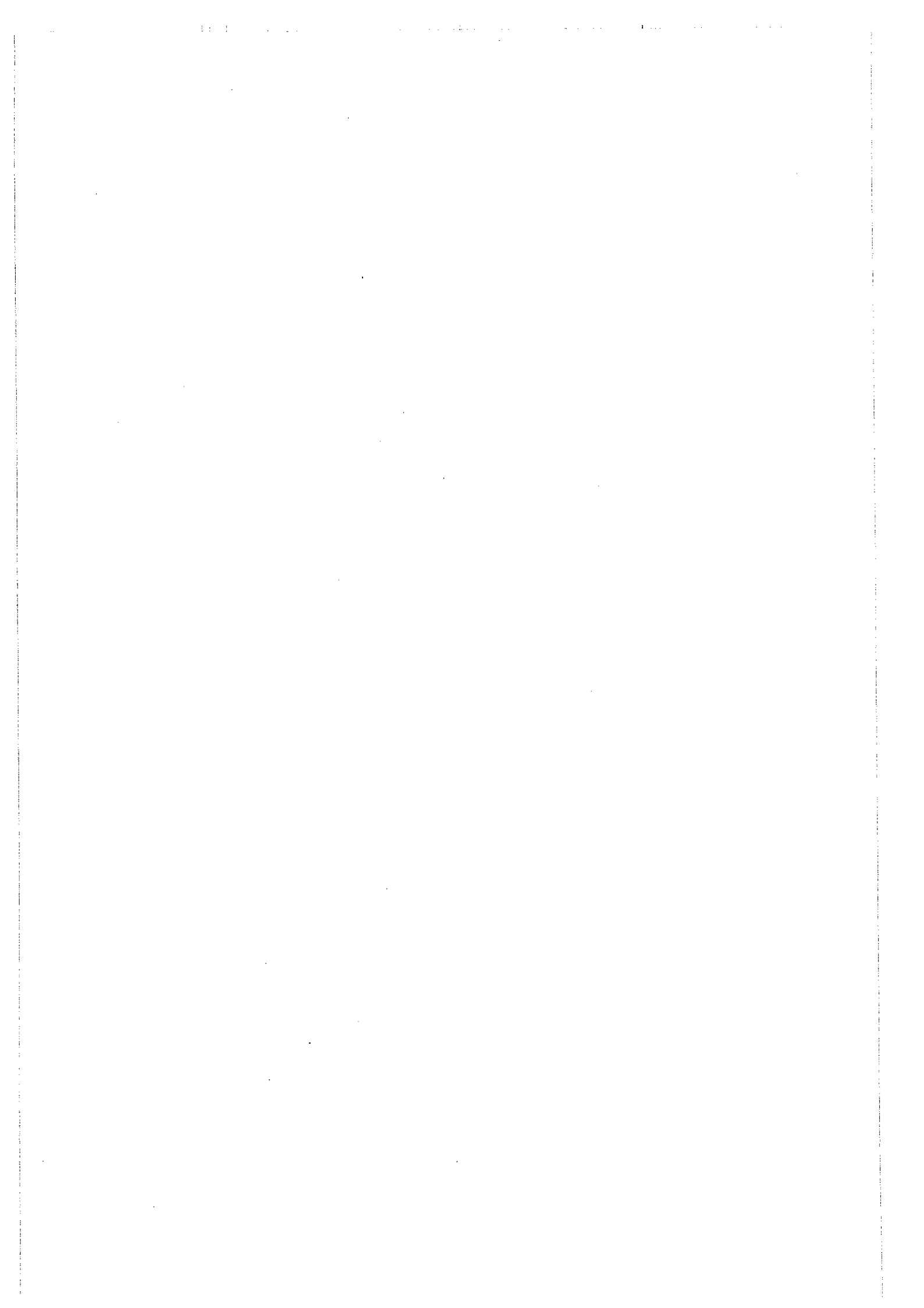
13.	Banyaknya Perusahaan Industri Besar/ Sedang, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi di Kabupaten Tabanan	79
14.	Prasarana Perdagangan di Kabupaten Tabanan Tahun 1997	80
15.	Jumlah Fasilitas Ekonomi/ Jasa di Kabupaten Tabanan Tahun 1997	81
16.	Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan 1997	81
17.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	83
18.	PDRB Kabupaten Tabanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Setiap Sektor Tahun 1996 – 1998	84
19.	PDRB Kabupaten Tabanan Atas Dasar Harga Konstan dan Kontribusi Setiap Sektor Tahun 1996 – 1998	85
20.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Atas Harga Konstan Per Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 1999	86
21.	Laju Pertumbuhan Rata-Rata Sub Sektor di Kabupaten Tabanan Tahun 1996 – 2001	88
22.	Kontribusi Rata-Rata Sub Sektor Terhadap PDRB – Harga Berlaku Kabupaten Tabanan Tahun 1996 – 2001	89
23.	Realisasi Investasi Swasta di Kabupaten Tabanan Kurun Waktu 1990 – 2001	92
24.	Jumlah dan Laju Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 1990 – 2001	94
25.	Kategori Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Tabanan Menurut Kecamatan Tahun 2000	95
26.	Proyeksi Distribusi Kepadatan Penduduk Bruto Kabupaten Tabanan Menurut Kecamatan Tahun 2000 – 2005	96
27.	Proyeksi Distribusi Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Tabanan Menurut Kecamatan Tahun 2000 – 2005	97

28.	Realisasi Pengeluaran Pembangunan dan Rutin Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 1990 – 2001	99
29.	Realisasi Penerimaan PAD dari Pajak Kabupaten Tabanan Tahun 1990 – 2001	102
30.	Volume Ekspor Kabupaten Tabanan Kurun Waktu 1990 – 2001	104
31.	Kriteria Penilaian Investasi Swasta	117
32.	Kriteria Penilaian Pertumbuhan Penduduk	122
33.	Kriteria Penilaian Pengeluaran Pembangunan	128
34.	Kriteria Penilaian Pengeluaran Rutin	132
35.	Kriteria Penilaian Pajak	137
36.	Kriteria Penilaian Ekspor	141
37.	Rekapitulasi Skor Input Rumusan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Bali	144
38.	Alternatif Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi	161



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	39
2.	Ilustrasi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi	49
3.	Kerangka Berfikir Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Input dari Perumusan	52



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Pedoman Wawancara	174
2.	Hasil Olahan SPSS Versi 10.0	177
3.	Lampiran Data	180
4.	Hasil Regresi dan Data yang Diolah	186

The Board of Directors of the United States Trust Company, in its annual report for the year 1981-1982, has the honor to present to you a summary of the company's activities and financial performance. The report is divided into several sections, including a letter from the Chairman, a letter from the President, and a detailed financial statement. The company has achieved significant success in its operations, and we are confident that the future holds many more opportunities for growth and development.

The Board of Directors is composed of the following members: [List of Board Members]

The President of the company is [Name], and the Chairman is [Name]. The Board of Directors is pleased to announce that the company has achieved a record year in 1981-1982, with a significant increase in revenue and a strong performance in all major areas of the business.

The financial statement shows that the company's assets have increased by [Percentage] over the past year, and the company has maintained a strong position in the market. The Board of Directors is confident that the company's success is a result of the hard work and dedication of its employees and the support of its shareholders.

We are grateful for the continued support and confidence of our shareholders, and we look forward to continuing our growth and development in the future. The Board of Directors is pleased to announce that the company has achieved a record year in 1981-1982, with a significant increase in revenue and a strong performance in all major areas of the business.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembangunan Daerah, salah satu kondisi spasial yang penting untuk dibicarakan adalah masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi spasial atau ruang kosong dalam pembangunan daerah sangatlah bermakna jika diisi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana percepatan proses pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan di daerah bersangkutan.

Memasuki pembangunan jangka panjang tahap II, beberapa Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali telah berupaya menanggulangi ketertinggalan di bidang ekonomi tersebut, namun hasilnya kurang memenuhi target seperti yang diharapkan oleh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Ketertinggalan di bidang ekonomi ini, dialami pula oleh Kabupaten Tabanan Provinsi Bali yang ditandai dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah atau sebesar 2.22 % pada kurun waktu 1996/1997-2000, jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi Bali tahun 1996/1997-2000 sebesar 2,72%, seperti dapat dilihat di Tabel 1.1,

UPI - PUSTAKA - INDIP

Tabel.1.1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali, Tahun 1996/1997- 2000. (Berdasarkan Harga Konstan)

Kabupaten/ Provinsi Tahun	Kab. Tabanan (r %)	Prov. Bali (r %)
1	2	3
1996/1997	7,2	7,5
1997/1998	4,9	5,4
1998/1999	-3,9	-3,4
1999/2000	0,5	0,9
2000	2,4	3,25
Rata-rata pertumbuhan	2,22	2,72

Sumber : Data diolah Dari PDRB Prov. Bali dan PDRB Kab. Tabanan Tahun 1996/1997 -2000

Tabel 1.1 memberi gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, kenyataan tersebut bisa diakibatkan oleh formulasi kebijakan di bidang ekonomi yang kurang tepat.

Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan, merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan sebab dapat berimbas ke dimensi lain , tidak saja dirasakan dalam kaitan ekonomi, juga berdampak pada sosial, politik, hukum dan sarana fisik lainnya.

Para *stakeholder* yang ada di Kabupaten Tabanan telah menyepakati agenda (*Agenda Setting*) peningkatan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan isu strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Tabanan tahun

2001 – 2005, tinggal sekarang bagaimana para pembuat kebijakan tersebut mencari formulasi kebijakan (*Policy Formulation*) yang tepat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan Kabupaten Tabanan.

Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Secara awam dikatakan, perlu pendapatan yang tinggi untuk dapat mencapai kesejahteraan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang jumlahnya juga meningkat.

Setelah disadari bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penting bagi pencapaian kesejahteraan maka pembicaraan beralih ke masalah di mana bisa didapat pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena itu maka topik sumber pertumbuhan ekonomi (*sources of economic growth*) menjadi penting.

Secara aritmatika, sumber pertumbuhan dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal , tenaga kerja dan perubahan dalam produktivitas. Perubahan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar daerah. Sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi.(*World Bank*, dalam Suahasil Nazara,1994:21).

Konsep tersebut dituliskan oleh Solow, yang menjadi salah satu karya klasik dalam literatur pertumbuhan ekonomi (Robert. M. Solow

dalam Suahasil Nazara, 1994:21). Studi Robert Solow memasukkan faktor produksi modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*) sebagai sumber pertumbuhan. Dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model Solow tersebut dapat menghasilkan beberapa tingkat pendapatan perkapita negara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah dihadapkan dengan masalah-masalah pokok yang dihadapi daerah, seperti pada penekanan kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal/daerah (Lincoln Arsyad,1999: 108). Sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya Lincoln Arsyad (1999:115) memformulasikan pembangunan daerah sebagai berikut :

Pembangunan Daerah = f (sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan-bantuan pembangunan).

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan sangat jauh dari harapan pemerintah maupun masyarakat, bahkan dari tahun 1996/1997 sampai tahun 2000 mengalami fluktuasi yang tajam bahkan sampai mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 1998/1999 dan merangkak naik pada tahun berikutnya tetapi tidak memenuhi harapan di atas 5% atau lebih dari tahun 1996/1997 (lihat Tabel 1.2). Ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Tabanan, dengan upaya-upaya apa dilakukan untuk mempercepat kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel.1.2
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten /Kota di Provinsi Bali
Tahun 1996/1997- 2000.(Berdasarkan Harga Konstan)

No.	Kabupaten/ Kota	1996/1997 (%)	1997/1998 (%)	1998/1999 (%)	1999/2000 (%)	2000 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jembrana	5,4	5,0	-3,8	0,9	3,5
2.	Tabanan	7,2	4,9	-3,9	0,5	2,4
3.	Badung	9,0	6,5	-4,9	0,5	4,9
4.	Denpasar	9,1	6,4	-5,2	1,4	3,1
5.	Giayar	8,2	6,0	-2,6	1,7	4,7
6.	Klungkung	7,3	5,1	-2,6	0,8	2,4
7.	Bangli	7,1	4,1	-2,5	0,5	2,4
8.	Karangasem	7,1	4,7	-2,6	0,7	2,4
9.	Buleleng	7,5	5,6	-2,9	1,0	3,5

Sumber : Data diolah dari PDRB Kabupaten/ Kota Provinsi Bali

Dalam Tabel 1.2 khusus untuk Kabupaten Tabanan , bahwa terjadi penurunan pertumbuhan PDRB Kabupaten pada tahun 1996/1997 dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Tahun 1998/1999 PDRB Kabupaten Tabanan paling drastis penurunannya adalah sebesar - 3,9 % , berarti mengalami pertumbuhan negatif -3,9 %. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 PDRB Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan, namun tidak mampu melampaui PDRB pada tahun 1996/1997 dan sebelumnya.

Kenyataan di atas merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam hal ini pemerintah daerah saja tidak cukup untuk menangani masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut, keterlibatan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi yang ada di Kabupaten Tabanan.

Dari fenomena ini perlu dicermati faktor-faktor sebagai penyebab dan dicari rumusan kebijakan yang tepat untuk mengatasi begitu sangat fluktuatifnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan.

Untuk mendorong peningkatan produksi yang sekaligus berdampak pada pendapatan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju,

pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Peranan pemerintah di dalam kegiatan ekonomi tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja (*budget*) yang pada dasarnya anggaran ini meliputi penerimaan dari pajak dan bukan pajak serta pengeluaran. Selain itu hasil nyata dari berbagai kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang keuangan daerah dapat dilihat dari perkembangan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Perkembangan produksi dari masing-masing sektor di Kabupaten Tabanan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu di sumbang oleh berbagai sektor seperti : pertanian, pertambangan dan energi, industri pengolahan, listrik gas dan air minum, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan , komunikasi dan jasa-jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
tahun 1995/1996 – 2000, (Rp. Juta), Berdasarkan Harga Konstan.

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto	r (%)
1995/1996	653.384.9	-
1996/1997	700.759.0	7,2
1997/1998	735.256.6	4,9
1998/1999	706.115.0	-3,9
1999/2000	710.217.0	0,5
2000	727.933.8	2,4
Laju pertumbuhan rata-rata		2,22

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan ,PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 1995 - 2000

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, Kabupaten Tabanan memiliki PDRB pada tahun 1997/1998 dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 735.256.600.000, sedangkan setelah tahun 1997/1998 PDRB Kabupaten Tabanan terus nilainya di bawah PDRB tahun 1997/1998 kendati pada tahun 1998/1999 ke tahun 1999/2000 mengalami kenaikan begitu juga pada tahun 1999/2000 ke tahun 2000 juga mengalami kenaikan, tetapi nilainya lebih masih rendah dibandingkan dengan tahun 1997/1998.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Tabanan tidak mencerminkan kenaikan secara konsisten , ini dapat terlihat dari fluktuasi pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan, bahkan terjadi pertumbuhan yang negatif pada tahun 1998/1999 (bisa dilihat di Tabel.1.3).

Perkembangan pengeluaran investasi swasta Kabupaten Tabanan yang diukur dari besarnya penanaman modal masyarakat dan swasta; dalam bentuk pembentukan modal domestik bruto. Perkembangan Investasi swasta tahun 1995/1996 –2000 dapat dilihat dalam Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel. 1.4
Investasi Swasta Kabupaten Tabanan Bali, 1995/1996—2000 (Rp. juta)
(Berdasarkan Harga Konstan)

Tahun	Investasi Swasta	r (%)
1995/1996	174.911,4	-
1996/1997	191.590,6	9,5
1997/1998	190.964,1	-0,3
1998/1999	128.106,8	-32,9
1999/2000	124.656,4	-2,6
2000	127.397,8	2,1
Laju pertumbuhan rata-rata		-4,8

Sumber :BPS Bekerjasama dengan Bappeda, BKPMD Prov. Bali, Tahun 2001

Pada Tabel.1.4 terlihat investasi swasta pada tahun 1996/1997 untuk Kabupaten Tabanan dengan nilai Rp. 191.590,6 juta merupakan nilai investasi tertinggi , sedangkan investasi swasta paling rendah pada tahun 1999/2000 dengan nilai Rp. 124.545,4 juta. Penulis melihat ada fluktuasi yang tajam dari investasi swasta ini, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.4, tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 1996/1997 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 1997/1998 sampai tahun 1999/2000

mengalami penurunan yang cukup tajam dan investasi swasta kembali naik pada tahun 2000.

Jika dilihat dari pertumbuhan investasi swasta yang ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata – 4,8% dalam kurun waktu 1995/1996 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata investasi swasta Provinsi Bali dengan rata-rata 0,26% kurun waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 (Data Bali Membangun, 2000), fenomena ini memberi gambaran pertumbuhan investasi swasta Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan investasi swasta Provinsi Bali.

Perkembangan pengeluaran investasi pemerintah dan konsumsi pemerintah di Kabupaten Tabanan yang diukur dari besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan selama tujuh tahun terakhir mulai tahun 1993/1994 –2000 dapat dilihat dalam Tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel. 1:5
 Investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan Bali,
 Tahun 1993/1994—2000 (Rp. Milyar), Berdasarkan Harga Konstan.

Tahun	Investasi Pemerintah	r (%)
1993/1994	9,98	-
1994/1995	8,72	-12,6
1995/1996	9,63	10,4
1996/1997	10,84	12,5
1997/1998	16,32	50,5
1998/1999	17,91	9,7
1999/2000	29,65	65,5
2000	32,64	10,0
Laju pertumbuhan rata – rata		20,8

Sumber : Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan , Tahun 1993/1994 - 2000

Pada Tabel.1.5 terlihat investasi pemerintah tahun 1994/1995 untuk Kabupaten Tabanan dengan nilai Rp. 8,72 miliar merupakan nilai investasi terendah , sedangkan investasi pemerintah paling tinggi pada tahun 2000 dengan nilai Rp. 32,64 miliar. Penulis melihat tidak ada fluktuasi yang tajam dari investasi pemerintah ini, seperti kita ketahui bersama tahun 1997/1998 terjadi krisis moneter dan berlanjut ke krisis multi dimensional, tetapi kenyataannya investasi pemerintah mengalami kenaikan yang tinggi.

Sedangkan dilihat dari pertumbuhan investasi pemerintah yang ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 20,8% dalam kurun

waktu 1993/1994 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata investasi pemerintah Provinsi Bali dengan rata-rata 51,92% kurun waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 (Data Bali Membangun, 2000), kenyataan ini memberi gambaran pertumbuhan investasi pemerintah Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan investasi pemerintah Provinsi Bali.

Selain pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan, pengeluaran lainnya berupa konsumsi pemerintah daerah, yang disebut juga dengan pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ini juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran rutin pemerintah Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel. 1.6.

Tabel.1.6
Belanja Rutin Kabupaten Tabanan Bali, 1993/1994-2000 (Rp. Miliar)
Berdasarkan Harga Konstan

Tahun	Belanja Rutin Pemerintah	r (%)
1993/1994	21,175	-
1994/1995	28,115	32,8
1995/1996	33,938	20,7
1996/1997	38,222	12,6
1997/1998	44,975	17,7
1998/1999	45,923	2,1
1999/2000	62,939	37,0
2000	59,564	-5,4
Laju pertumbuhan rata-rata		16,8

Sumber : Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan, Tahun 1993/1994 - 2000

Dari Tabel 1.6 terlihat besarnya konsumsi pemerintah untuk belanja rutin di Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 21.175 miliar merupakan pengeluaran pemerintah terendah dan pada tahun 1999/2000 mengalami pengeluaran pemerintah tertinggi sebesar Rp. 62.939 miliar, sedangkan laju rata-rata peningkatan sebesar 16,8% dari tahun 1993/1994 sampai tahun anggaran 2000.

Sedangkan dilihat dari pertumbuhan pengeluaran rutin yang ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 16,8% dalam kurun waktu 1993/1994 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata investasi pemerintah Provinsi Bali dengan rata-rata 48,08% kurun waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 (Data Bali Membangun, 2000), kenyataan ini memberi gambaran pertumbuhan pengeluaran rutin Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan investasi pemerintah Provinsi Bali.

Salah satu faktor penentu yang tidak kalah pentingnya yaitu pertumbuhan penduduk, ada beberapa ahli yang berbeda pendapatnya mengenai pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti Lincoln Arsyad (1999:7) mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak memandang pertumbuhan penduduk, sedangkan pendapat lain mengatakan jelas pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan PDRB di suatu daerah akan mengurangi dari pertumbuhan ekonomi itu secara riil. Seperti di yang di utarakan oleh Boediono

(1982:1-2) jika pertumbuhan permintaan kerja lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat upah akan merosot. Perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan Bali dapat di lihat dalam Tabel 1. 7

Tabel.1.7
Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
Tahun 1996/1997-2000

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	r (%)
1996/1997	351.150	-
1997/1998	355.200	1,1
1998/1999	357.200	0,6
1999/2000	359.150	0,5
2000	372.540	3,7
Laju pertumbuhan rata-rata		1,5

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan ,Tahun 1995/1996 - 2000

Tabel 1.7 di atas memperlihatkan jumlah dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1996/1997 – 2000. Kabupaten Tabanan pada tahun 2000 mengalami laju pertumbuhan penduduk yang paling besar yaitu sebesar 3,7% dan yang paling kecil laju pertumbuhan penduduknya pada tahun 1999/2000 Tabanan yaitu sebesar 0,5%,

Sedangkan dilihat dari pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 1,5% dalam kurun waktu

1996/1997 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Bali dengan rata-rata 0,016% kurang waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 (Data Bali Membangun, 2000), fenomena ini memberi gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Bali.

Perkembangan penerimaan pajak daerah diukur dari besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak warisan dan pajak penjualan. Perkembangan pajak daerah tahun 1993/1994 –2000 dapat dilihat dalam tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel.1.8
Realisasi penerimaan pajak Kabupaten Tabanan Bali
Tahun 1993/1994-2000 (Rp. ribu), Berdasarkan Harga Konstan

Tahun	Penerimaan Pajak	r (%)
1993/1994	32.869,69	-
1994/1995	64.011,08	94,7
1995/1996	79.548,38	24,3
1996/1997	88.309,98	11,0
1997/1998	171.462,24	94,1
1998/1999	507.754,23	196,1
1999/2000	645.787,45	27,2
2000	708.068,58	9,6
Laju pertumbuhan rata-rata		65,28

Sumber : Dipenda. Kabupaten Tabanan, Tahun 1993/1994 - 2000

Pada Tabel.1.8 terlihat penerimaan pajak daerah pada tahun 1993/1994 untuk Kabupaten Tabanan dengan nilai Rp. 32.869.699.900 merupakan nilai penerimaan pajak terendah , sedangkan penerimaan pajak paling tinggi pada tahun 1996/1997 dengan nilai Rp. 708.068.577.970. Penulis melihat ada fluktuasi yang tajam dari penerimaan pajak ini, terlihat dari tahun 1993/1994 sampai tahun 2000 mengalami fluktuasi pertumbuhan.

Jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 65,28% dalam kurun waktu 1993/1994 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak Provinsi Bali dengan rata-rata 87,98% kurun waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 (Data Bali Membangun, 2000), ini memberi gambaran pertumbuhan penerimaan pajak Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Provinsi Bali.

Dalam perekonomian terbuka yang dianut oleh bangsa Indonesia peranan sektor luar negeri sangatlah penting guna meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri, seperti di Kabupaten Tabanan di mana para eksportir sangat beruntung di saat krisis multidimensional seperti sekarang ini, eksportir yang ada di Kabupaten Tabanan telah mengekspor seperti : Kerajinan Tangan / *Handicraft*, Garmen, Perhiasan dan lain-lainnya. Penulis melihat dari order yang diperoleh inilah yang

membentuk modal karena pengimpor dari luar negeri membayar di muka dari order barang yang dipesan, dari penambahan modal ini akan memperbesar kapasitas perekonomian Kabupaten Tabanan. Ini terlihat dari orientasi ekspor yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tabanan. Seperti yang kami dapat tampak volume ekspor Kabupaten Tabanan pada tabel 1.9 sebagai berikut :

Tabel 1.9
Total Ekspor Kabupaten Tabanan tahun 1996/1997-2000
Berdasarkan Harga Konstan

Tahun	Nilai Ekspor (juta.)	r (%)
1996/1997	415,88	-
1997/1998	462,08	11,1
1998/1999	769,81	39,9
1999/2000	374,16	-51,4
2000	198,32	-46,9
Laju pertumbuhan rata-rata		-47,3

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan, 2001

Dari tabel 1.9 di atas volume ekspor yang paling tinggi adalah pada tahun 1998/1999 di mana pada saat itu negara mengalami krisis moneter tetapi di Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Tabanan pada khususnya mengalami perkembangan ekspor yang meningkat ini diakibatkan oleh menurunnya nilai rupiah terhadap dollar, di mana

barang-barang produksi dalam negeri dianggap murah oleh pembeli luar negeri sehingga para konsumen merasa untung membeli barang-barang dalam negeri, khususnya Kabupaten Tabanan pada waktu itu mengalami booming devisa dan berdampak menjamurnya eksportir di Kabupaten Tabanan yang selanjutnya berdampak pada membesarnya skala produksi untuk tujuan ekspor pada waktu itu.

Jika dilihat dari pertumbuhan volume ekspor yang ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata $-47,3\%$ dalam kurun waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan volume ekspor Provinsi Bali dengan rata-rata $0,26\%$ kurun waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 (Data Bali Membangun, 2000), ini memberi gambaran pertumbuhan volume ekspor Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan volume ekspor Provinsi Bali.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat investasi swasta di Kabupaten Tabanan.
2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabanan.
3. Masih rendahnya tingkat pengeluaran pembangunan pemerintah di Kabupaten Tabanan.

4. Masih rendahnya tingkat konsumsi pemerintah di Kabupaten Tabanan.
5. Belum optimalnya penerimaan pajak di Kabupaten Tabanan.
6. Belum optimalnya volume ekspor Kabupaten Tabanan .

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Faktor- faktor apa saja yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali kurun waktu 1990 – 2001.
2. Bagaimana membuat rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tepat dan mampu dilaksanakan, dari faktor – faktor yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor –faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan kurun waktu 1990 – 2001 “.
2. Untuk mengkaji dan membuat alternatif rumusan kebijakan pengembangan dari faktor – faktor dominan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan sekaligus keterampilan dalam meneliti.
2. Bagi instansi pemerintah Kabupaten Tabanan dapat menjadi masukan (input) dalam salah satu *Policy Formulation* yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Paul A. Baran (dalam Jhingan, 2000: 5) berpendapat, gagasan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri mengesankan suatu peralihan ke suatu yang baru dari suatu yang lama, yang telah lama dipergunakan. Definisi yang lain menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. "Pendapatan nasional nyata" menunjuk pada keseluruhan output barang-barang jadi dan jasa dari negara itu dalam arti nyata ketimbang dalam arti uang.

Berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang . Para ekonom berpendapat sama dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan pendapatan atau output nyata per kapita. Meier, Bucanan dan Ellis, menekankan bahwa bagi perkembangan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk (Jhingan 2000: 5-6) .

Pendapat senada juga di utarakan oleh Faried Wijaya, (1989:264) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan Produk Nasional Bruto riil atau pendapatan riil .Jadi

perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi lainnya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur output riil per orang. Karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi bila tingkat kenaikan output riil total lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Lain halnya dengan para ekonom di atas, menurut Lincolin Arsyad (1999:7) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk ataukah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Dalam hal ini ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" menunjukkan adanya perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, di mana penekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output "per kapita". Ada dua sisi yang perlu diperhatikan di sini, yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Output total maupun output per kapita dalam lingkup daerah, biasanya menggunakan PDRB untuk menghitung laju pertumbuhan ekonominya. Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif "jangka panjang". Suatu perekonomian akan tumbuh apabila dalam

jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output per kapita. Meskipun pada suatu tahun output per kapita merosot, tetapi apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik, maka bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1994) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan berbagai perkembangan lainnya.

a. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya

sehingga problema ini tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut tidak ditemui di alam yang modern. Karena itu tindakan pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu. Untuk mengangkat negara-negara itu keluar dari titik mati stagnasi diperlukan adanya pembaharuan rasio ekonomi secara tepat. Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan bidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal yaitu mengarah pada penciptaan overhead sosial dan ekonomi seperti , transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perusahaan swasta tidak akan tertarik melaksanakan kegiatan tersebut karena resiko besar dan keuntungan kecil. Dari sinilah timbul untuk menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian. Oleh karena itu pengawasan dan pengaturan oleh negara, menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan (Jhingan 2000:431)

Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “ penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, distribusi pendapatan, membentuk lembaga-lembaga ekonomi menentukan penggunaan sumber dan menentukan laju investasi

Upaya untuk mengacu pertumbuhan ekonomi di daerah telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian subsidi dan bantuan serta insentif pajak bagi daerah-daerah terkebelakang. Sebagaimana kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kegiatan pembangunan ekonomi baik upaya yang sudah dicapai maupun masih dalam proses, maka peran pemerintah Kabupaten dalam perekonomian adalah memberikan simultan dan lebih mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat.

Berdasarkan beberapa teori pertumbuhan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan kenaikan pendapatan nasional yang tercermin pada PDB atau PDRB kalau di daerah dari tahun ke tahun. Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang nyata (riil) maka kenaikan PDB/PDRB yang diukur adalah PDB/PDRB berdasarkan harga konstan.

Dalam perhitungan besarnya PDB/PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang digunakan mengukur sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dengan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

b. Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Kelangkaan modal merupakan ciri umum dari negara berkembang. Negara terbelakang diartikan sebagai perekonomian yang "miskin modal" atau dengan "tabungan dan investasi yang rendah". Bukan saja persediaan modal yang sangat kecil tetapi tingkat pemupukan modalnya juga sangat rendah. Tingkat pemupukan modal seperti ini hampir tidak cukup untuk menopang penduduk yang tumbuh dengan cepat (Jhingan, 2000: 25)

Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan dikatakan " kunci utama pembangunan ekonomi". Sekali proses ini berjalan, ia akan senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya sendiri.

Makna pembentukan modal ialah , masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarah sebagian daripadanya untuk pembuatan Investasi barang modal yang produktif.

Pembentukan modal bisa dari pemerintah daerah melalui anggaran pembangunan dan bisa dari pihak swasta. Pembentukan modal dari pihak swasta biasanya lebih mengacu pada sektor produktif, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi swasta sangat tergantung pada situasi politik dan keamanan di suatu

daerah serta fasilitas yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah setempat. Untuk menarik investor dalam dan luar negeri pemerintah daerah harus berani mengadakan promosi potensi daerahnya.

c. Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

Negara berkembang umumnya lebih cepat pertumbuhan penduduknya dibandingkan pertumbuhan ekonominya maka pertumbuhan secara riil tidak akan terjadi, karena pertumbuhan ekonomi ditelan oleh pertumbuhan penduduk. Akibatnya tidak ada peningkatan taraf hidup, ini yang berarti dibutuhkan Sumber Daya manusia yang mampu diserap dalam kegiatan produksi agar kenaikan pertumbuhan penduduk dibarengi oleh kenaikan ekonomi yang sama.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan (Arsyad, 1999:124)

Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Adam Smith menulis buku *Wealth of Nations*. Adam Smith menulis " Buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan ". Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahannya mengenai dampak

pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Tetapi kekhawatiran mereka terbukti tidak berdasar karena penduduk di Eropa Barat justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut, kenaikan jumlah penduduk yang tinggi bagaimanapun justru akan menaikkan produktivitas. Kenyataannya, kenaikan jumlah penduduk menghasilkan kenaikan GNP (produk nasional bruto) yang lebih tinggi ketimbang proporsional (Jhingan2000:404).

d. Investasi Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam belanja pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat., pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat. Pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses *multiplier*) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi

menambah stok kapital (misalnya: jalan, jembatan, pelabuhan) secara tidak langsung dapat meningkatkan output yang lebih besar pada masa mendatang (Boediono , 1981: 59-60).

e. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Keuangan menjadi salah satu faktor yang merupakan sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah diukur dengan pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ini mempunyai peranan dan fungsi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan. Keseluruhan pengeluaran konsumsi baik untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai merupakan penerimaan bagi masyarakat. Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya peningkatan permintaan agregat akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB akan meningkat, dengan meningkatnya PDRB sebagai indikasi timbulnya suatu perekonomian akan menambah penerimaan (Boediono, 1982 : 114-118).

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi semua pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dengan pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji para pegawai, dengan pengeluaran pemerintah ini akan menambah daya beli sebagian masyarakat untuk konsumsi yang akan mempengaruhi permintaan agregat. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah. Perhitungan konsumsi pemerintah dilakukan dengan menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang meliputi pengeluaran rutin untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja rutin lain-lain seperti belanja pensiun dan subsidi.

f. Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan "stabilisasi atau pembangunan". Penggunaan kebijaksanaan fiskal dengan tujuan untuk

menggalakkan pembangunan ekonomi merupakan kebijaksanaan yang baru tampil akhir-akhir ini. Kebijaksanaan fiskal memainkan peranan dinamis di negara-negara terkebelakang. Sebenarnya penggunaan secara luas kebijaksanaan fiskal sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi. Dalam ungkapan Nurkse, kebijaksanaan fiskal di negara berkembang "memikul arti penting baru di dalam menghadapi problem pembentukan modal" (Nurkse dalam Jhingan, 2000:143).

Nurkse memandang rasio tabungan marginal negara, yaitu kecenderungan marginal menabung, sebagai penentu penting pertumbuhan. Rasio tabungan marginal dapat ditingkatkan dengan pengeluaran pemerintah dalam menciptakan overhead ekonomi dan sosial, lembaga perkreditan dan perbankan dan di dalam mendirikan industri-industri baru. Hal ini akan membantu menaikkan out put, lapangan pekerjaan dan pendapatan negeri itu. Oleh karena arus tabungan sukarela di dalam negara berkembang kecil, maka untuk menjebak tabungan wajib, perpajakan merupakan instrumen yang paling bermanfaat. Kebijaksanaan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara berkembang. Di dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam riil maupun dalam arti uang.

g. Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber-sumber domestik, betapapun, perlu dilengkapi dengan sumber eksternal. Modal dapatlah di impor, baik secara langsung dalam bentuk pinjaman dan bantuan ataupun secara tidak langsung dengan pembayaran impor melalui ekspor (Jhingan, 2000: 52)

Dalam perekonomian terbuka yang dianut oleh bangsa Indonesia, di mana tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh luar negeri terhadap perekonomian dalam negeri, Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya, meningkatnya intensitas perdagangan antara negara-negara di dunia akan membawa dampak yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Bilamana suatu negara mengkhususkan pada produksi beberapa barang tertentu sebagai akibat perdagangan luar negeri dan pembagian kerja, ia dapat mengekspor komoditi yang ia produksi lebih murah itu untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya lebih rendah. Dari perdagangan luar negeri, maka negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah out put. Dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat out put yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.

Negara berkembang biasanya memiliki pasar domestik yang kecil. Pasar domestik yang kecil tidak mampu menyerap out put yang ada.

Ini menyebabkan rendahnya dorongan untuk berinvestasi. Pasar yang kecil juga disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita dan daya beli. Perdagangan internasional memperluas pasaran dan merangsang investasi, pendapatan dan tabungan melalui alokasi dan sumber dayadengan lebih efisien. Tambahan lagi, beberapa negara berkembang mengkhhususkan diri pada satu dua komoditi bahan makanan. Jika dilakukan upaya ekspornya, upaya-upaya itu cenderung meluaskan pasar. Sumber-sumber yang ada digunakan lebih produktif dan alokasi sumber-sumber menjadi lebih efisien berdasarkan fungsi-fungsi produksi tertentu. Ini semua adalah keuntungan langsung dari perdagangan luar negeri yang dikemukakan oleh J.S. Mill (dalam Jhingan, 2000 :448). Perdagangan luar negeri juga membantu mengalihkan sektor pangan (subsisten) ke sektor uang kerana pasar bagi produk pertanian meningkat dan pendapatan serta standar kehidupan kaum tani meningkat. Inilah keuntungan langsung dari perdagangan international.

Dari tindakan untuk saling membuka pasar sebenarnya tidak terletak pada perhitungan berapa pangsa pasar yang hilang dan berapa pangsa yang diperoleh pada suatu saat. Keuntungan liberalisasi perdagangan terutama berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi yang mengalir dari proses dinamis pembukaan pasar itu, salah satu yang manfaat yang diperoleh yaitu dalam membuka akses pasar ekspor yang lebih luas memungkinkan dipetikny efisiensi yang berasal dari kegiatan

produksi berskala besar (*economies of scale*). Terkait dengan manfaat ini liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sehingga menurunkan biaya produksi mereka semua (*economies of agglomeration*).

Seperti telah dijelaskan di muka pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dalam definisi ini lebih ditekankan pada aspek :

1. Perekonomian berkembang dari waktu ke waktu
2. Kenaikan output perkapita karena kenaikan pendapatan akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, agar pendapatan perkapita naik maka pertumbuhan ekonomi harus lebih daripada kenaikan jumlah penduduk.

Aspek lainnya adalah pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam jangka panjang yaitu peningkatan pertumbuhan perkapita terus berlangsung dalam jangka panjang, di mana dalam jangka waktu yang cukup panjang output perkapita mempunyai kecenderungan yang meningkat dapat dikatakan terjadi pertumbuhan ekonomi, walau bisa saja terjadi pada satu tahu tertentu output perkapita menurun (Boediono, 1982: 1-2).

Berdasarkan uraian di atas maka kajian dalam penelitian yang mengambil kasus Kabupaten Tabanan Bali dengan variabel-variabelnya : pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan yang dipengaruhi oleh investasi swasta (Ip), jumlah penduduk (L), investasi pemerintah (I_g), pengeluaran konsumsi pemerintah (G) , penerimaan daerah (R) dan Ekspor Daerah (X).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Input dalam proses Perumusan Kebijakan Publik di bidang Ekonomi

Menurut James E. Anderson (dalam Islamy, 1994:19) kebijakan publik adalah kebijakan –kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah :1) kebijakan publik mempunyai suatu tujuan tertentu atau mempunyai tindakan -tindakan yang berorientasi pada tujuan;2) kebijakan tersebut berisi tindakan- tindakan pejabat pemerintah; 3) Kebijakan itu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah; 4) kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah yang mengenai suatu masalah tertentu , atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan kepada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*). Kebijakan Publik menurut George C. Edwards III

dan Ira Sharsanky (dalam Islamy,1994:18) adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Senada dengan pendapat James E. Anderson dan George Edwards III serta Ira Sharsansky di atas menurut Thomas R. Dye, (dalam Budi Winarno, 1989: 2), kebijakan publik adalah " *Whater governments choose to do or no to do* " (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan, dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya mencerminkan perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Dalam penerapan kebijakan publik menurut Peter (dalam Fitriani, 2001:13), kebijakan publik memiliki berbagai instrumen kebijakan yaitu ; 1) hukum; 2) pelayanan/jasa; 3) dana; 4).pajak; 5) persuasi, yang digunakan bila instrumen lain gagal mempengaruhi masyarakat.

Menyimpulkan berbagai macam pengertian mengenai kebijakan publik di atas, Islamy (1994:21) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Implikasi pengertian tersebut adalah : 1) Kebijakan publik bentuk perdananya adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah ; 2) kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tapi juga dilaksanakan

dalam bentuk nyata ; 3) setiap kebijakan publik dilandasi maksud dan tujuan tertentu ; 4) kebijakan publik pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

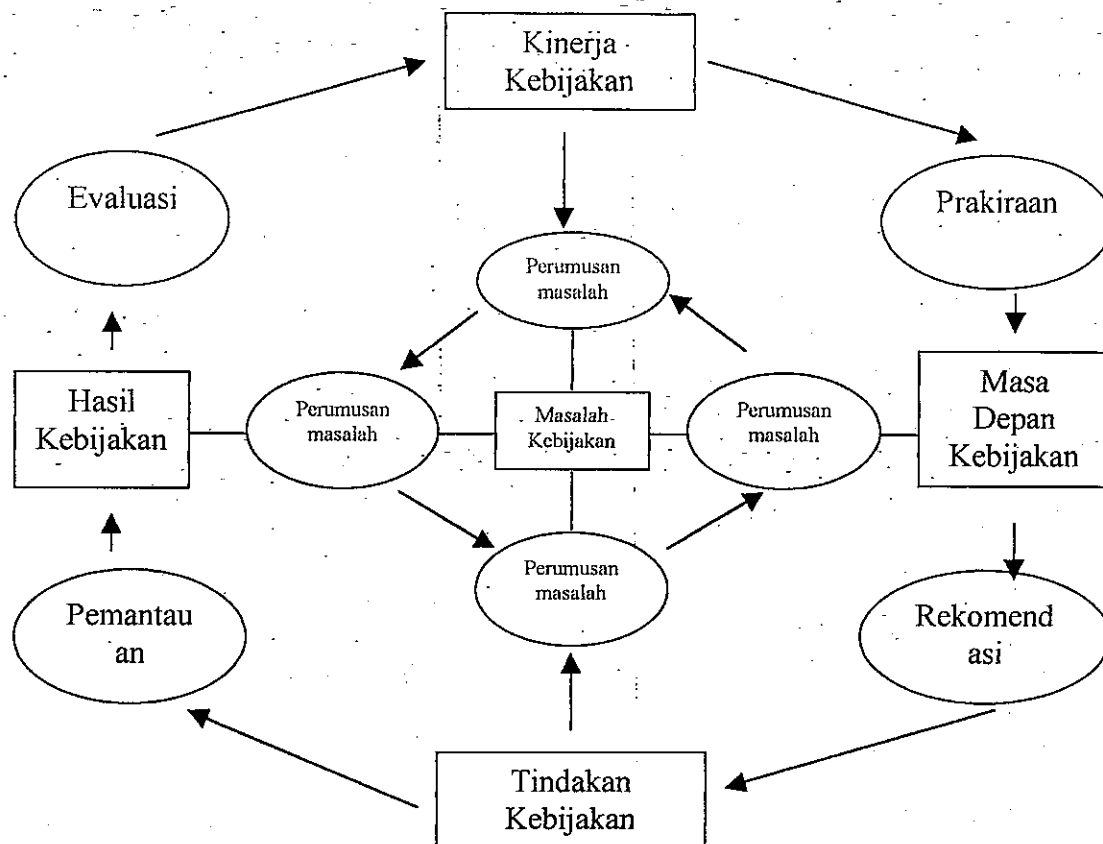
Dalam proses Kebijakan Publik yang terdiri dari lima tahap, penulis menekankan pada formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), di mana formulasi kebijakan ini secara potensial dapat memberi sumbangan pada pencapaian nilai dan pemecahan masalah Kebijaksanaan (Dunn : 2001:51). Informasi yang tepat dan dibuat diformulasikan secara benar mengenai kondisi yang menimbulkan suatu masalah tertentu, pada dasarnya mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

Dalam hal formulasi kebijakan publik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan besaran atau angka-angka seperti pajak untuk merangsang investasi swasta seperti: memberi keringanan pajak untuk industri yang baru lahir atau bahkan memberi penundaan pajak (*Tax Holiday*), pertumbuhan penduduk dikendalikan dengan kondisi yang lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, memberikan porsi yang besar terhadap pengeluaran pembangunan, memperhatikan konsumsi pemerintah agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan berada pada kondisi yang optimal.

Dalam pembuatan suatu kebijakan publik di bidang pertumbuhan ekonomi diperlukan analisis yang mendalam dari suatu kebijakan tersebut. Analisis kebijakan menurut Dunn (1998:43) adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Proses ini divisualisasikan sebagai pembuatan kebijakan. Proses tersebut disebut oleh (Dunn, 1994:24) sebagai tahap penting dari kebijakan publik. Tahapan tersebut sebagai berikut :

- A. *Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)*
- B. *Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)*
- C. *Adopsi kebijakan (Policy Adoption)*
- D. *Implementasi Kebijakan (Policy implementation)*
- E. *Penilaian Kebijakan (policy Assessment)*

Dalam setiap tahapan di atas selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan serta evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah *scientific information* menjadi *policy relevant information*, hal tersebut dapat terlihat jelas pada gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Analisis Kebijakan Publik
Sumber : Dunn, 1998

Lima tahapan dalam ilustrasi dari Gambar.1 dapat dijabarkan menurut Dunn, 1988, berikut :

(1). Agenda Setting

Dalam tahap ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Isu / masalah yang dihadapi oleh Daerah memang luar biasa besarnya. Pemerintah Daerah misalnya harus

berurusan dengan masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kekurangan pangan pertumbuhan penduduk yang pesat, keamanan dalam negeri, serta masalah-masalah dalam negeri yang mendesak lainnya.

Proses melalui mana isu-isu masuk ke dalam agenda pemerintah sebagai masalah yang kemudian apakah diabaikan ataukah dipecahkan oleh masyarakat atau pemerintah dapat menjelaskan kebijaksanaan negara dan politik daur kebijaksanaan yang mereka anut.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah untuk mempercepat pembangunan adalah penanganan di bidang ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi menjadi motor penggerak dari keadaan yang serba *stagnasi*, pertumbuhan di bidang ekonomi diharapkan akan memberikan imbas positif ke bidang lainnya seperti, politik, sosial, hukum, keamanan dan lain-lainnya.

(2). *Policy Formulation*

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses dalam proses Kebijakan Publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itulah perlu kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan membuat formulasi kebijakan publik ini.

- Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab, sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan yang ideal dan normatif, namun tidak membumi. Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang *feasible* terhadap realitas tersebut.

Untuk lebih jauh memahami bagaimana formulasi kebijakan publik itu dan siapa yang terlibat dalam formulasi kebijakan itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan *power approaches to policy making* yang ada dikenal secara umum di khalayak kebijakan publik Person (dalam Fadillah Putra, 2001:50).

Pendekatan ini merupakan pendekatan kekuasaan yang akan mempengaruhi dari formulasi kebijakan publik. Faktor-faktor kekuasaan itu ada berbagai macam seperti kelas sosial, birokrasi, pendidikan, profesionalisme kekuatan modal dan sebagainya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini berfokus pada *technocracy* (Fadillah Putra, 2001:51).

Pandangan teknokratik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam sebuah pengaturan sosial akan lebih baik jika didalamnya

terdapat eksplorasi ilmiah yang mendalam. Sejalan dengan pandangan penulis bahwa kaum teknokrat lah yang seharusnya merumuskan kebijakan publik dengan kajian-kajian ilmiah, ini dilihat dari kenyataan sekarang di mana faktor politis kepentingan dari kaum elit dan kelompok-kelompok tertentu itu saja yang merumuskan suatu kebijakan, dengan mengabaikan kajian-kajian ilmiah yang nantinya berdampak pada masa depan kebijakan itu sendiri, sudah saatnya dalam merumuskan kebijakan publik membutuhkan landasan-landasan yang sifatnya ilmiah.

Penulis lebih menekankan pada pandangan teknokratik dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam pandangan ini, seperti sering diungkapkan oleh Cournot, Saint Simon dan Comte (dalam Fadilah Putra 2001:53-54) mengatakan bahwa sebuah pengaturan sosial akan lebih baik jika didalamnya terdapat eksplorasi ilmiah yang mendalam. Hal ini diungkapkan berdasarkan keyakinan mereka bahwa bila terjadi kondisi *chaos* dalam masyarakat, maka secara fundamental masyarakat membutuhkan landasan-landasan yang sifatnya ilmiah.

Eksplorasi ilmiah yang dilakukan peneliti terhadap faktor-faktor yang berpengaruh erat terhadap pertumbuhan ekonomi inilah yang akan di tawarkan sebagai input dalam formulasi kebijakan yang selanjutnya menjadi kebijakan publik.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai input dalam merumuskan

suatu kebijakan publik. Faktor-faktor yang digunakan sebagai input dalam merumuskan pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan investasi baik swasta maupun pemerintah, pajak yang tidak membebani rakyat, SDM yang memadai yang bisa diserap pada permintaan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan peningkatan volume ekspor.

Untuk mendapatkan input rumusan kebijakan yang komprehensif penulis terinspirasi dari *PETS Analysis* (- dikutip dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:87-88), ini secara umum menilai dan mempertimbangkan semua hal yang mempengaruhi sebuah rencana kebijakan. Semua faktor-faktor penting itu kemudian ditentukan faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan kemudian faktor-faktor itu dianalisis, dikaji dan dinilai atau bahkan di beri bobot tertentu. Bobot dalam arti urgensi nya pengaruhnya terhadap keberhasilan sebuah rencana kebijakan. Dengan melihat konteks keseimbangan kemudian input-input itu dianalisis, dinilai dan di komparasi kan satu sama lainnya untuk kemudian menghasilkan input-input kebijakan yang paling mungkin dan ideal dilaksanakan.

Analysis PETS (Analisis Politik, Ekonomi, Teknologi, Sosial) ini muncul karena kritik terhadap kelemahan-kelemahan dan ketidakapabilitasnya pendekatan *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan *CBA* (*Cost Benefit Analysis*). Kritik yang paling tajam tertuju pada *CBA analysis* yang terlalu menimbang

pendekatan ekonomi dalam memahami sebuah rencana kebijakan publik. Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak semua hal yang di hitung untung ruginya secara ekonomis/kuantitatif. Lebih jauh lagi tidak semua hal dapat dilihat, dan dimotivasi oleh semata mata motif ekonomi. Investasi pendidikan, mungkin contoh betapa pendekatan ekonomi tidak mampu secara tuntas menjelaskannya.

Analysis PETS mengkaji secara mendalam empat faktor besar pokok terhadap sebuah proposal kebijakan publik, yaitu faktor politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Keempat faktor pokok ini di timbang dan dikaji secara simultan untuk kemudian menghasilkan rekomendasi keputusan yang mungkin dilakukan.

Analisis faktor politik, mengkaji dan mendalami input kebijakan yang menguntungkan secara politik, analisis faktor ekonomi meminjam analisis CBA, mengkaji keuntungan dan kerugian yang akan di hasil kan jika sebuah proposal kebijakan publik diimplementasikan. Dengan bantuan CBA maka analisis PETS akan melengkapi data lebih komprehensif.

Analisis faktor teknologi, merupakan bentuk kemampuan model ini untuk melihat feasibilities dalam implementasi kebijakan. Apakah alat dan implementasi kebijakan tersedia dengan baik, apakah teknologi murah dan gampang dikendalikan.

Analysis's faktor sosial, juga menerapkan secara mendalam faktor-faktor sosial (*social costs*) apakah yang akan ditimbulkan dengan sebuah kebijakan publik. Faktor ini untuk menjawab kelemahan model CBA analysis yaitu bahwa tidak semua hal dapat diukur secara ekonomi. Dampak pariwisata terhadap kerugian sosial, pengikisan nilai-nilai kultural dan sebagainya.

Dalam implementasi di lapangan penulis menjabarkan lagi ke empat faktor utama tersebut menjadi enam faktor yaitu : Politik, Ekonomi, Teknologi/ teknis, Sosial ditambah Administrasi dan Hukum. Dari kriteria- kriteria ini akan dinilai dan ditentukan oleh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Tabanan, apakah input rumusan kebijakan ini layak untuk dilaksanakan.

(3). *Policy Adoption*.

Pada tahap ini, ditentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholder*. Tahap ini ditentukan setelah melalui proses rekomendasi, menurut Effendi (dalam Fitriani 2001:16), langkah rekomendasi meliputi :

- a. Pengidentifikasian alternatif-alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan yang merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

- b. Pengidentifikasi kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan
- c. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan ditimbulkan.

Dalam adopsi kebijakan diperlukan rekomendasi untuk membantu mengestimasi tingkat resiko dan ke tidak pastian, mengenai eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dipakai acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan yang telah ada. Penelitian yang relevan dalam tulisan ini adalah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat Provinsi di Bali. Dari hasil penelitian analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka dapat direkomendasikan suatu kebijakan.

(4). Policy Implementation

Implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur

cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diseleksi.

Berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan perlu kiranya dipantau agar patuh dari kebijakan yang ditetapkan. Pemantauan ini dilaksanakan dalam implementasi kebijakan agar dapat mengetahui hambatan-hambatan dan rintangan yang di hadapi dalam implementasi kebijakan dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap implementasi kebijakan.

(5). *Policy Assessment*

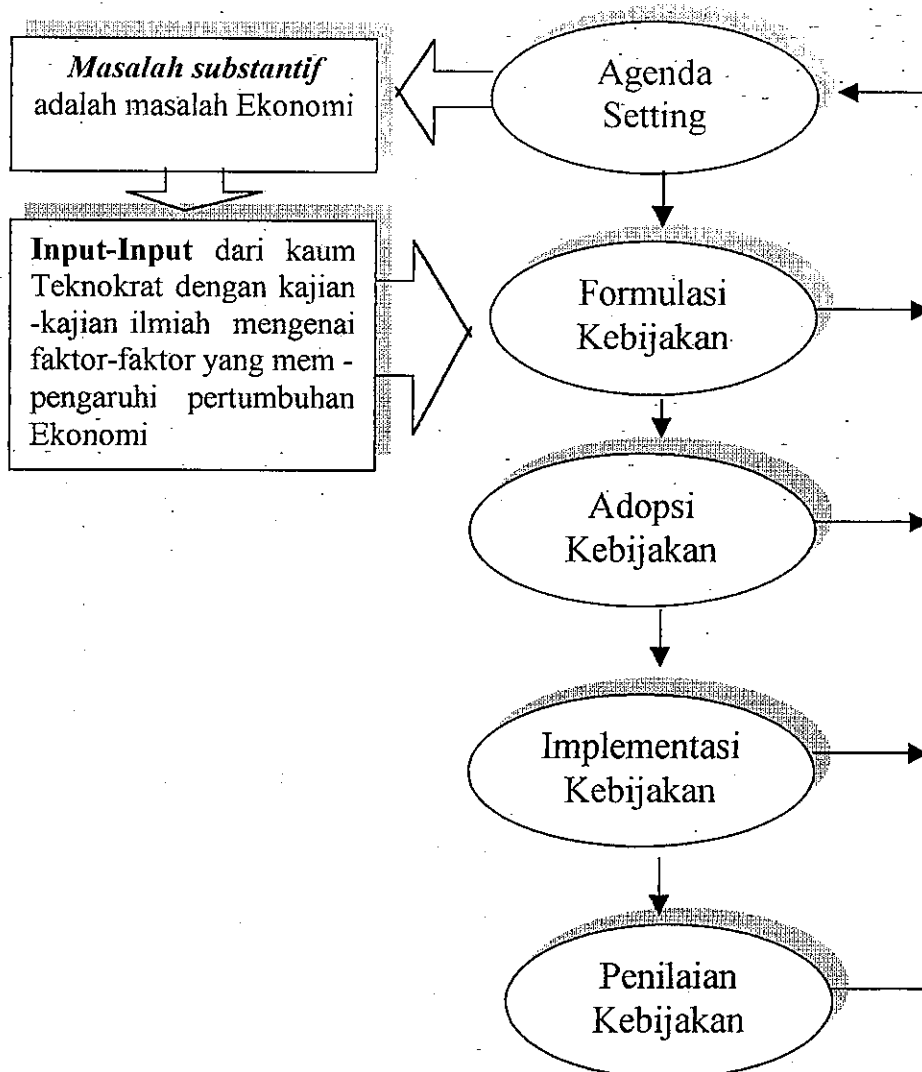
Pada tahap ini yang merupakan tahap terakhir dari tahap pembuatan kebijakan publik , dilakukan penilaian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap evaluasi diterapkan. Evaluasi kebijakan menurut Wibawa et.al. (1994:9-10) dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan.

Pengukuran evaluasi kebijakan secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu indikator input, proses, outputs dan outcomes (Brigman & Davis 2000, dalam Badjuri & Teguh Yuwono, 2002:138).

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada indikator input dengan penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan –bahan

dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang dan infra struktur pendukung lainnya.

Selain pada proses input kebijakan yang dievaluasi, juga dilakukan pada akhir waktu suatu kebijakan, misalnya satu tahun atau lima tahun, pada saat kebijakan itu berakhir maka dievaluasi tujuannya yaitu apakah kebijakan itu sesuai dengan target yang diharapkan misalnya pertumbuhan ekonomi mencapai 5% atau terjadi ketidaksesuaian dari target yang diterapkan, dan juga sejauh mana masalah yang ditangani itu dapat dipecahkan. Dari pemaparan di atas maka penulis akan mengilustrasikan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuat kebijakan seperti dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. : Ilustrasi di atas semua mengacu pada materi kebijakan pertumbuhan Ekonomi

Sumber : William N. Dunn, 1998 : 25 dan Fadilah Putra, 2001:53

B. Pembahasan penelitian yang relevan

Surya Atmaja, (2001:39) yang meneliti tentang " Pengaruh Sektor Publik, Investasi Swasta, dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan regional Kabupaten/Kota di Povinsi Bali. Dalam

penelitannya Surya Atmaja menggunakan metode alat analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel, variabel yang digunakan adalah penyediaan tenaga kerja (*Labor supply growth*), investasi swasta, konsumsi pemerintah, *revenue effort* dan variabel pengeluaran pembangunan. Hasil penelitian tersebut antara lain disimpulkan bahwa variabel investasi swasta, pengeluaran pembangunan pemerintah, pengeluaran rutin pemerintah, pajak signifikan secara statistik, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hakim (2001) meneliti " Peranan Investasi Swasta, Investasi Publik dan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 26 Provinsi, di Indonesia " Dalam penelitian Hakim yaitu Pengaruh Investasi Swasta dan Pemerintah serta Jumlah Penduduk di 26 propinsi di Indonesia dari tahun 1988 – 1999 dengan menggunakan pertumbuhan Solow, yang disimpulkan bahwa investasi swasta dan investasi publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel, lokasi dan data time series , penelitian ini menggunakan variabel tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dengan ruang lingkup Kabupaten Tabanan dari tahun 1990- 2001, investasi swasta, investasi

pemerintah, pertumbuhan penduduk, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah dan ekspor daerah sebagai variabel bebas (*independent variable*).

Dengan model sebagai berikut :

$$GRW = F (PIY, Pop, GIY, GY, RY, XY)$$

di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen (%).

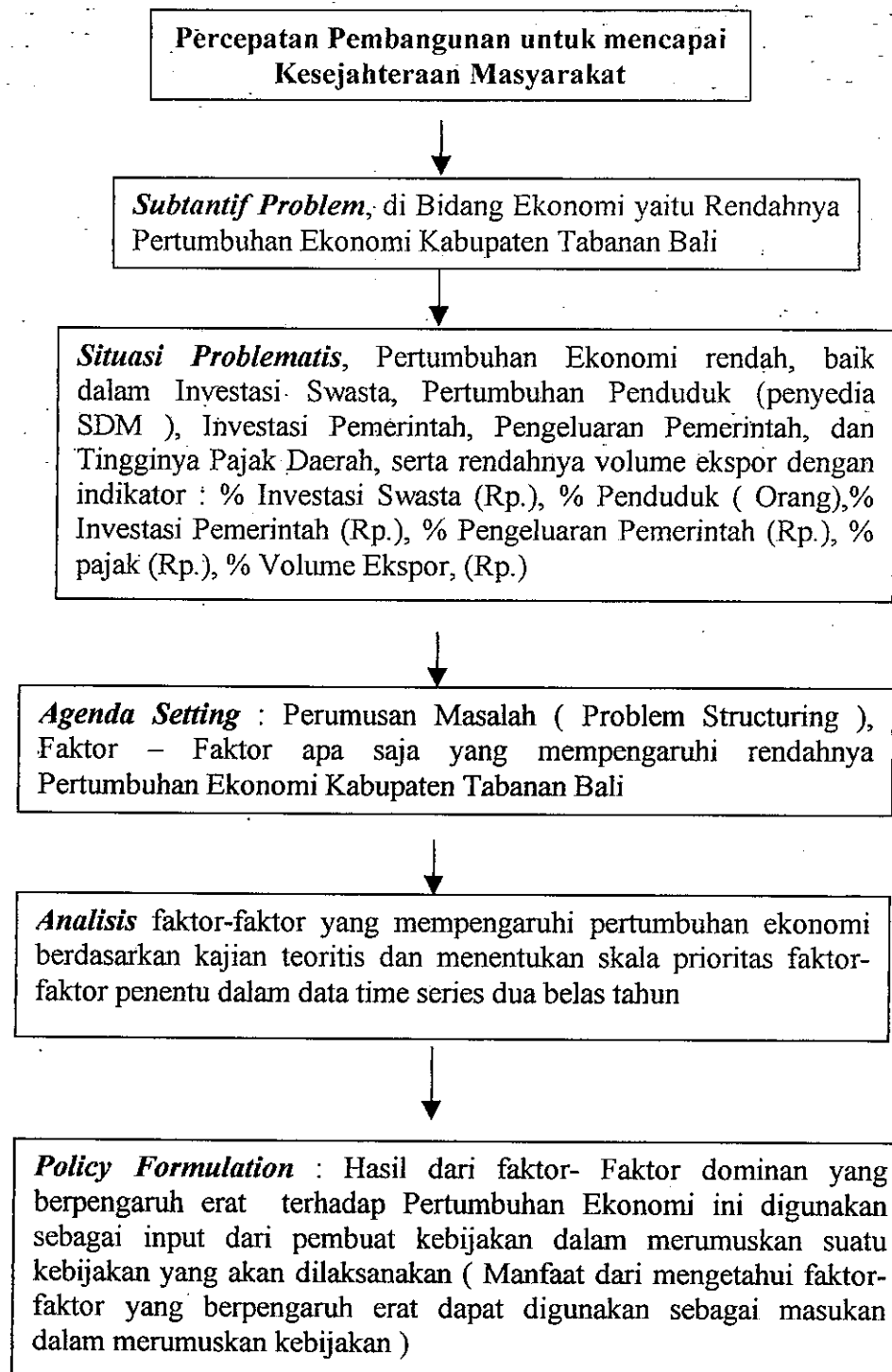
GIY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB dalam satuan persen (%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutin pemerintah dengan PDRB dalam satuan (%).

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

XY adalah rasio volume Ekspor Daerah terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

Guna lebih memudahkan dalam pemahaman konsep penelitian ini , maka studi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan dapat dilihat dalam kerangka berpikir seperti terlihat pada Gambar 3 berikut ini :



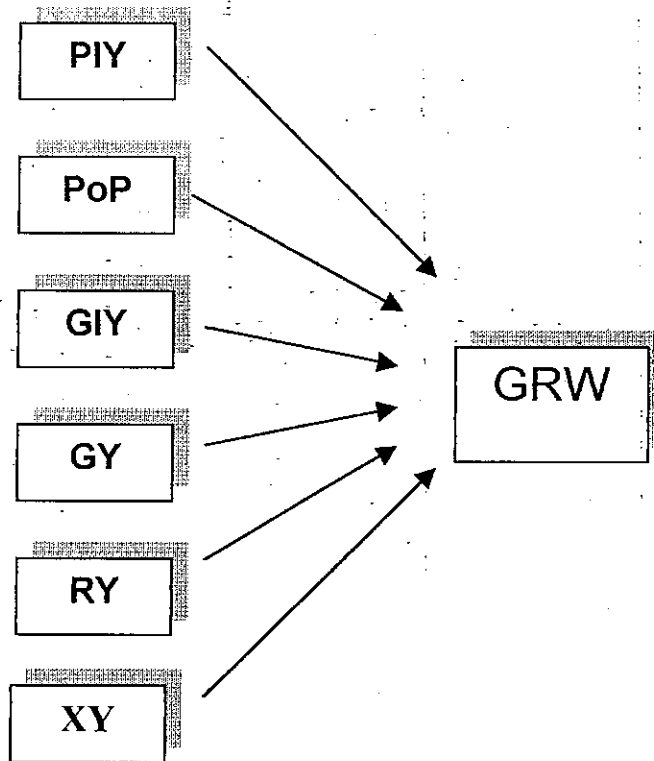
Gambar 3. Kerangka Berfikir Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai input dari perumusan kebijakan publik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali.

C. Hipotesis

Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. " Peningkatan rasio investasi swasta terhadap PDRB (PIY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tabanan".
2. "Peningkatan pertumbuhan penduduk (PoP) akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan".
3. "Peningkatan rasio investasi pemerintah terhadap PDRB (GIY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tabanan".
4. "Peningkatan rasio konsumsi pemerintah terhadap PDRB (GY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan .
5. "Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB (RY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali
6. "Peningkatan volume Ekspor Daerah terhadap PDRB (XY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan .

Model Geometriknya Sebagai Berikut :



Keterangan :

PDRB (GRW), Rasio Investasi swasta dengan PDRB tahun sebelumnya (PIY), Pertumbuhan penduduk (PoP), Rasio Investasi pemerintah daerah dengan PDRB tahun sebelumnya (GIY), Rasio pengeluaran konsumsi pemerintah dengan PDRB tahun sebelumnya (GY), Rasio Pajak daerah dengan PDRB tahun sebelumnya (RY), Rasio Ekspor dengan PDRB tahun sebelumnya (XY).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian / Fenomena yang diamati

Rancangan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu yaitu :

Pendekatan Time Series merupakan penelitian antar waktu yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan kurun waktu 1990-2001. Penelitian dimaksudkan untuk mengeksplanasi dan klarifikasi mengenai suatu phenomena atau kenyataan sosial (Singarimbun dan Effendi, 1989:9).. Unit analisisnya adalah data PDRB (*dependent variabel*), investasi swasta, pertumbuhan penduduk, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah , penerimaan pemerintah , ekspor daerah (*independent Variabel*) kurun waktu 1990-2001.

Selanjutnya untuk mengkaji dan merumuskan alternatif kebijakan dari faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digunakan *Pendekatan PETS Analysis*, penyelidikan ini tertuju pada input rumusan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Teknik Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak semua hal yang di hitung

untung ruginya secara ekonomis/kuantitatif. Lebih jauh lagi tidak semua hal dapat dilihat, dan dimotivasi oleh semata mata motif ekonomi. Dalam penelitian ini adapun faktor penentu yang telah diperoleh dari hasil perhitungan statistik selanjutnya akan dievaluasi lagi dengan para *stakeholder* sebagai nara sumber, guna mendapatkan input rumusan kebijakan yang komprehensif, tepat dan dapat dilaksanakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali

B. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Cakupan penelitian ini menggunakan variabel tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) dengan ruang lingkup Kabupaten Tabanan Bali dari tahun 1990- 2001 adalah, investasi swasta, pertumbuhan penduduk, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah, ekspor daerah sebagai variabel bebas (*independent variabel*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Tabanan Bali. Secara administratif, Kabupaten Tabanan Bali terdiri dari delapan Kecamatan, dengan jumlah penduduk 382.877 jiwa. Secara geografis Kabupaten Tabanan Bali terbagi dua bagian yaitu : Tabanan utara dengan dataran

tinggi dan kurang landai dan Tabanan selatan dengan dataran rendah yang landai.

Penelitian dilakukan di Kantor Bappeda untuk mendapatkan data PDRB investasi swasta, Kantor Biro pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data pertumbuhan penduduk, Dinas Perdagangan untuk dapat mendapatkan data ekspor, dan Sekretariat Daerah untuk mendapatkan data investasi pemerintah , pengeluaran rutin dan Dispenda untuk mendapatkan penerimaan daerah dari pajak.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena data yang diperlukan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan berada pada instansi-instansi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan secara langsung menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis dalam hal formulasi kebijakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan.

D. Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati

1. Klasifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak enam variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel tak bebas (*dependent variable*). Pilihan terhadap enam variabel bebas didasarkan dengan melihat variabel yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dengan prinsip dapat mewakili sektor publik dalam pertumbuhan ekonomi. Variabel sektor publik yang

dimaksud adalah investasi pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pendapatan daerah , serta sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan.

2. Definisi Konsep

Variabel yang akan dianalisis meliputi variabel-variabel yang dipilih dengan pengertian dasar atau konsep operasional sebagai berikut :

- a. PDRB, adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta melalui penanaman modal.
- c. Penduduk, adalah seluruh jumlah penduduk dalam suatu daerah pada tahun tertentu.
- d. Investasi pemerintah daerah, adalah pengeluaran pemerintah di mana pemerintah tidak secara langsung menerima balas jasanya melainkan diterima pada jangka waktu yang mendatang .
- e. Pengeluaran konsumsi pemerintah, adalah peningkatan pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya.

- f. Pajak daerah, adalah uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah di mana penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung.
- g. Ekspor, adalah penjualan barang ke luar negeri, yang dinyatakan dengan nilai rupiah pada tahun tertentu.

3. Operasional Variabel

- a. Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Tabanan berdasarkan harga konstan dari tahun 1990 - 2001.
- b. Realisasi investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta melalui penanaman modal dalam bentuk pembentukan modal domestik bruto, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah, dengan nilai konstan tahun 1990 - 2001.
- c. Seluruh penduduk dalam berbagai tingkat umur yang dinyatakan dalam satuan orang tahun 1990 - 2001.
- d. Realisasi pengeluaran pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Tabanan, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah dalam harga konstan tahun 1990 - 2001.

- e. Realisasi pengeluaran rutin yang tercantum dalam APBD Kabupaten Tabanan, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah, dalam nilai konstan tahun 1990 - 2001.
- f. Realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak warisan, pajak penjualan yang dinyatakan dalam rupiah dengan harga konstan yang terhimpun dalam PAD Kabupaten Tabanan tahun 1990 - 2001.
- g. Realisasi penjualan barang ke luar negeri (ekspor) Kabupaten Tabanan yang dinyatakan dengan satuan nilai rupiah tahun 1990 - 2001.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data PDRB, investasi swasta, jumlah penduduk, investasi pemerintah, pengeluaran rutin pemerintah, pajak daerah dan ekspor barang , yang mana sumber data sekunder diperoleh dari instansi-instansi pemerintah seperti Bappeda , Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) , Dinas Perdagangan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Data primer hasil wawancara dengan para *stakeholder* (Sekretaris Daerah Kab. Tabanan, Ketua Bappeda, Kadis

Pendapatan Daerah, Kadis Perindag, Kabag Keuangan), guna memperoleh masukan dalam merumuskan kebijakan yang layak dan dapat dilaksanakan di bidang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan.

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dengan Telaah dokumentasi dari instansi terkait yang menjadi sumber data. Seperti Telaah data PDRB yang dihimpun dari Kantor Bappeda Kabupaten Tabanan , data Pengeluaran Rutin dan Pembangunan dihimpun dari Sekretariat Daerah, data pendapat asli daerah yang diperoleh dari penarikan pajak dihimpun dari Dinas Pendapatan Daerah, data volume ekspor yang diperoleh dari Dinas Perdagangan serta data jumlah penduduk yang diperoleh dari BPS.

Data-data ini telah dipublikasikan dan telah banyak peneliti menggunakan data-data yang bersumber dari instansi-instansi di atas, sehingga reabilitas dan validitas data bisa diandalkan.

Sedangkan untuk memperoleh data primernya digunakan pedoman wawancara. Dengan pedoman wawancara ini diharapkan dapat mendapatkan keterangan yang akurat dari subyek penelitian.

G. Obyek Kajian

Dalam penelitian *time series* / antar waktu peneliti kesulitan untuk meneliti semua yang ada pada rentang waktu tersebut, karena keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya, maka digunakan teknik peramalan. Metode *time series* mempunyai asumsi dasar bahwa beberapa faktor yang telah mempengaruhi pola dari sekelompok data pada saat ini dan pada masa yang lalu akan berpengaruh juga, dengan kurang lebih sama, pada masa yang akan datang (Abdul hakim : 2001: 312).

Cara pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling* (Sugiyono, 1999:63) adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan *time series* dua belas tahun (1990 – 2001), sehingga relevan dengan desain penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data PDRB, investasi swasta, investasi pemerintah, jumlah penduduk, pengeluaran rutin pemerintah, pajak daerah dan volume ekspor .

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data menurut Nazir (1988:15) adalah suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini

untuk menghimpun data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan data primer.

Adapun data sekunder diperoleh dengan cara penelaahan dokumen seperti : PDRB, investasi swasta, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan pembangunan rutin, pajak daerah dan volume ekspor, Bali dalam angka 2000, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, makalah-makalah, tulisan ilmiah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primernya diperoleh dengan cara melalui wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) langsung dengan *stakeholder* yang terlibat dalam perumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi.

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Regresi Berganda, regresi ini merupakan teknik statistik yang secara simultan meneliti pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh secara parsial dan simultan variabel independen yaitu : Investasi swasta, pertumbuhan penduduk, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi .

Model yang digunakan dalam analisis ini adalah :

$$GRW = F (PIY, PoP, GIY, GY, RY, XY)$$

Di mana :

Rasio Investasi swasta terhadap PDRB (PIY), dihitung dengan membagi jumlah investasi swasta dengan jumlah PDRB tahun sebelumnya.

$$PIY = \frac{\text{Investasi swasta}}{PDRB (t-1)} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.1)$$

Di mana investasi swasta diproksi dengan pembentukan modal tetap domestik bruto. Pertumbuhan penduduk (Pop) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Suseno,1990, 36-42).

$$Pop = \frac{Pop (t) - Pop}{Pop (t-1)} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.2)$$

Pertumbuhan penduduk adalah jumlah penduduk tahun t dikurangi jumlah penduduk pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya. Rasio Investasi pemerintah terhadap Produk domestik regional Bruto (GIY), dihitung dengan membagi investasi pemerintah dengan PDRB tahun sebelumnya.

$$GIY = \frac{\text{Investasi Pemerintah}}{PDRB (t-1)} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.3)$$

Investasi pemerintah diproksi dengan jumlah realisasi pembangunan Kabupaten Tabanan di bagi dengan PDRB tahun sebelumnya. Rasio Konsumsi pemerintah terhadap PDRB (GY), dihitung dengan membagi penerimaan pajak daerah dengan PDRB tahun sebelumnya.

$$GIY = \frac{\text{Konsumsi Pemerintah}}{\text{PDRB (t-1)}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.5)$$

Rasio penerimaan pemerintah terhadap PDRB (RY), dihitung dengan membagi penerimaan pajak daerah dengan PDRB tahun sebelumnya.

$$RY = \frac{\text{Pajak}}{\text{PDRB (t-1)}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.6)$$

Rasio ekspor daerah terhadap PDRB (XY), dihitung dengan membagi penerimaan ekspor daerah dengan PDRB tahun sebelumnya.

$$XY = \frac{\text{Ekspor}}{\text{PDRB (t-1)}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.7)$$

Model pertumbuhan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB sebagai berikut :

$$GRW = \frac{\text{PDRB(t)} - \text{PDRB(t-1)}}{\text{PDRB (t-1)}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3.8)$$

Di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan PDRB

PDRB (t) adalah Produk Domestik Regional Bruto tahun t

PDRB (t-1) adalah Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

Dengan persamaannya regresi linier berganda sebagai berikut

(Abdul Hakim, 2001: 267) :

$$Y = \beta_0 + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + \beta x_4 + \beta x_5 + \beta x_6 + \epsilon_i \dots\dots\dots (3.9)$$

Keterangan :

Y adalah pertumbuhan PDRB riil dalam satuan (%)

X₁ adalah rasio antara investasi swasta dengan PRDB riil tahun sebelumnya

X₂ Pertumbuhan penduduk

X₃ adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PRDB riil tahun sebelumnya

X₄ adalah rasio antara konsumsi pemerintah dengan PRDB riil tahun sebelumnya

X₅ adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak daerah dengan PRDB riil tahun sebelumnya

X₆ adalah rasio volume ekspor daerah dengan PDRB tahun riil tahun sebelumnya

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ adalah merupakan koefisien regresi yang akan di tafsir.

ϵ_i adalah error term.

Hasil regresi dari model di atas, selanjutnya diuji secara statistik meliputi uji signifikansi parsial, Uji signifikansi secara bersama sama dan uji koefisien Determinasi.

Uji signifikansi parsial. Dilakukan dengan cara membandingkan p-value dengan derajat kesalahan (α) = 5%

Dan Hipotesis yang digunakan adalah

$H_0 : b_0 = 0, b_1 = 0, b_2 = 0, b_3 = 0, b_4 = 0, b_5 = 0, b_6 = 0$

$H_1 : b_0 > 0, b_1 > 0, b_2 > 0, b_3 > 0, b_4 > 0, b_5 > 0, b_6 > 0$

Uji Signifikansi bersama-sama. Dilakukan dengan membandingkan p-value atau probabilitas (F-statistik) dengan derajat kesalahan (α) = 5%

Uji koefisien determinasi (R^2). Menunjukkan seberapa besar proporsi variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel tak bebas.

2. PETS Analysis

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan PETS Analysis (*Political, Economic, Technological, and Social*

Analysis) yang dimodifikasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana mendapatkan alternatif formulasi kebijakan, tepat dan dapat dilaksanakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Metode ini mengacu pada kriteria standar dan disamakan *equivalent alternative method* (Effendi dalam Fitriani, 2001: 44), kemudian dilakukan scoring. Faktor- faktor dominan yang memiliki skor tertinggi akan dipilih dan direkomendasikan sebagai input *Policy Formulation* .

Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert (Cooper dan Emory, 1999:194) yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan kebijakan publik pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = Tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = Kurang dapat diterapkan

Nilai skor 3 = Cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = Dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan, dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyeleksi dari faktor – faktor dominan dalam upaya mendapat formulasi kebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Ekonomis dan finansial, yaitu menyangkut keuntungan dari segi ekonomi kalau rumusan kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi itu diterapkan.
2. Teknis, menyangkut pertimbangan apakah rumusan kebijakan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut mungkin dilaksanakan di lapangan secara teknis.
3. Administrasi, yaitu apakah rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan, perencanaan, prosedur dan aturan yang ditetapkan.
4. Hukum / Legalitas, yaitu apakah alternatif rumusan kebijakan terpilih tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak.
5. Sosial, yaitu apakah rumusan kebijakan terpilih tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat.
6. Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap rumusan kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya.

Alasan penulis memakai kriteria-kriteria di atas adalah karena rumusan pertumbuhan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti : hukum, politik, administrasi, sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembobotan kriteria diberikan pembobotan yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Geografis dan Administrasi

Secara geografis Kabupaten Tabanan terletak antara 8° 14' 30" - 8° 30' 07" Lintang Selatan dan 114° 54' 52" - 115° 12' 57" Bujur Timur, dengan Ibukota nya adalah Kota Tabanan. Secara administratif Kabupaten Tabanan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Badung
- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tabanan 83,933 Ha atau sekitar 14,90 % dari daratan Pulau Bali (55.632,85 Km²) dan terbagi atas 8 wilayah kecamatan, 113 Desa/ Kelurahan, 729 Dusun/ lingkungan. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.10 tentang Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 4.10.
Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabanan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Kel.	Jumlah Lingk.	Jumlah Desa Adat	Jumlah Banjar Adat
1. Selemadeg	22.689	23	190	-	-	103	190
2. Kerambitan	4.239	14	67	1	6	24	73
3. Tabanan	5.140	5	40	6	34	10	74
4. Kediri	5.360	12	63	3	26	21	89
5. Marga	4.479	12	64	-	-	27	63
6. Baturiti	9.917	12	60	-	-	50	-
7. Penebel	14.198	15	125	-	-	67	125
8. Pupuan	14.902	10	54	-	-	24	54
Jumlah	83.993	103	663	10	66	326	810

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000

2. Topografi

Topografi Kabupaten Tabanan memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sebelah utara merupakan daerah yang bergelombang, sedangkan daerah selatan relatif datar wilayahnya berada pada ketinggian 0 – 2.276 m. Penggunaan lahan saat ini di Kabupaten Tabanan memperlihatkan bahwa sebagian besar masih merupakan wilayah yang didominasi areal tidak terbangun berupa areal pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11.
Pembagian Wilayah Menurut Keadaan Topologi di Kabupaten Tabanan

Bentuk Wilayah	Kemiringan (%)	Ketinggian DPL (m)	Penggunaan Lahan	Penyebaran
1. Datar	0 – 3	< 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman pangan • Pemukiman, dll. 	Daerah pantai, dataran alluvial
2. Berombak	3 – 12	5 – 30	<ul style="list-style-type: none"> • Padi sawah 	Kec. Tabanan, Kediri, Marga & Kerambitan
3. Berbukit	12 – 40	30 – 50	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi, cengkeh, coklat, kelapa, dll. 	Kec. Selemadeg, Baturiti & Penebel
4. Bergabung	> 40	> 50	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman perkebunan dan hutan 	Kec. Pupuan, Selemadeg & Baturiti

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000

3. Jenis Tanah

Secara umum keadaan tanah di Kabupaten Tabanan dengan mengacu pada data tanah dari laporan Tinjau (An Explanatory Text to the Reconnaissance Soil Map of Bali, 1970), yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor, dijumpai lima jenis tanah utama :

a. Regosol Coklat Kekelabuan

Tanah ini terbentuk dari dua dahan induk yaitu Marin yang terdapat di sepanjang pantai dan dari bahan induk gunung berapi intermedier yang terdapat di Kecamatan Pupuan.

b. Regosol Kelabu

Tanah ini terbentuk dari dua bahan induk abu vulkanik intermedier, fisiografi vulkanik, bentuk wilayah bergunung, kedalaman tanah

dalam sedang dan drainase agak cepat. Jenis tanah ini terdapat di daerah pegunungan di Kecamatan Pupuan, Penebel dan Baturiti.

c. Andosol Coklat Keabuan

Tanah ini terbentuk dari abu dan tuf vulkanik intermedier, drainase tanah baik, menempati punggung/ puncak-puncak berapi terdapat di Kabupaten Tabanan bagian Utara.

d. Latosol Coklat Kekuningan

Tanah ini hampir mendominasi seluruh Kabupaten Tabanan, menempati fisiografi dataran vulkanik, dan lereng bawah/ tengah tanah terbentuk dari bahan induk abu dan tufa vulkan intermedier, drainase baik – agak terhambat.

e. Litosol

Tanah ini merupakan asosiasi dengan Litosol coklat menempati fisiografi vulkan. Kedalaman tanah dangkal sampai sedang (25 – 50 cm). Drainase agak cepat sampai baik.

4. Iklim

Wilayah Kabupaten Tabanan beriklim laut tropis, suhu rata-rata mencapai 27° C dengan suhu terendah 24° C dan suhu tertinggi 30° C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 74 – 77%. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.155 – 3.292 mm.

5. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan lahan/ tanah di Kabupaten Tabanan pada tahun 1997 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Permukiman

Permukiman yang dimaksud adalah keseluruhan sumberdaya lahan terbangun secara fisik yang digunakan untuk perumahan penduduk, jasa perdagangan, jasa pemerintahan, jasa pendidikan dan sebagainya. Pada akhir tahun 1997 tercatat 5.230 ha, atau 6,23 % dari total luas Kabupaten Tabanan. Penyebarannya cenderung berkembang pada lahan yang relatif subur dan datar.

b. Sawah

Sawah yang dimaksud adalah budidaya tanaman padi dan atau tanaman pangan semusim lainnya dengan dicirikan adanya pemanfaatan air irigasi. Pada akhir tahun 1997 Kabupaten Tabanan mempunyai luas sawah seluas 23.836 Ha (28,39% dari luas Kabupaten Tabanan) yang tersebar di Kecamatan Selemadeg seluas 6.063 Ha (25,39%), Kecamatan Penebel 18,59%, Kecamatan Kediri 13,10%, Kecamatan Kerambitan 10,94%, Kecamatan Marga 9,89%, Kecamatan Tabanan 8,96%, Kecamatan Baturiti 8,19% dan Kecamatan Pupuan 4,93%.

c. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman pangan semusim dan atau tanaman tahunan yang dicirikan dalam pengelolaannya relatif tidak memerlukan irigasi seperti sawah. Termasuk ke dalam golongan ini adalah tegalan, kebun sayur, tanaman pekarangan dan kebun campuran. Luas lahan kering ini adalah 12.276 Ha (14,59% dari total luas Kabupaten Tabanan).

d. Perkebunan

Perkebunan yang dimaksud adalah keseluruhan lahan yang dibudidayakan untuk tanaman perkebunan rakyat maupun oleh perusahaan (pemerintah/ swasta) berupa perkebunan besar. Pada akhir tahun 1997 tercatat seluas 24.682 Ha (29,4% dari luas kabupaten) yang terdiri dari lahan perkebunan Perusahaan Daerah Dharma Santika dan perkebunan rakyat.

e. Perikanan

Perikanan adalah keseluruhan lahan yang secara jelas dibudidayakan untuk perikanan, baik berupa tambak maupun kolam air tawar. Luas lahan yang dipergunakan adalah 33 Ha (0,04% dari luas Kabupaten).

f. Areal Berhutan

Areal Berhutan yang dimaksud adalah keseluruhan lahan yang ditumbuhi oleh tanaman hutan, baik terletak di kawasan hutan

maupun di luar kawasan hutan. Luas areal Berhutan di Kabupaten Tabanan adalah seluas 13.734 Ha (16,36% dari luas kabupaten) yang terdiri dari hutan negara 10.159,95 Ha dan hutan rakyat 3.574 Ha.

g. Lain-lain

Keseluruhan lahan yang terdiri dari jalan, sungai, kanal, saluran irigasi, kuburan dan lahan yang telah disebutkan. Pada akhir tahun 1997 tercatat seluas 4.142 Ha (4,93% dari luas kabupaten).

6. Jaringan Transportasi/ Perhubungan

Jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tabanan adalah transportasi darat yang menggunakan jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tabanan terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 71,84 Km. Jalan Propinsi sepanjang 112,74 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 568,55 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.12.
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan.

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)			Jumlah
		Negara	Propinsi	Kabupaten	
1	Jenis Permukaan				
	a. Aspal	71,84	112,74	437,8	622,38
	b. Kerikil			1,6	1,6
	c. Tanah			28,35	28,35
	d. Tidak dirinci			100,8	100,8
2	Kondisi Jalan				
	a. Baik	44,28	76,35	197,75	318,38
	b. Sedang	12,86	24,09	157,5	194,45
	c. Rusak	14,7	12,3	174,15	201,15
	d. Rusak Berat			39,15	39,15
	Panjang Jalan (Km)	71,84	112,74	568,55	753,13

Sumber : Tabanan Dalam Angka, 1999

Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor, merupakan sarana yang paling banyak diminati dan digunakan, yang terus mengalami peningkatan.

7. Perindustrian

Kelompok/ jenis industri yang berkembang di Kabupaten Tabanan terdiri atas industri makanan dan minuman. Industri tekstil, industri kayu, industri barang galian bukan logam, industri kecil lainnya. Seperti dapat dilihat pada tabel 4. 13

Tabel 4.13.
Banyaknya Perusahaan Industri Besar/ Sedang, Tenaga Kerja dan Nilai
Produksi di Kabupaten Tabanan Menurut Kelompok/ Jenis Industri
Tahun 1998

No.	Kelompok/ Jenis Industri	Industri Besar/ Sedang		Nilai Produksi (Rp. 000)	%
		Jumlah Unit	Tenaga Kerja		
1	Makanan dan Minuman	5	295	53.167.866	47,60
2	Tekstil	13	868	35.192.353	31,50
3	Kayu	6	739	12.317.121	11,03
4	Kertas	-	-	-	0,00
5	Kimia	-	-	-	0,00
6	Barang Galian Bukan Logam	8	252	2.978.868	2,67
7	Logam Besar	-	-	-	0,00
8	Barang dari Logam	8	730	6.115.017	5,47
9	Lainnya	2	132	1.918.940	1,72
	Jumlah 1998	42	3.016	111.690.168	100,00
	1997	37	2.313	42.287.620	
	1996	36	2.079	27.529	
	Pertumbuhan Rata-Rata	5,93	12,62	35,92	

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 1999

Perkembangan jumlah unit kegiatan usaha industri besar/ sedang dari tahun 1995/ 1997 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 5,93% per tahun. Daya serap tenaga kerja selama 2 tahun dari tahun 1995 – 1997 naik rata-rata 12,62% per tahun atau rata-rata 245 orang per tahun.

8. Perdagangan dan Jasa

Sesuai dengan rencana struktur tata ruang, kegiatan perdagangan yang akan dikembangkan adalah perdagangan kota, perdagangan wilayah dan perdagangan lingkungan. Kegiatan perdagangan kota memanfaatkan fasilitas yang sudah ada saat ini, sehingga tidak diperlukan tambahan lahan baru. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4. 14.

Tabel 4.14.
Prasarana Perdagangan di Kabupaten Tabanan
Tahun 1997

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Jumlah Pedagang
1	Kecamatan Tabanan	1.65	1.467
	Pasar Tabanan I	0.79	749
	Pasar Tabanan II	0.39	156
	Pasar Dauh Pala	0.47	562
2	Kecamatan Kediri	0.84	842
	Pasar Kediri	0.5	604
	Pasar Tanah Lot	0.29	238
3	Kecamatan Marga	0.12	65
	Pasar Marga	0.12	65
4	Kecamatan Baturiti	0.28	253
	Pasar Merta Sari	0.15	142
	Pasar Baturiti	0.13	111
5	Kecamatan Pupuan	0.20	175
	Pasar Pupuan	0.20	175
6	Kecamatan Selemadeg	0.23	268
	Pasar Bajra	0.23	268
7	Kecamatan Kerambitan	0.08	75
	Pasar Kerambitan	0.08	75
8	Kecamatan Penebel	0.26	195
	Pasar Penebel	0.10	78
	Pasar Senganan	0.16	117
	Jumlah	3.66	3.340

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 1999

Fasilitas ekonomi/ jasa yang ada di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 4. 15 berikut ini.

Tabel 4.15.
Jumlah Fasilitas Ekonomi/ Jasa di Kabupaten Tabanan Tahun 1997

No.	Kecamatan	Hotel		Rumah Makan/ Restoran	Bank	Pertokoan	Pasar
		Bintang	Melati				
1	Selemadeg	-	3	-	8	847	1
2	Kerambitan	-	3	1	6	762	1
3	Tabanan	-	8	3	11	708	5
4	Kediri	1	2	2	11	836	3
5	Marga	-	-	-	1	403	1
6	Baturiti	1	15	14	3	132	2
7	Penebel	-	3	1	6	187	2
8	Pupuan	-	1	-	3	312	1
	Jumlah	2	27	2	49	4.187	16

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 1999

9. Fasilitas Rekreasi dan Obyek Wisata

Fasilitas tempat rekreasi/ obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabanan baik yang belum, sedang dan sudah berkembang dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16.
Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan Tahun 1997

No.	Uraian	Wisata Alam	Wisata Budaya
1	Obyek yang sudah berkembang	1. Bedugul 2. Kebun Raya Eka Karya 3. Jatiluh 4. Alas Kedaton	1. Tanah Lot 2. Ulun Danu Beratan 3. TPB Margarana 4. Puri Gede Kerambitan 5. Puri Anyar Kerambitan
2	Obyek yang sedang berkembang	5. Pantai Yeh Gangga 6. Pantai Kelating 7. Pantai Soka	6. Musium Subak 7. Pura Batukaru 8. Sanggar Tari Wranatala
3	Obyek yang belum berkembang	8. Air Panas Belulang 9. Air Panas Pujungan 10. Air Panas Angsri 11. Taman Kupu-kupu Lestari 12. Air Panas Penatahan 13. Pantai Pasut 14. Pantai Suraberata 15. Sarinbuana Wanagiri 16. Hutan Mekori	
		17.	

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 1999

B. HASIL PENELITIAN

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan Laju Pertumbuhan dan Struktur ekonomi dicerminkan oleh perkembangan angka PDRB daerah yang bersangkutan dan sektor-sektor yang membentuk PDRB itu sendiri.

Besarnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan pada tahun tertentu merupakan laju pertumbuhan rata-rata tertimbang nilai tambah bruto dari ke sembilan sektor/ lapangan usaha dalam tahun tersebut. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan secara keseluruhan kurun waktu 1990 -2001 mencapai 4,90 % menurut PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan dari ketiga sektor dominan pembentuk PDRB atas harga konstan diantaranya sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sedangkan laju PDRB atas dasar harga berlaku tahun 1997 adalah 16,63 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan

No.	Tahun	PDRB (Rp. 000.000)			
		Menurut Harga Berlaku	LP (%)	Menurut Harga Konstan	LP (%)
1	1990	313601,19	14,79	162148,10	7,5
2	1991	358792,33	14,41	174165,67	7,4
3	1992	404983,38	12,87	189767,24	8,9
4	1993	475922,38	17,52	205500,04	8,2
5	1994	643.703,95	35,52	610336,40	6,1
6	1995	708.272,11	10,03	653384,89	7,1
7	1996	800.484,14	13,02	700796,19	7,2
8	1997	891.360,53	11,35	735256,61	4,9
9	1998	1.259.888,32	41,34	706115,00	-3,9
10	1999	1331261,49	5,67	710217,53	0,5
11	2000	1465138,51	10,06	727933,83	2,4
12	2001	1656024,67	13,02	746092,06	2,5
Rata-rata Laju Pertumbuhan			16,63		4,90

Sumber : Tabanan dalam Angka, 1990-2002

Sebagai gambaran share persentase tiga sektor dominan (pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan secara berturut-turut dari tahun 1996-1998 masing-masing memberikan andil sebesar 42,77%, 21,73% dan 15,95% dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan atas harga konstan 1993 pada tahun 1998 peranan sektor-sektor tersebut adalah pertanian sebesar 36,70%, sektor jasa-jasa sebesar 21,59% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,12%.

Keterangan senada juga diutarakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan Ir. I.G.G. Subadiwasa, sebagai berikut :

“.. kami melihat sampai saat ini potensi pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan terbesar masih di sumbang dari sektor pertanian, ya sebagai saudara ketahui Kabupaten Tabanan merupakan lumbungnya padi Provinsi Bali dan dari potensi andalan di sektor pertanian inilah akan dikembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah petani...”

Secara kuantitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian masih mengalami peningkatan, namun persentase dalam pembentukan PDRB dibanding tahun sebelumnya sektor pertanian mengalami penurunan. Berikut ini disajikan tabel distribusi persentase dari masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Tabanan tahun 1996-1998 atas dasar harga berlaku, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18.

PDRB Kabupaten Tabanan atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Setiap Sektor Tahun 1996 – 1998

No.	Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)			Kontribusi (%)		
		1996	1997	1998	1996	1997	1998
1	Pertanian	286.109,65	313.109,65	538.910,22	35,74	35,13	42,77
2	Pertambangan dan Galian	3.150,82	3.291,36	3.806,18	0,39	0,37	0,30
3	Industri Pengolahan	46.437,04	53.523,81	79.956,12	5,80	6,00	6,35
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.048,32	6.893,80	8.145,05	0,76	0,77	0,65
5	Bangunan	39.475,02	42.552,02	42.031,14	4,93	4,77	3,34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	149.303,02	182.703,28	273.717,78	18,65	20,50	21,73
7	Perangkutan dan Komunikasi	51.647,75	54.659,67	61.759,17	6,45	6,13	4,90
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	48.809,82	54.383,91	50.610,75	6,10	6,10	4,02
9	Jasa-jasa	169.502,70	180.243,03	200.951,91	21,18	20,22	15,95
	PDRB	800.484,14	891.360,53	1.259.888,32	100,00	100,00	100,00

Sumber : Tabanan Dalam Angka, 1999

Sedangkan untuk kontribusi PDRB Kabupaten Tabanan dengan harga konstan pada periode tahun 1996 – 1998 masih di sumbang oleh 3 sektor yang utama yaitu Pertanian, Perdagangan hotel dan restoran dan jasa-jasa, gambaran ini memperlihatkan dari tahun sebelumnya dan tahun ke depan potensi yang akan dikembangkan Kabupaten Tabanan. Berkisar pada 3 sektor unggulan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 4. 19

Tabel 4.19.
PDRB Kabupaten Tabanan atas Dasar Harga Konstan dan Kontribusi
Setiap Sektor Tahun 1996 – 1998

No.	Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)			Kontribusi (%)		
		1996	1997	1998	1996	1997	1998
1	Pertanian	253.981,65	259.428,37	259.139,00	36,24	35,28	36,70
2	Pertambangan dan Galian	2.568,24	2.572,47	2.429,00	0,37	0,35	0,34
3	Industri Pengolahan	37.115,07	39.082,74	37.090,00	5,30	5,32	5,25
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.082,23	4.475,53	4.512,00	0,58	0,61	0,64
5	Bangunan	35.806,19	37.323,06	33.774,00	5,11	5,08	4,78
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	133.530,96	149.216,78	142.037,00	19,05	20,29	20,12
7	Perangkutan dan Komunikasi	40.256,25	41.935,34	40.429,35	5,74	5,70	5,73
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	41.366,91	41.587,00	34.276,84	5,90	5,66	4,85
9	Jasa-jasa	152.061,69	159.635,32	152.424,28	21,70	21,71	21,89
	PDRB	700.769,19	735.256,61	706.111,47	100,00	100,00	100,00

Sumber : Tabanan Dalam Angka, 1999

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, pada tahun 1999 berdasarkan PDRB – Harga konstan, Kabupaten Tabanan merupakan wilayah termasuk ke dalam 3 wilayah yang memiliki laju pertumbuhan

ekonomi terendah di Propinsi Bali, yaitu sebesar 0,58%. Namun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kabupaten Badung (0,57%), dan Kabupaten Bangli (0,46%). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan juga lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali yang sebesar 0,67%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.20

Tabel 4.20.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Per Kabupaten/
Kota di Propinsi Bali Tahun 1999

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kabupaten Jembrana	0,90
2	Kabupaten Tabanan	0,58
3	Kabupaten Badung	0,57
4	Kabupaten Giayar	1,76
5	Kabupaten Klungkung	0,89
6	Kabupaten Bangli	0,46
7	Kabupaten Karangasem	0,71
8	Kabupaten Buleleng	1,08
9	Kota Denpasar	1,44
Propinsi Bali		0,67

Sumber : PDRB Propinsi Bali 1994 – 1999, BPS

Hal ini telah disadari oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan bahkan menurut pendapat beliau:

“...kami di Bappeda telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan kami memerintahkan Kasub.Bid. Pendataan dan Pelaporan untuk membuat suatu formulasi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, langkah tersebut dilakukan secara internal dan eksternal. Langkah eksternal yang dilakukan yaitu mengkaji suatu usulan-usulan baik datangnya dari kalangan akademisi, masyarakat, pengusaha dan kalangan yang berkepentingan dengan tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Tabanan. Mekanisme yang telah dilakukan adalah mempresentasikan usulan-usulan yang bersumber dari kalangan eksternal tersebut, peserta yang kami undang adalah *stakeholder* yang berkompeten mengenai hal tersebut, di sini akan terjadi diskusi yang panjang mengenai usulan-usulan yang disampaikan itu apakah *feasible* atau tidak....”

Secara keseluruhan PDRB Kabupaten Tabanan dibentuk oleh 22 sub sektor, yang merupakan penjabaran dari ke-9 sektor pembentuk PDRB. Laju pertumbuhan dari ke-22 sub sektor tersebut berdasarkan PDRB – Harga Berlaku secara umum menunjukkan nilai laju rata-rata yang cukup tinggi. Terdapat 11 sub sektor dengan laju pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari laju perekonomian Kabupaten Tabanan, meliputi sub sektor hotel (36,64%), sub sektor tanaman perkebunan (27,91%); sub sektor perikanan (25,65%), sub sektor perdagangan besar dan eceran (24,46%), sub sektor industri tanpa migas (23,83%), sub sektor pertanian tanaman pangan (23,79%), sub sektor restoran (19,42%), sub sektor listrik (18,90%) dan sektor air bersih (18,80%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21.
Laju Pertumbuhan Rata-rata Sub Sektor di Kabupaten Tabanan
Tahun 1996 -- 2001

No.	Sub Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Rata-rata (%)
1	Hotel	36,64
2	Tanaman Perkebunan	27,91
3	Perikanan	25,65
4	Perdagangan Besar dan Eceran	24,46
5	Industri tanpa Migas	23,83
6	Tanaman Pangan	23,79
7	Kehutanan	23,04
8	Komunikasi	21,28
9	Restoran	19,42
10	Listrik	18,90
11	Air Bersih	18,80
12	Lembaga Keuangan Lainnya	15,57
13	Jasa Perusahaan	15,38
14	Penggalian	12,42
15	Swasta	12,32
16	Sewa Bangunan	11,84
17	Pengangkutan	10,58
18	Bangunan dan Konstruksi	10,57
19	Peternakan dan Hasil-hasilnya	10,26
20	Pemerintahan Umum	5,54
21	Jasa Penunjang Keuangan	3,75
22	Bank	-37,45
	PDRB	16,28

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2002

Ditinjau menurut kontribusinya di Kabupaten Tabanan terdapat 8 sub sektor yang memiliki tingkat kontribusi di atas rata-rata (4,76%), yaitu sub sektor tanaman pangan (24,35%), sub sektor perdagangan besar dan eceran (12,54%), sub sektor jasa pemerintahan umum (11,27%), sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya (9,33%), sub sektor jasa swasta (8,22%), sub sektor restoran (7,32%), sub sektor industri tanpa migas (5,58%) serta sub sektor pengangkutan (5,54%). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4.22.
Kontribusi Rata-Rata Sub Sektor Terhadap PDRB – Harga Berlaku
Kabupaten Tabanan Tahun 1996 – 2001

No.	Sub Lapangan Usaha	Kontribusi Rata-rata (%)
1	Tanaman Pangan	24,35
2	Perdagangan Besar dan Eceran	12,54
3	Pemerintahan Umum	11,27
4	Peternakan dan Hasil-hasilnya	9,33
5	Swasta	8,22
6	Restoran	7,32
7	Industri tanpa Migas	5,85
8	Pengangkutan	5,54
9	Bangunan dan Konstruksi	4,39
10	Tanaman Perkebunan	4,22
11	Sewa Bangunan	2,65
12	Lembaga Keuangan Lainnya	1,15
13	Bank	0,99
14	Jasa Perusahaan	0,46
15	Listrik	0,37
16	Penggalian	0,35
17	Air Bersih	0,33
18	Perikanan	0,30
19	Komunikasi	0,21
20	Hotel	0,15
21	Jasa Penunjang Keuangan	0,02
22	Kehutanan	0,00
PDRB		100,00
Kontribusi Rata-rata		4,55

Sumber : Bappeda, 2002

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari data time series yang akan diteliti dalam kurun waktu 1990-2001 mengalami dengan rata-rata 4,90 % untuk harga konstan dan 16,16 % untuk harga berlaku.

2. Penanaman Modal Di Kabupaten Tabanan

Iklim investasi swasta di Kabupaten Tabanan sangat kondusif bagi investor, investasi di Kabupaten Tabanan dibentuk oleh modal masyarakat dan modal swasta, modal dari masyarakat dan swasta

umumnya di arahkan ke sektor yang produktif , seperti industri furniture, Jasa rekreasi, industri Garment, Jasa Akomodasi, Peternakan ayam dll. Namun dari sekian banyak macam investasi yang ditanamkan oleh masyarakat maupun swasta, investasi yang cukup besar dari pengamatan penulis ialah investasi CV. Mama & Lion yang bergerak di bidang industri perajutan, pencelupan pencetakan dan penyempurnaan tekstil, dengan realisasi investasi 11,57 milyar, menyerap tenaga kerja sebanyak 153 orang, PT. Multi breeder Adirama Indonesia yang bergerak dalam bidang peternakan ayam, bibit untuk menghasilkan DOC ayam niaga, modal ini dari investor dalam negeri, dengan realisasi investasi 1,084 milyar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 123 orang dan banyak lagi investasi –investasi masyarakat dan swasta yang bergerak dalam bidang kerajinan, pertanian dalam arti luas dsb.

Iklim investasi yang kondusif ini yang oleh pemerintah Kabupaten Tabanan di dijabarkan melalui memberi kemudahan dan fasilitas kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Tabanan, seperti halnya pengurusan administrasi untuk mendapatkan ijin dari pihak pemerintah, sekarang lebih mudah dan murah hal ini juga diutarakan oleh Asisten II yang membawahi administrasi dan Pembangunan, sebagai berikut :

“.. kalau ditanya kesiapan administrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kami telah siap secara administrasi seperti untuk membeck up masuknya investor, kontrak-kontrak kerja dengan pihak ketiga dsb. Selain itu langkah konkret yang telah kami lakukan adalah dengan menyederhanakan perijinan-perijinan yang ada, seperti ijin SITU, HO, IMB dll, yang dulu penanganannya berjejang dan lama, maka kami telah sederhanakan dengan membuat UPT (unit pelayanan terpadu) dengan tujuan pelayanan cepat dan murah. ..”

Kabupaten Tabanan mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian, potensi inilah yang akan dikembangkan oleh Pemerintah kabupaten Tabanan dengan membuka peluang investor masuk ke bidang pertanian, langkah-langkah yang telah di payakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sektor pertanian, hal ini sebagaimana dikemukakan juga oleh Bapak Ka.sub.Bid. Ekonomi, Drs. I Nym Sumadita, sebagai berikut :

“...kami telah mengupayakan untuk membuat iklim investasi yang kondusif di kabupaten Tabanan, bahkan pada bulan lalu (Agustus, 2002), kami mengadakan rapat koordinasi di tingkat Provinsi tentang usulan investasi Kabupaten Tabanan, salah satu contoh usulan yang kami paparkan ialah mengenai sentra terminal agribisnis yang terletak di Kecamatan Baturiti, adapun atas pertimbangan bahwa kecamatan ini merupakan pusat penghasil sayuran dan buah, kadang produksi dari sayur dan buah itu mencapai surplus, oleh karena itu diperlukan pasar yang representatif yang dapat mewedahi komoditi yang ada, di samping itu pemerintah Kabupaten Tabanan juga bersedia mensubsidi dibidang prasarana jalan menuju ke pasar tersebut sampai 30 % dari total investasi swasta yang ditanamkan, dan juga memberikan keringanan pajak selama waktu tertentu terhadap investor tersebut, ini membuktikan bahwa rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini diharapkan dapat menarik minat investor....”

Dari arah kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Tabanan untuk membuka peluang investasi di bidang pertanian di Kabupaten Tabanan ini mengingat potensi yang dimiliki kabupaten Tabanan di sektor tersebut. Dari kurun waktu yang tahun 1990 sampai dengan 2001 investasi yang dilakukan masyarakat dan swasta tidak saja terfokus pada bidang pertanian tetapi sektor pariwisata, industri perkayuan/ mebel, garment dll, juga mendapat perhatian yang sama. Investasi yang terdapat di Kabupaten Tabanan kurun waktu 1990 sampai dengan 2001 dapat dilihat pada tabel . 4. 23

Tabel. 4. 23
Realisasi Investasi Swasta di Kabupaten Tabanan
Kurun waktu 1990 – 2001(juta)

Tahun	Investasi Swasta	%
1990	44.499,3*	-
1991	17.614,3*	-60,1
1992	50.947,1*	189,23
1993	55.022,7*	7,99
1994	114.997,6*	109,00
1995	174.911,4**	52,10
1996	191.590,6**	9,53
1997	190.964,1**	-0,32
1998	128.106,8**	-32,91
1999	124.656,8**	-2,69
2000	127.397,8**	2,20
2001	130.199,1**	2,19
Rata-rata pertumbuhan		24,91

Sumber : *Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 2001

** Bappeda bekerjasama dengan BPS, Provinsi Bali, 2002

Tabel 4.23 menunjukkan terjadi fluktuasi yang cukup tajam pada tahun 1990 sebesar Rp. 44.499,3 Juta, sedangkan investasi yang terbesar terjadi pada tahun 1998 sebesar Rp. 128.106,8 dan dengan rata-rata 28,45 dari total PDRB Kabupaten Tabanan kurun waktu 1990 sampai dengan 2001.

3. Kondisi Kependudukan

Analisis kependudukan dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik perkembangan penduduk sebagai salah satu dasar dalam menentukan proyek si penduduk di masa yang akan datang. Berdasarkan karakteristik perkembangan penduduk, maka dapat diperkirakan kecenderungan (trend) pola perkembangan penduduknya yang dapat berbentuk linier, eksponensial, geometrik ataupun bentuk lainnya. Berdasarkan data registrasi Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan Menurut jenis kelamin tahun 1990 – 2001 sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24.
Jumlah dan Laju Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 1990 – 2001

No.	Tahun	Kabupaten Tabanan			LP (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
1	1990	206.326	177.974	348.300	0,07
2	1991	173.176	176.774	349.950	0,47
3	1992	173.761	176.889	350.650	0,20
4	1993	160.918	190.432	351.350	0,19
5	1994	164.259	187.640	351.899	0,15
6	1995	183.801	188.780	352.449	0,15
7	1996	184.807	189.833	351.150	0,19
8	1997	185.556	190.616	355.200	0,58
9	1998	186.394	191.225	357.200	0,56
10	1999	187.221	191.829	359.150	0,54
11	2000	179.365	193.175	372.540	3,72
12	2001	192.045	194.384	386.429	3,73
Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)					

Sumber : Data diolah, 2002

Kepadatan penduduk netto Kabupaten Tabanan menurut Kecamatan pada tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 4.24. Berdasarkan tabel tersebut dan untuk mengidentifikasi tingkat atau kategori kepadatan penduduk netto di setiap kecamatan, maka dilakukan analisis pembagian kategori kepadatan. Pembagian kategori kepadatan penduduk netto dilakukan dengan menggunakan metode klasifikasi straggles, yang membaginya menjadi 3 (tiga) kategori dengan interval setiap kategori adalah sebesar 9 Jiwa/ Ha. Adapun kategori kepadatan penduduk netto di Kabupaten Tabanan Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk netto dengan kategori tinggi, apabila memiliki kepadatan penduduk netto yang lebih besar atau sama dengan 41 Jiwa/ Ha.

2. Kepadatan penduduk netto dengan kategori sedang, apabila memiliki kepadatan penduduk netto yang lebih besar atau sama dengan 32 Jiwa/ Ha sampai dengan lebih kecil dari 41 Jiwa/ Ha.
3. Kepadatan penduduk netto dengan kategori rendah, apabila memiliki kepadatan penduduk netto yang lebih besar atau sama dengan 23 Jiwa/ Ha sampai dengan lebih kecil dari 32 Jiwa/ Ha.

Tabel 4.25.
Kategori Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Tabanan Menurut
Kecamatan Tahun 2000

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Netto Tahun 2000 (Jiwa/ Ha)	Kategori Kepadatan Penduduk Netto Tahun 2000
1	Selemadeg	36	Sedang
4	Kediri	49	Tinggi
3	Tabanan	25	Rendah
7	Penebel	46	Tinggi
6	Baturiti	43	Tinggi
5	Marga	45	Tinggi
2	Kerambitan	42	Tinggi
8	Pupuan	59	Tinggi
Jumlah		40	Sedang

Sumber : Analisis Bappeda Kabupaten Tabanan, 2001

Distribusi kepadatan penduduk bruto atau kotor (jumlah penduduk/ luas wilayah administrasi) pada tahun 2000 di wilayah Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk bruto yang tertinggi adalah Kecamatan Kediri (11 Jiwa/ Ha). Sedangkan Kecamatan Pupuan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk bruto yang terendah (2 Jiwa/ Ha).

Berdasarkan hasil proyek si jumlah penduduk di setiap kecamatan pada Kabupaten Tabanan antara tahun 2000 – 2005, maka

dapat ditentukan pola jelasnya proyek si distribusi kepadatan penduduk bruto dan kepadatan penduduk netto. Untuk lebih jelasnya proyek si distribusi kepadatan penduduk bruto selama kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2005 di wilayah Kabupaten Tabanan pada Tabel 4.16; sedangkan proyek si distribusi kepadatan penduduk bruto selama kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 di wilayah Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut ini.

Tabel 4.26.
Proyek si Distribusi Kepadatan Penduduk Bruto Kabupaten Tabanan
Menurut Kecamatan Tahun 2000 – 2005

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Bruto (Jiwa)					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Selemadeg	3	3	3	3	3	3
2	Kerambitan	9	9	9	9	9	9
3	Tabanan	10	10	10	10	10	10
4	Kediri	11	11	11	11	11	11
5	Marga	9	9	9	9	9	9
6	Baturiti	4	4	4	4	4	4
7	Penebel	3	3	3	3	3	3
8	Pupuan	2	2	2	2	2	2
Jumlah		5	5	5	5	5	5

Sumber : Hasil analisis Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000

Berdasarkan Tabel 4.26 terlihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk bruto (jumlah penduduk/ luas wilayah administrasi) yang tertinggi adalah Kecamatan Tabanan pada tahun 2005 kepadatan bruto nya sebesar 11 Jiwa/ Ha, sedangkan Kecamatan yang juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak mengalami pertambahan dari tahun 2000 (11 Jiwa/ Ha) sampai dengan tahun 2005 (11 Jiwa/ Ha) adalah Kecamatan Kediri. Sedangkan Kecamatan Pupuan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk bruto yang terendah dan tidak

mengalami pertambahan yaitu 2 Jiwa/ Ha pada tahun 2000 dan 2 Jiwa/ Ha pada tahun 2005.

Berdasarkan kepadatan penduduk netto atau bersih (jumlah penduduk/ luas wilayah terbangun) di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2000 menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk netto yang tertinggi adalah Kecamatan Pupuan (59 Jiwa/ Ha). Sedangkan Kecamatan Tabanan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk netto yang terendah (25 Jiwa/ Ha) seperti terlihat pada tabel 4.

27.

Tabel 4.2.7
Proyeksi Distribusi Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Tabanan Menurut Kecamatan Tahun 2000 – 2005

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Netto (Jiwa)					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Selemadeg	36	36	36	37	37	37
2	Kerambitan	43	43	43	43	44	44
3	Tabanan	25	26	26	26	26	26
4	Kediri	50	50	50	50	51	51
5	Marga	45	45	45	46	46	46
6	Baturiti	43	44	44	44	44	44
7	Penebel	46	47	47	47	47	48
8	Pupuan	59	59	60	60	60	60
Jumlah		40	40	41	41	41	41

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2000

Berdasarkan Tabel 4.27, maka kepadatan penduduk netto atau bersih (jumlah penduduk/ luas wilayah terbangun) di wilayah Kabupaten Tabanan dari tahun 2000 sampai dengan 2005 menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk netto yang tertinggi adalah

Kecamatan Pupuan, yaitu 59 Jiwa/ Ha pada tahun 2000 dan 60 Jiwa/ Ha pada tahun 2005. Sedangkan Kecamatan Tabanan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk netto yang terendah yaitu, 25 Jiwa/ Ha pada tahun 2000 dan 26 Jiwa/ Ha pada tahun 2005.

4. Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Tabanan dan Rutin Kabupaten Tabanan

Dalam penyusunan anggaran di kabupaten Tabanan lebih banyak didominasi oleh eksekutif, hanya setelah berhembus nya reformasi keadaan ini mulai berubah , di mana DPRD dan masyarakat mulai berperan serta dalam penyusunan APBD. Selama 12 tahun terakhir perkembangan anggaran pembangunan hanya berkisar rata-rata 23,25 % yang mencerminkan kepentingan publik. Sedangkan anggaran rutin mencapai perkembangan rata-rata sebesar 37,39 %, ini merupakan anggaran rutin lebih besar porsi nya dari anggaran pembangunan, dan anggaran pembangunan yang idealnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali dana ini diselewengkan, dan pelaksanaan proyek pun terkesan asal-asalan dan belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Ketika reformasi berhembus, DPRD mulai terlibat aktif dalam penyusunan APBD, namun belum membawa implikasi bagi tersusunnya anggaran yang berorientasi pada kinerja kepentingan publik, bahkan ada indikasi bahwa legislatif pun berlaku

sama seperti hal eksekutif. Untuk melihat perbandingan dana rutin dan dana pembangunan dapat dilihat pada tabel. 4.28.

Tabel 4.28
Realisasi Pengeluaran Pembangunan dan Rutin
Pemerintah kabupaten Tabanan 1990-2001
(Rp. Juta)

Tahun	Pengeluaran Pembangunan	%	Pengeluaran Rutin	%
1990	5.974,39	-	8.417,49	-
1991	7.248,14	21,32	12.650,36	50,28
1992	8.793,60	21,30	19.011,81	50,28
1993	9.097,98	3,46	21.175,09	11,37
1994	8.722,90	-12,6	28.115,58	32,8
1995	9.624,84	10,4	33.938,61	20,7
1996	10.836,51	12,5	38.221,67	12,6
1997	16.321,00	50,5	44.975,28	17,7
1998	17.907,34	9,7	45.923,61	2,1
1999	29.650,93	65,5	62.939,65	37,0
2000	32.639,71	10,0	59.564,11	-5,4
2001	53.447,71	63,75	167.899,23	181,87
Rata-Rata Pertumbuhan		23,25		37,39

Sumber : Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan Bali, 2001

Dari tabel 4. 28 terlihat bahwa sesungguhnya APBD belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, bahkan yang lebih memprihatinkan kondisi APBD tahun 2001 karena terbatasnya anggaran daerah, akibat makin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah, terutama sebagai akibat langsung yang harus pemerintah emban sehubungan dengan otonomi daerah, yaitu pembayaran gaji 9 eks departemen mengakibatkan kebutuhan rutin juga meningkat pesat sebesar 181% dari yang sebelumnya defisit -5,4% anggaran rutin .

Situasi ini juga dipaparkan oleh Kabag. Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

“.. dalam menyusun anggaran kami telah banyak mendiskusikan agar alokasi dana yang tersedia diarahkan pada pengeluaran pembangunan/ kepentingan publik , tetapi karena kebutuhan rutin yang tak bisa ditangguhkan seperti gaji pegawai, pembelian barang-barang dan biaya operasional kantor yang mencapai 60 % dari anggaran seluruhnya, maka untuk kedepan akan diupayakan agar anggaran pembangunan lebih mendapat porsi yang lebih besar dari anggaran rutin..”

Ini membuktikan bahwa peranan pemerintah sebagai regulator di mana memenuhi kepentingan-kepentingan publik belum bisa berjalan dengan maksimal karena anggaran yang terbatas dan telah banyak disedot oleh pembiayaan yang bersifat rutin.

5. Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan bersumber dari Pajak

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan dalam periode tahun 1996/ 1997 s/d 1997/ 1998 meningkat rata-rata sebesar 28% per tahun dilihat dari komponen-komponen PAD maka dapat diuraikan sebagai berikut : Pajak daerah meningkat dengan rata-rata 56% per tahun, retribusi daerah meningkat rata-rata 14% per tahun, Pos bagian Laba BUMD meningkat rata-rata 18% per tahun dan pos penerimaan lain-lain meningkat rata-rata 124% per tahun.

Bila dicermati maka kontribusi yang paling besar terhadap pembentukan PAD Kabupaten Tabanan adalah pendapatan dari Pajak Daerah. Pada tahun 1997 realisasi PAD Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp. 5,6 Milyar dari target anggaran sebesar 4,9 Milyar, ini berarti pencapaiannya melebihi target yang dianggarkan atau sebesar 114% (Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000).

Keterangan di atas juga ditambahkan oleh Kadis Dipenda,

“.. untuk sementara ini kami di Dinas Dipenda berusaha memenuhi target yang diinginkan, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan pembangunan yang ada masih sangat minim, apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka beban kepegawaian dipikul oleh Kabupaten, dari potensi-potensi lain kami belum banyak mendapatkan pemasukan, walaupun kami belum bisa mengurangi beban pajak terhadap masyarakat, tetapi dengan diterapkannya pajak progresif akan sedikitnya melindungi wajib pajak yang kecil-kecil sehingga juga tidak terlalu banyak mengurangi daya beli masyarakat. Mengenai hal yang terkait segi teknis dilapangan apa yang saudara tanyakan tidak sulit dilaksanakan ..”

Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Tabanan terbesar bersumber dari pajak, ini dapat dilihat dari kurun waktu penerimaan pajak tahun 1990-2001 mengalami kenaikan yang cukup berarti dengan rata-rata 53,07 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.

4. 29



Tabel 4.29
Realisasi Penerimaan PAD dari Pajak Kabupaten Tabanan
Tahun 1990-2001.

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	%
1990	186.500.000,00	178.292.400,21	-
1991	189.500.000,00	201.916.918,00	13,25
1992	299.000.000,00	234.463.055,00	16,11
1993	450.000.000,00	328.696.990,00	40,19
1994	575.500.000,00	640.110.823,70	94,74
1995	624.750.000,00	795.483.849,69	24,27
1996	867.200.000,00	883.099.828,71	11,01
1997	1.210.950.000,00	1.714.622.440,66	94,15
1998	3.035.000.000,00	5.077.542.320,71	196,13
1999	5.675.000.000,00	6.457.874.533,00	27,18
2000	5.254.000.000,00	7.080.685.779,70	9,64
2001	10.935.500.000,00	11.094.652.394,00	56,68
Rata-rata pertumbuhan			53,07

Sumber : Dipenda Kabupaten Tabanan, 2002

Tabel di atas menggambarkan dari target yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan hampir 80% terealisasi bahkan beberapa pada tahun tertentu melampaui target yang ditetapkan .

6. Volume Ekspor Daerah Kabupaten Tabanan

Untuk industri ekspor kabupaten Tabanan tahun 2001 dibentuk dari industri kecil / kerajinan (41,32%) dan aneka industri (44,26%) dari total nilai ekspor kabupaten Tabanan. Sedangkan peranan ekspor hasil pertanian terhadap total nilai ekspor masing-masing sebagai berikut : perkebunan, (0,49%) dan perikanan (13,68%)

Untuk industri kecil/ kerajinan dan aneka industri di Kabupaten Tabanan didominasi oleh dua macam produk yaitu pakaian/ industri Garmen dan kerajinan tangan dari besi . Pengrajin tangan dari besi sangat banyak dijumpai di Kabupaten Tabanan terutama di kecamatan Tabanan kota sedangkan industri pakaian jadi dan bordir tidak banyak dijumpai di kabupaten Tabanan.

Kedua produk inilah yang paling banyak diekspor keluar negeri selain ada juga kerajinan kayu/ukiran kayu. Akhir-akhir ini dengan terbukanya pasar di dunia maka pesaing Cina ikut meramaikan produk pakaian jadi tersebut dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus terutama di pakaian bordir, sehingga ekspor di Kabupaten Tabanan mengalami penurunan di bidang tekstil sedangkan industri kerajinan besi dan kayu tidak mengalami penurunan ekspor informasi ini di dapat dari kepala dinas Deperindag. Kabupaten Tabanan Made Artanegara, SH. Beliau mengemukakan :

“.... dengan era globalisasi dewasa ini produk garment makin sulit bersaing di pasaran luar negeri, lebih-lebih Cina ikut membuka pasar maka produk-produk garmen kita kalah bersaing,... ini disebabkan oleh kualitas yang dimiliki pengrajin Cina lebih bagus dan harganya lebih murah dari produk di sini, lebih lanjut diceritakan,... bahwa Cina memang sudah dari nenek moyang nya terampil dalam membuat pakaian seperti bordir sedangkan kita di sini baru bisa mem bordir jelas saja kita kalah bersaing ...“

Untuk melihat perkembangan ekspor kabupaten Tabanan kurun waktu 1990 sampai dengan 2001 dapat dilihat pada tabel .4.30

Tabel. 4.30
Volume Ekspor Kabupaten Tabanan
Kurun waktu 1990 – 2001 (juta)

Tahun	Realisasi	%
1990	268.009	-
1991	293.937	9,67
1992	302.224	2,81
1993	298.315	-1,29
1994	405.897	36,06
1995	356.710	-12,11
1996	415.880	16,58
1997	462.089	11,11
1998	769.817	66,59
1999	374.160	-51,39
2000	198.325	-46,99
2001	198.735	0,20
Rata-rata pertumbuhan		2,84

Sumber : Diperindag. Kabupaten Tabanan, 2002

Tabel. 4.30 menunjukkan bahwa tahun 1998 mengalami ekspor terbesar sebesar Rp. 769.817 juta ini dikarenakan krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi yang terjadi sehingga mengakibatkan melonjaknya permintaan akan barang-barang ekspor kerajinan dan garmen di kabupaten Tabanan karena harga murah akibat perbedaan kurs yang tajam pada tahun 1998 terjadi booming devisa. Sedangkan setelah tahun 1998 ekspor kabupaten tabanan mengalami penurunan yang cukup tajam samapi Rp. 198,325 juta di tahun 2000 . Upaya-upaya telah pula dilakukan Pemerintah kabupaten

Tabanan untuk mendorong ekspor di Kabupaten Tabanan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kadis Perindag, sebagai berikut :

“.. kami juga telah mengupayakan bahwa kami selaku fasilitator ikut membantu untuk kelancaran ekspor yang akan dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tabanan, upaya lain yang dilaksanakan adalah menjadi mediator untuk mempertemukan pengusaha lokal dengan pengusaha luar, di mana upaya-upaya tersebut meliputi *road show* ke berbagai tempat dan juga memberi fasilitas kemudahan untuk mengikuti pameran-pameran, selain itu kami di Dinas Perindag juga memberi penyuluhan kepada pengusaha lokal yang akan mengekspor produk kerajinannya, seperti salah satu contoh yang kami lakukan kepada kelompok pengrajin tempurung kelapa, di mana kelompok pengrajin yang terletak di desa terpencil kurang informasi maka kami dari Dinas Perindag Kabupaten Tabanan memberikan jalan dan arah mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen yang diperlukan dan juga memberikan informasi pasar yang ada, secara teknis kami siap untuk membantu pengusaha dalam mengekspor produknya..”

Fluktuasi memang terjadi namun kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kabupaten Tabanan memberikan peluang kerja bagi masyarakat kabupaten Tabanan yang sedikitnya menggerakkan perekonomian di kabupaten Tabanan.

Dari uraian-uraian di atas lebih lengkap lagi jika ada yang mengkaji gejala-gejala dan dampak sosial politik yang akan timbul dari suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tabanan, karena telah beberapa kali terjadi penolakan dan gejolak dari masyarakat mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Tabanan contohnya : penolakan Bali Nirwana Resort (BNR) yang terletak di kawasan Pura Tanah Lot, di mana masyarakat tidak begitu

saja begitu menerima investor masuk ke daerahnya akan tetapi juga memperhatikan juga dampak-dampak yang akan muncul dari proyek tersebut dan nilai-nilai adat istiadat setempat, selain kasus BNR pembuatan TPA terpadu Sarbagita (Denpasar, Badung, Giayar dan Tabanan) di Kecamatan Kerambitan juga meresahkan masyarakat Tabanan karena takut dari dampak sampah yang akan timbul di lingkungan TPA tersebut. Dampak sosial politik yang ditimbulkan dari suatu proyek tertentu hendaknya dikaji dan disosialisasikan terlebih dahulu, pejabat yang berkompeten mengenai hal ini memberi keterangannya sebagai berikut :

“... dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah diuraikan tidak akan meresahkan dan membuat gejolak di masyarakat masih merupakan hal yang dapat diterima, hanya saja untuk yang berhubungan dengan pajak agar di sosialisasikan dan dikomunikasikan secara intensif dengan masyarakat, begitu juga untuk investor yang ditolak oleh masyarakat lokal karena pertimbangan-pertimbangan berbenturan dengan adat dan istiadat yang ada agar tidak dipaksakan untuk dilakukan..”

Dari hasil analisis faktor-faktor yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan wawancara dengan *stakeholder* maka penulis akan membuat suatu tabel dan membuat scoring, selanjutnya dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan suatu kesimpulan faktor apa yang paling *feasible* untuk dilaksanakan.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan dengan menggunakan variabel dependent pertumbuhan ekonomi, dengan independent variabel yaitu : investasi swasta, pertumbuhan penduduk, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, pajak dan ekspor.

Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS Ver. 10.0 for Windows, dapat diketahui persamaan akhir dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = -183,472 + 6,464X_1 - 1,885X_2 - 3,852X_3 - 2,722X_4 + 109,586X_5 + 0,192X_6$$

F = 181,319 ,dengan signifikansi 0,000

R² = 0,995

Catatan :

= signifikan pada α 5 %

Pembahasan :

Secara Parsial, dari 6 variabel bebas ternyata terdapat 4 variabel bebas yang signifikan yaitu X_1 , X_4 , X_5 dan X_6 sedangkan dua variabel bebas tidak signifikan yaitu X_2 dan X_3 . Uji signifikansi parsial, dilakukan dengan cara membandingkan p_value dengan derajat kesalahan (α).

- PIY signifikan secara statistik pada derajat kesalahan $\alpha = 5$ persen di mana $p_value = 0,000 < \alpha = 5 \text{ persen} = 0.05$.
- POP tidak signifikan secara statistik pada derajat kesalahan $\alpha = 5$ persen di mana $p_value = 0,535 > \alpha = 5 \text{ persen} = 0.05$.
- PIG tidak signifikan secara statistik pada derajat kesalahan $\alpha = 5$ persen di mana $p_value = 0,226 > \alpha = 5 \text{ persen} = 0.05$.
- LG signifikan secara statistik pada derajat kesalahan $\alpha = 5$ persen di mana $p_value = 0,025 < \alpha = 5 \text{ persen} = 0.05$.
- RY signifikan secara statistik pada derajat kesalahan $\alpha = 5$ persen di mana $p_value = 0,000 < \alpha = 5 \text{ persen} = 0.05$.
- XY signifikan secara statistik pada derajat kesalahan $\alpha = 5$ persen di mana $p_value = 0,031 < \alpha = 5 \text{ persen} = 0.05$.

Dan hipotesis digunakan adalah :

$H_0 : B_0 = 0, B_1 = 0, B_2 = 0, B_3 = 0, B_4 = 0, B_5 = 0, B_6 = 0$

$H_0 : B_0 > 0, B_1 > 0, B_2 > 0, B_3 > 0, B_4 > 0, B_5 > 0, B_6 > 0$

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel PIY, LG, RY dan XY, secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB/ pertumbuhan ekonomi, artinya hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Dengan kata lain dari 100 selang kejadian 95 adalah benar dan 5 adalah salah. Sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dan pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (H_0 Diterima). Dan secara simultan variabel bebas signifikan ditunjukkan oleh tingginya nilai F yang mempunyai signifikansi 0,000.

R^2 sebesar 0,995 menunjukkan bahwa variasi naik turunnya variabel tidak bebas 99,5% dipengaruhi oleh variasi naik turunnya variabel bebas dalam model dan sisanya sebesar 0,5% dipengaruhi oleh variasi variabel bebas di luar model yaitu X_7 dan seterusnya.

Dengan kata lain PDRB Kabupaten Tabanan dalam penelitian ini hanya dipengaruhi oleh investasi swasta, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dan investasi pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Secara ekonomis dapat dijelaskan jika tidak ada variabel investasi swasta (X_1), pertumbuhan penduduk (X_2), pengeluaran pembangunan (X_3), pengeluaran rutin (X_4), pajak (X_5) dan ekspor (X_6) maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan akan negatif sebesar -183,472 persen ini dilihat dari konstanta hasil persamaan regresi di atas.

Sedangkan dari koefisien regresi investasi swasta sebesar 6,464 menunjukkan dengan meningkatnya investasi swasta sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,464 persen. Artinya investasi swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Peran sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dari sektor publik mencerminkan kemajuan suatu daerah, karena peran pemerintah seharusnya hanya sebagai pendorong terhadap fungsi ekonomi yang tidak dijalankan oleh swasta.

Koefisien regresi variabel pertumbuhan penduduk negatif sebesar -1,885, Artinya kenaikan 1 persen penduduk akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,885 persen. Koefisien variabel investasi pemerintah negatif sebesar -3,852. Artinya penggunaan dana pembangunan di Kabupaten Tabanan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatkan pertumbuhan investasi pemerintah daerah sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -3,852 persen. Koefisien regresi variabel pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar -2,722. Artinya bahwa penggunaan dana konsumsi pemerintah di Kabupaten Tabanan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya konsumsi pemerintah sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan

mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar $-2,722$ persen.

Koefisien variabel pajak sebesar $109,586$. Artinya pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan dengan meningkatkan pertumbuhan pajak sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar $109,586$ persen. Koefisien regresi ekspor sebesar $0,192$, menunjukkan dengan meningkatnya volume ekspor sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar $0,192$ persen. Artinya ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan.

Temuan ini menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Tabanan bahwa peningkatan PDRB dapat dilakukan dengan cara mendorong berkembangnya investasi swasta dengan cara memberikan iklim investasi yang kondusif. Selain itu perlu diperhatikan pengeluaran rutin yang ada di dalam APBD untuk diperhatikan secara cermat karena dalam penelitian ini terdapat korelasi yang negatif antara pengeluaran rutin terhadap PDRB. Variabel lain yang perlu dicermati adalah pajak, sebab pajak cukup berpengaruh besar terhadap PDRB Kabupaten Tabanan.

Kabupaten Tabanan juga perlu memperhatikan usaha-usaha ekonomi produktif yang berorientasi ekspor sebab ekspor ternyata mempunyai korelasi positif terhadap PDRB Kabupaten Tabanan.

Melihat besarnya nilai F dan R^2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini cukup fit.

2. Alternatif Pengembangan Rumusan Kebijakan dari Faktor-faktor Dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan *PETS Analysis* .

Pendekatan ini secara umum menilai dan mempertimbangkan faktor investasi swasta, jumlah penduduk, investasi pemerintah, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Semua faktor –faktor penting itu kemudian ditentukan faktor determinan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dibuat dalam bentuk tabel-tabel, selanjutnya faktor-faktor itu dianalisis, dikaji dan dinilai di beri bobot 1 sampai 4. Bobot dalam arti urgensi nya pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan melihat konteks keseimbangan kemudian tabel-tabel itu dianalisis, dinilai dan di komparasi satu sama lainnya untuk kemudian menghasilkan input rumusan kebijakan yang paling mungkin dan ideal dilaksanakan.

Analysis .PETS mengkaji secara mendalam empat faktor besar pokok terhadap sebuah proposal kebijakan publik, yaitu faktor politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Keempat faktor pokok ini di timbang dan dikaji secara simultan untuk kemudian menghasilkan input rumusan kebijakan yang mungkin dilakukan.

Dalam implementasi di lapangan penulis menjabarkan lagi ke empat faktor utama tersebut menjadi enam faktor yaitu : Politik, Ekonomi, Teknologi/ Teknis, Sosial ditambah Administrasi dan Hukum.

a. Alternatif Rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada Investasi Swasta.

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para *stakeholder* maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring. Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan kebijakan publik investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = investasi swasta tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = investasi swasta kurang dapat diterapkan

Nilai skor 3 = investasi swasta cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = investasi swasta dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan investasi swasta, dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada investasi swasta adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi kalau investasi swasta diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh pernyataan Kasub. Bid. Ekonomi Bappeda Kabupaten Tabanan di mana telah dilakukan upaya-upaya untuk merangsang masuknya investor datang ke Kabupaten Tabanan untuk menanamkan modalnya dan diperkuat dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis yang menyatakan kenaikan 1 persen investasi swasta akan mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,464 persen dengan kata lain dari segi ekonomi input. rumusan kebijakan investasi swasta itu cukup dapat diterapkan \Rightarrow (skor : 3). Teknis, menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah

ditanyakan pada Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada, jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan investasi swasta ini dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis \Rightarrow (skor : 4).

Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal dari masyarakat dan swasta dan telah dilakukan oleh Bidang Perekonomian pada kantor Bappeda Kabupaten Tabanan dengan berbagai upaya menarik penanam modal domestik maupun asing , maka secara administrasi input rumusan investasi swasta ini dapat dilaksanakan \Rightarrow (skor : 4).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan investasi swasta ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak \Rightarrow (skor : 4). Sedangkan aspek sosial, yaitu input rumusan kebijakan investasi swasta tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap

masyarakat hanya saja yang akan menimbulkan dampak negatif akibat investasi swasta ini agar didiskusikan lebih mendalam contohnya kasus Bali Nirwana Resort yang telah diuraikan pada bagian terdahulu (keterangan Kakansospol Kabupaten Tabanan) , akibat berbenturan dengan nilai adat istiadat setempat agar tidak dipaksakan realisasinya ⇒ (skor : 3). Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan investasi swasta yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat dukungan dari masyarakat ini terbukti dari usulan-usulan dari bawah (Desa atau Kecamatan) yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan banyak yang menginginkan adanya penanaman modal agar ditanamkan di wilayahnya ⇒ (skor : 3). Untuk lebih ringkasnya penilaian investasi swasta dapat dilihat pada tabel 4. 31

Tabel. 4. 31
Kriteria penilaian investasi swasta

No.	Kriteria / Penilaian	Skor
1.	<p>Ekonomis dan Finansial (<i>Economic and Financial Feasibility</i>)</p> <p>Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan memerlukan dana yang cukup besar untuk promosi dan merangsang masuknya investor , namun demikian rumusan ini jika diterapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.</p>	3
2.	<p>Teknis (<i>Technical Feasibility</i>)</p> <p>Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini jika dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena telah siap baik dari segi tenaga SDM maupun perangkat kerasnya.</p>	4
3.	<p>Administrasi (<i>Administrative Operability</i>)</p> <p>Adanya reformasi sistem perijinan dan kemudahan administrasi serta kesesuaian prosedur sehingga ongkos pembuat ijin dan ongkos pungut dapat ditekan.</p>	4
4.	<p>Hukum / (<i>Legal Feasibility</i>)</p> <p>Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p>	4
5.	<p>Sosial (<i>Social Feasibility</i>)</p> <p>Dalam input rumusan kebijakan investasi swasta yang akan diterapkan dapat tidak bisa diterapkan begitu saja, harus disosialisasikan terlebih dahulu.</p>	3
6.	<p>Politik</p> <p>Investasi swasta ini akan cukup mendapat dukungan dari masyarakat .</p>	3
	Jumlah	21

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dengan nilai skor $21 : 6 = 3,5$, dibulatkan ke atas (4) , berarti input rumusan kebijakan ini dapat diterapkan. Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi investasi swasta belum bisa

semua diterima di beberapa instansi terkait karena pertimbangan yang ada seperti aspek sosial, yaitu input rumusan kebijakan investasi swasta tidak sepenuhnya bebas dari beban sosial seperti dampak negatif akibat investasi swasta ini agar didiskusikan lebih mendalam contohnya kasus Bali Nirwana Resort yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, sedikit kutipan dari Kakansospol Kabupaten Tabanan :

"investasi swasta yang berbenturan dengan nilai adat istiadat setempat agar tidak dipaksakan realisasinya. Sedangkan menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan investasi swasta yang akan dilaksanakan nantinya harus mendapat dukungan dari masyarakat... "

Dari segi aspek sosial dan politis input rumusan menggalakkan kebijakan investasi swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat sehingga datangnya investor yang akan menanamkan modalnya akan disambut baik oleh masyarakat dimana investasi tersebut dilakukan.

b. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada Pertumbuhan Penduduk

Pada negara berkembang yang mana produktivitas penduduknya rendah akan menjadi masalah jika pertumbuhan penduduk itu tidak dikendalikan, pertumbuhan penduduk ini akan menggerogoti pertumbuhan ekonomi yang ada, ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari fenomena di atas dan analisis penulis, yang sumbernya dari para *stakeholder* maka akan dibuat

suatu tabel dan membuat skoring. Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan kebijakan publik pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = pertumbuhan penduduk tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = pertumbuhan penduduk kurang dapat diterapkan

Nilai skor 3 = pertumbuhan penduduk cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = pertumbuhan penduduk dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk , dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi kalau pertumbuhan penduduk diupayakan sebagai penyedia tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda perekonomian tidak dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan koefisien regresi memperlihatkan hasil dengan kenaikan 1 persen pertumbuhan Penduduk akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -1,885 persen dengan kata lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk tidak dapat diterapkan. \Rightarrow (skor : 1). Teknis, menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Bapak Ketua Bappeda Kabupaten Tabanan tidak relevan kebijakan ini dilakukan dan akan cukup mengalami kesulitan karena kebijakan ini tidak populer, karena program pemerintah adalah untuk menekan pertumbuhan penduduk agar dapat dikendalikan yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk ini kurang dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis \Rightarrow (skor : 2).

Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini kurang menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan penduduk kurang sesuai karena program pemerintah Kabupaten Tabanan justru menekan pertumbuhan penduduk dengan

program Keluarga Berencana , maka secara administrasi input rumusan Pertumbuhan Penduduk ini kurang dapat dilaksanakan \Rightarrow (skor : 2).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan Pertumbuhan Penduduk ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku \Rightarrow (skor : 4). Sedangkan aspek sosial yang ditanyakan kepada Kakansospol Kabupaten Tabanan , yaitu input rumusan kebijakan Pertumbuhan Penduduk akan menimbulkan masalah-masalah baru beban sosial dalam masyarakat seperti kekurangan lahan pekerjaan, banyaknya pengangguran yang akan cenderung berdampak negatif akibat untuk memenuhi kebutuhan mereka sedangkan penghasilan tidak ada, sehingga mengakibatkan kerawanan sosial \Rightarrow (skor : 1). Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk yang akan dilaksanakan nantinya, para pengambil kebijakan melihat kurang mendapat dukungan dari masyarakat ini terbukti karena banyaknya masalah kependudukan yang ada di masyarakat disamping itu itu keberhasilan program KB mencerminkan kebijakan menekan ledakan penduduk telah dapat diterima oleh masyarakat \Rightarrow (skor : 2) . Untuk lebih ringkasnya penilaian pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel 4. 32

Tabel.4. 32
Kriteria Penilaian Pertumbuhan Penduduk

No.	Kriteria / Penilaian	Skor
1.	Ekonomis dan Finansial (<i>Economic and Financial Feasibility</i>) Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ditelan oleh pertumbuhan penduduk itu.	1
2.	Teknis (<i>Technical Feasibility</i>) Secara teknis sulit diterapkan dilapangan karena bertentangan dengan kebijakan yang ada yaitu program KB.	2
3.	Administrasi (<i>Administrative Operability</i>) Secara administrasi bertentangan dengan tujuan yang ada sehingga ada kendala administrasi dalam input pertumbuhan penduduk ini.	2
4.	Hukum / (<i>Legal Feasibility</i>) Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	4
5.	Sosial (<i>Social Feasibility</i>) Pertambahan penduduk akan mengakibatkan masalah-masalah sosial baru di masyarakat	1
6.	Politik Input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk ini akan kurang mendapat dukungan dari masyarakat .	2
	Jumlah	12

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dengan nilai skor $12 : 6 = 2,00$, berarti input rumusan kebijakan ini kurang dapat diterapkan. Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari pertumbuhan penduduk belum bisa semua

diterima karena pertimbangan nilai ekonomis seperti keterangan Kepala

Bappeda Kabupaten Tabanan :

“ ...pertumbuhan penduduk hanya akan menggerogoti pertumbuhan ekonomi yang sudah kecil ini dan walaupun pertumbuhan penduduk akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan memerlukan lapangan pekerjaan banyak, sedangkan tenaga kerja yang menganggur saja sudah banyak baik di sektor pertanian maupun menganggur secara terbuka

Jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini kurang menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan. Di mana peningkatan pertumbuhan penduduk kurang sesuai karena program pemerintah Kabupaten Tabanan justru menekan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan aspek sosial dan politik dari pertumbuhan penduduk ini diambil dari beberapa kutipan hasil wawancara terdahulu dengan Kakansospol Kabupaten Tabanan :

“...pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat seperti banyaknya pengangguran yang akan cenderung berdampak negatif. ...Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk kurang mendapat dukungan dari masyarakat, keberhasilan program KB mencerminkan kebijakan menekan ledakan penduduk telah dapat diterima oleh masyarakat ...

Dari beberapa pertimbangan yang menyatakan sulitnya menerapkan kebijakan pertumbuhan penduduk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, maka secara arif para pengambil kebijakan seyogyanya tidak justru mendorong peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan Bali.

c. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada Pengeluaran Pembangunan

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para *stakeholder* maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring. Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan kebijakan publik pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = pengeluaran pembangunan tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = pengeluaran pembangunan kurang
dapat diterapkan

Nilai skor 3 = pengeluaran pembangunan cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = pengeluaran pembangunan dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan, dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada pengeluaran pembangunan adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi kalau pengeluaran pembangunan diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian tidak akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan di dapat hasil koefisien regresi - 3,852 yang berarti kenaikan 1 persen pengeluaran pembangunan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 3,852 persen dengan kata lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan itu tidak dapat diterapkan \Rightarrow (skor : 1). Teknis, menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Kabag Keuangan Kabupaten Tabanan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada, jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan

Pengeluaran Pembangunan ini dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis \Rightarrow (skor : 4).

Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal dari pemerintah tetapi dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari pengamatan penulis terlalu banyak alokasi dana pembangunan digunakan untuk membangun gedung –gedung yang sifatnya tidak produktif seperti balai pertemuan, rumah dinas, kantor dsb, maka secara administrasi input rumusan pengeluaran pembangunan ini kurang dapat dilaksanakan \Rightarrow (skor : 2).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak \Rightarrow (skor : 4). Sedangkan aspek sosial yang ditanyakan kepada Kakansospol Kabupaten Tabanan mengatakan, yaitu input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat hanya saja yang akan

menimbulkan kesan- negatif jika alokasi dananya tidak tepat seperti pembangunan gedung-gedung yang sifatnya tidak produktif dan sedikit sekali berdampak pada masyarakat seperti pembangunan rumah dinas, kantor-kantor yang masih layak dipakai \Rightarrow (skor : 3). Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat dukungan dari masyarakat ini terbukti dari usulan-usulan dari bawah (Desa atau Kecamatan) yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan banyak yang menginginkan adanya penanaman modal dari pemerintah (Anggaran Pembangunan) agar ditanamkan di wilayahnya seperti jalan dan jembatan sebagai kelancaran prasarana ekonomi \Rightarrow (skor : 3). Untuk lebih ringkasnya penilaian pengeluaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4. 33

Tabel.4. 33
Kriteria Penilaian pengeluaran pembangunan

No.	Kriteria / Penilaian	Skor
1.	Ekonomis dan Finansial (<i>Economic and Financial Feasibility</i>) Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	1
2.	Teknis (<i>Technical Feasibility</i>) Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini jika dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan diterapkan di lapangan tidak begitu sulit karena telah siap baik dari segi tenaga SDM maupun perangkat kerasnya.	4
3.	Administrasi (<i>Administrative Operability</i>) Secara administrasi input rumusan kebijakan ini tidak akan sulit di lakukan. Karena mekanisme pemerintah Kabupaten Tabanan masih berjalan baik.	2
4.	Hukum / (<i>Legal Feasibility</i>) Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	4
5.	Sosial (<i>Social Feasibility</i>) Dalam input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang akan diusulkan dapat diterima di masyarakat karena berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat.	3
6.	Politik Rumusan kebijakan ini akan cukup mendapat dukungan dari masyarakat .	3
	Jumlah	17

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dengan nilai skor $17 : 6 = 2.83$, lebih dekat ke nilai 3, berarti input rumusan kebijakan ini cukup dapat diterapkan. Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi investasi pemerintah dilihat

dari berbagai aspek belum bisa semua diterapkan karena pertimbangan yang ada, seperti pada aspek sosial dan politik yang dikutip dari pernyataan Kakansospol Kabupaten Tabanan sbb :

“...kebijakan pengeluaran pembangunan yang alokasi dananya tidak tepat seperti pembangunan balai pertemuan, rumah dinas, dan gedung-gedung kantor yang masih layak untuk digunakan agar dikurangi pembangunannya dan dialihkan ke sektor produktif...”

Menyangkut dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengeluaran pembangunan masih mendapat dukungan sepanjang digunakan membangun sektor publik seperti : jembatan , jalan, pasar dsb.

d. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada Pengeluaran Rutin

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para *stakeholder* maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring. Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan kebijakan publik pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = pengeluaran rutin tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = pengeluaran rutin kurang dapat diterapkan

Nilai skor 3 = pengeluaran rutin cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = pengeluaran rutin dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan pengeluaran rutin, dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada pengeluaran rutin adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi kalau pengeluaran rutin diupayakan sebagai pembentukan modal yang akan di konsumsi kan dalam rangka menjalankan roda perekonomian secara signifikan akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan akan, ini didasarkan oleh keterangan Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tabanan akan tetapi dalam hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis pengeluaran pembangunan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi \Rightarrow (skor : 2). Teknis, menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung prasarana dan sarana yang ada, jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan pengeluaran rutin ini dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis \Rightarrow (skor : 4).

Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal pemerintah yang nantinya digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang selanjutnya menjadi efek penggandaan dari perekonomian setempat, maka secara administrasi input rumusan pengeluaran rutin ini dapat dilaksanakan \Rightarrow (skor : 4).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan pengeluaran rutin ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak \Rightarrow (skor : 4). Sedangkan dari aspek sosialnya, yaitu input rumusan kebijakan pengeluaran rutin akan menimbulkan kritikan-kritikan dari masyarakat karena dana yang dialokasikan pemerintah banyak yang tidak produktif seperti perjalanan dinas yang tidak begitu perlu pengeluaran tunjangan-tunjangan yang sangat besar jumlahnya baik di kalangan eksekutif maupun legislatif, ini akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat dimana pajak yang ditanggung oleh masyarakat tidak sepenuhnya dikembalikan lagi melalui pemerintah kepada hal-hal yang bersifat produktif \Rightarrow (skor : 2). Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan pengeluaran rutin yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat kurang mendapat dukungan dari masyarakat ini terbukti banyak usulan agar pengeluaran

rutin dikurangi dialihkan ke pengeluaran pembangunan \Rightarrow (skor : 2).
Untuk lebih ringkasnya penilaian pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4. 34

Tabel.4. 34
Kriteria Penilaian Pengeluaran Rutin

No.	Kriteria / Penilaian	Skor
1.	Ekonomis dan Finansial (<i>Economic and Financial Feasibility</i>) Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan memerlukan dana yang cukup besar untuk biaya pegawai dan konsumsi pemerintah dan bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi karena belum tentu secara langsung uang yang di peroleh dibelanjakan di Kabupaten Tabanan.	2
2.	Teknis (<i>Technical Feasibility</i>) Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini jika dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena telah siap baik dari segi tenaga SDM maupun Perangkat kerasnya.	4
3.	Administrasi (<i>Administrative Operability</i>) Dari segi tujuan, perencanaan dan prosedur tidak begitu sulit diterapkan karena dikelola oleh pemerintah daerah setempat.	4
4.	Hukum / (<i>Legal Feasibility</i>) Rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	4
5.	Sosial (<i>Social Feasibility</i>) Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang akan diterapkan dapat kurang dapat diterima di masyarakat karena terkesan tidak produktif.	2
6.	Politik Rumusan kebijakan ini akan kurang mendapat dukungan dari masyarakat .	2
	Jumlah	18

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dengan nilai skor $18 : 6 = 3$ berarti input rumusan kebijakan ini cukup dapat diterapkan. Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi pengeluaran rutin belum bisa semua diterapkan seperti pada aspek sosial dan politik dari kebijakan pengeluaran rutin yang diungkapkan oleh Kakansospol Kabupaten Tabanan :

“... agar dana dialokasikan pemerintah ke sektor produktif yang bisa meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan seperti pendidikan, pelatihan, kursus-kursus dsb. Dan hendaknya pengeluaran rutin seperti perjalanan dinas yang tidak begitu perlu dan tunjangan-tunjangan yang sangat besar jumlahnya baik di kalangan eksekutif maupun legislatif agar dikurangi...”

Kesemuanya biaya-biaya ini menimbulkan beban terhadap anggaran pemerintah yang sudah sangat terbatas.

e. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada Pajak

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para *stakeholder* maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring, Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan

kebijakan publik mengenai pajak terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = peningkatan pajak tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = peningkatan pajak kurang dapat diterapkan

Nilai skor 3 = peningkatan pajak cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = peningkatan pajak dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan peningkatan pajak , dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada pajak adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi kalau peningkatan pajak diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana didapat hasil yang memperlihatkan kenaikan 1 persen pajak akan mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 109,586 persen dengan kata lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan peningkatan pajak dapat diterapkan bahkan memiliki nilai yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi \Rightarrow (skor : 4). Teknis, menyangkut pertimbangan

dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Bapak Kepala Dipenda Kabupaten Tabanan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada, jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan Peningkatan pajak ini dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis \Rightarrow (skor : 4).

Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan menarik modal dari masyarakat dan swasta melalui pajak dan salah satu bukti yang dicapai pemerintah adalah hampir tiap tahun target penerimaan PAD dari pajak dapat terealisasi , maka secara administrasi input rumusan peningkatan pajak ini dapat dilaksanakan \Rightarrow (skor : 4).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan Peningkatan pajak ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak \Rightarrow (skor : 4). Sedangkan aspek sosial dari pendapatnya Bapak Kakansospol Kabupaten Tabanan, yaitu input rumusan kebijakan

peningkatan pajak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat karena akan mengurangi daya beli masyarakat yang selanjutnya mengurangi peredaran uang di pasaran, dapat pula mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa sehingga produksi berkurang yang akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi \Rightarrow (skor : 2).

Politik, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan peningkatan pajak yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, ini terbukti dari banyak usulan-usulan yang datangnya dari masyarakat agar dapat keringanan pajak dari pemerintah \Rightarrow (skor : 2). Untuk lebih ringkasnya penilaian penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4. 35

Tabel.4. 35
Kriteria penilaian penerimaan daerah (pajak)

No.	Kriteria / Penilaian	Skor
1.	Ekonomis dan Finansial (<i>Economic and Financial Feasibility</i>) Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.	4
2.	Teknis (<i>Technical Feasibility</i>) Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini jika dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan diterapkan di lapangan tidak begitu sulit karena telah siap baik dari segi tenaga SDM maupun Perangkat kerasnya.	4
3.	Administrasi (<i>Administrative Operability</i>) Adanya reformasi sistem pemungutan pajak , sehingga ongkos pungut dapat ditekan.	4
4.	Hukum / (<i>Legal Feasibility</i>) Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	4
5.	Sosial (<i>Social Feasibility</i>) Pungutan pajak kurang dapat diterima di masyarakat karena berhubungan dengan mengurangi daya beli masyarakat.	2
6.	Politik Input rumusan kebijakan ini akan kurang mendapat dukungan dari masyarakat .	2
	Jumlah	20

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dengan nilai skor $20 : 6 = 3,33$ lebih dekat ke nilai 3, berarti

input rumusan kebijakan ini cukup dapat diterapkan. Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi perpajakan belum bisa semua diterapkan seperti pada aspek sosial dan politik dari sekelumit pendapatnya Kakansospol Kabupaten Tabanan :

“...peningkatan pajak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat karena akan mengurangi daya beli masyarakat dan dukungan masyarakat secara politis juga kurang terhadap input rumusan kebijakan peningkatan pajak ini”

Kebijakan peningkatan Pajak yang akan dilakukan merupakan kebijakan tidak populer, dimana akan mengakibatkan penolakan-penolakan oleh masyarakat yang terbebani oleh pengenaan pajak tersebut, tetapi di satu sisi kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka dari itu bagaimana upaya pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar pengenaan pajak dari masyarakat dapat dinikmati kembali oleh masyarakat melalui pembangunan.

f. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada Ekspor

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para *stakeholder* maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring, Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh

di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan kebijakan publik ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = ekspor tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2 = ekspor kurang dapat diterapkan

Nilai skor 3 = ekspor cukup dapat diterapkan

Nilai skor 4 = ekspor dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan kebijakan ekspor, dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada ekspor adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi kalau ekspor diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh Keterangan Bapak Kepala Dinas Perindag. dan hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana didapat hasil kenaikan 1 persen ekspor akan mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192 persen dengan kata lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan ekspor itu kurang dapat diterapkan \Rightarrow (skor : 1). Teknis, menyangkut

pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh sarana dan prasarana lainnya yang ada, jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan ekspor ini cukup dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis walau ada sedikit kendala-kendala di pengurusan dokumen ekspor namun masih bisa diatasi baik dari pemerintah maupun pengusaha/ eksportir \Rightarrow (skor : 3).

Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal melalui ekspor, maka secara administrasi input rumusan ekspor ini dapat dilaksanakan \Rightarrow (skor : 3).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan ekspor ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak \Rightarrow (skor : 4). Sedangkan aspek sosial, yaitu input rumusan kebijakan ekspor tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat \Rightarrow (skor : 4). Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan ekspor yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat

dukungan dari masyarakat ini terbukti dari munculnya eksportir-eksportir di masyarakat seperti eksportir garmen, kerajinan perhiasan perak, ukiran kayu dsb \Rightarrow (skor : 4). Untuk lebih ringkasnya penilaian ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4. 36

Tabel.4. 36
Kriteria Penilaian Ekspor Daerah

No.	Kriteria / Penilaian	Skor
1.	Ekonomis dan Finansial (<i>Economic and Financial Feasibility</i>) Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan memerlukan dana yang cukup besar untuk promosi, dan rumusan ini jika diterapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kecil.	1
2.	Teknis (<i>Technical Feasibility</i>) Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan kebijakan ini jika dilaksanakan sebagai kebijakan, secara teknis akan diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena telah siap baik dari segi tenaga SDM maupun perangkat kerasnya.	3
3.	Administrasi (<i>Administrative Operability</i>) Secara administrasi ekspor yang dilakukan oleh pengusaha di Kabupaten Tabanan tidak ada masalah.	3
4.	Hukum / (<i>Legal Feasibility</i>) Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	4
5.	Sosial (<i>Social Feasibility</i>) Ekspor daerah yang akan diterapkan dapat diterima di masyarakat karena berhubungan dengan kesempatan kerja.	4
6.	Politik Input rumusan kebijakan ini akan mendapat dukungan dari masyarakat .	4
	Jumlah	19

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dengan nilai skor $19 : 6 = 3,16$, lebih dekat ke nilai 3, berarti input rumusan kebijakan ini cukup dapat diterapkan. Input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi ekspor belum bisa semua diterapkan seperti secara teknis menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan :

“...dari segi teknis kebijakan ekspor ini cukup dapat dilaksanakan di lapangan walau ada sedikit kendala-kendala di pengurusan dokumen ekspor namun masih bisa diatasi. Sedangkan dari segi administrasi kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan ekspor telah menampakkan kesesuaian dari tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan....”

Kebijakan ekspor merupakan kebijakan yang sangat didorong oleh pemerintah Kabupaten Tabanan hal ini akan membawa dampak bagi perekonomian, yang mana akan dapat menyerap banyak tenaga kerja jika ekspor berjalan dengan lancar dan efek pengganda dari kebijakan ekspor ini akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan bali.

Adapun langkah selanjutnya dipergunakan untuk merekomendasikan alternatif rumusan kebijakan adalah dengan menguji dengan melalui beberapa kriteria dengan metode perbandingan kriteria *equivalent alternative method* yang menganggap sama terhadap semua kriteria tanpa melakukan pembobotan terhadap kriteria tertentu (rasionalitas), yang didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan

rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti halnya politik, administrasi, hukum, sosial serta hal teknis. Setelah itu dilakukan skoring untuk menilai bobot yang tertinggi. Skoring dilakukan untuk melihat prioritas input rumusan kebijakan terpilih.

Kriteria dan penilaian dari masing-masing input rumusan kebijakan, dengan nilai skor 1 yang berarti tidak bisa diterapkan, nilai skor 2 yang berarti kurang bisa diterapkan, skor 3 cukup bisa diterapkan skor 4 berarti bisa diterapkan. Hasil penilaian kemudian di rekapitulasi, angka 1-4 ini penulis gunakan dengan alasan yang jelas untuk per kriteria. Hasil penilaian skoring ini bukan dimaksudkan untuk memilih salah satu input rumusan kebijakan terpilih namun untuk menentukan prioritas dari rumusan kebijakan yang akan dibuat, karena input-input kebijakan bersifat saling melengkapi / komplementer. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.37 di bawah ini.

Tabel 4.37
Rekapitulasi skor input rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Alternatif	Input Rumusan Kebijakan	Kriteria						Total
		Ekonomi	Teknis	Administrasi	Hukum	Sosial	Politik	
I	Investasi Swasta	3	4	4	4	3	3	21
II	Pertumbuhan Penduduk	1	2	2	4	1	2	12
III	Pengeluaran Pembangunan	1	4	2	4	3	3	17
IV	Pengl. Rutin	2	4	4	4	2	2	18
V	Pajak	4	4	4	4	2	2	20
VI	Ekspor	1	3	4	4	4	4	19

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil skoring di atas dapat dihasilkan rangking input rumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Rangking I adalah input rumusan kebijakan investasi swasta dengan nilai skor 21 atau memiliki pertimbangan bobot skoring $21 : 6 = 3,5$ (dibulatkan ke atas = 4) yang berarti efektif untuk diterapkan.
2. Rangking II adalah input rumusan kebijakan pajak dengan nilai skor 20 atau memiliki pertimbangan bobot skoring $20 : 6 = 3,3$ (mendekati 3) yang berarti cukup efektif untuk diterapkan.
3. Rangking III adalah input rumusan kebijakan ekspor dengan nilai skor 19 atau memiliki pertimbangan bobot skoring $19 : 6 = 3,16$ (mendekati 3) yang berarti cukup efektif untuk diterapkan.

4. Rangkaian IV adalah input rumusan kebijakan pengeluaran rutin dengan nilai skor 17 atau memiliki pertimbangan bobot skoring $18 : 6 = 3$ yang berarti cukup efektif untuk diterapkan.
5. Rangkaian V adalah input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan dengan nilai skor 17 atau memiliki pertimbangan bobot skoring $17 : 6 = 2,83$ (mendekati 3) yang berarti cukup efektif untuk diterapkan.
6. Rangkaian VI adalah input rumusan kebijakan penduduk dengan nilai skor 12 atau memiliki pertimbangan bobot skoring $12 : 6 = 2,00$ yang berarti tidak efektif untuk diterapkan.

Dari hasil seleksi input rumusan kebijakan tersebut, prioritas yang direkomendasikan ialah input rumusan pertumbuhan ekonomi dari semua faktor-faktor yang dominan berpengaruh tersebut karena faktor-faktor tersebut saling melengkapi, tinggal sekarang memprioritaskan di faktor apa paling ditekankan sesuai dengan rangkaian yang diperoleh. Dalam hal ini dari kajian penulis karena pertumbuhan ekonomi di kabupaten tidak hanya dapat diatasi oleh faktor yang paling dominan dan mendapat skor tinggi, maka faktor dominan lainnya di adopsi juga untuk rumusan kebijakan tetapi tidak mendapat prioritas di bandingkan dengan faktor yang paling dominan berpengaruh dia bisa disebut faktor komplementer.

Artinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkat dengan menggunakan faktor-faktor yang dominan tersebut sebagai input rumusan kebijakan.

D. DISKUSI

Hasil analisis menunjukkan dari 6 variabel bebas ternyata terdapat 4 variabel bebas yang signifikan yaitu Investasi swasta, Pengeluaran rutin, pajak dan ekspor ini dibuktikan dengan berdasarkan probabilitas, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, untuk investasi swasta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu "Peningkatan rasio investasi swasta terhadap PDRB (PIY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tabanan" diterima dan sesuai dengan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan dilihat dari segi ekonomis cukup memberi hasil jika input rumusan kebijakan ini diterapkan serta risikonya juga kecil. Pengeluaran Rutin probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, untuk Pengeluaran Rutin nilai signifikansi $0,025 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu "Peningkatan rasio konsumsi pemerintah terhadap PDRB (GY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan, diterima tetapi secara ekonomis konsumsi pemerintah Kabupaten

Tabanan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya konsumsi pemerintah sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -2,722 persen, hal ini tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah harus membayar gaji pegawai dan biaya rutin dari kelancaran aktivitas Pemerintah daerah kabupaten Tabanan.

Untuk Pajak nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu "Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB (RY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali " diterima ada pendapat lain mengemukakan bahwa pengenaan pajak pada masyarakat dapat mengurangi daya beli masyarakat yang selanjutnya mengurangi kapasitas produksi, tetapi dalam penelitian ini pajak yang dikenakan oleh pemerintah berpengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan, kendatipun pajak memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi mengandung resiko terhadap beban yang akan ditanggung masyarakat ini memerlukan kehati-hatian pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap kebijakan yang menitikberatkan kepada pajak sebagai prioritas utama guna menumbuhkan perekonomian Kabupaten Tabanan . Variabel ekspor probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, untuk ekspor nilai signifikansi $0,031 < 0,05$ berarti H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam

penelitian ini yaitu "Peningkatan volume Ekspor Daerah terhadap PDRB (XY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan, diterima tetapi secara ekonomis ekspor Kabupaten Tabanan kurang mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya ekspor sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192 persen.

Sedangkan dua variabel bebas tidak signifikan yaitu pertumbuhan penduduk probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, untuk pertumbuhan penduduk nilai signifikansi $0,535 > 0,05$ berarti H_0 diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu "Peningkatan pertumbuhan penduduk (PoP) akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan", ditolak dan secara ekonomis pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar $-1,885$ persen, seperti yang telah diuraikan pada landasan teori bab sebelumnya pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi, hanya Maltus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan penduduk pada perekonomian ternyata mendukung penelitian ini.

Kondisi di negara berkembang umumnya lebih cepat pertumbuhan penduduknya dibandingkan pertumbuhan ekonominya maka pertumbuhan secara riil tidak akan terjadi, karena pertumbuhan ekonomi ditelan oleh pertumbuhan penduduk. Akibatnya tidak ada peningkatan taraf hidup, ini yang berarti dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu diserap dalam kegiatan produksi agar kenaikan pertumbuhan penduduk dibarengi oleh kenaikan ekonomi yang sama.

Untuk Pengeluaran Pembangunan nilai signifikansi $0,226 > 0,05$ berarti H_0 diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu "Peningkatan rasio investasi pemerintah terhadap PDRB (GIY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tabanan", ditolak dan secara ekonomis pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar $-3,852$ persen. Dalam penyusunan anggaran di kabupaten Tabanan lebih banyak didominasi oleh eksekutif, pada kenyataannya alokasi anggaran rutin lebih besar porsi nya dari anggaran pembangunan, dan anggaran pembangunan yang idealnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali dana ini diselewengkan, dan pelaksanaan proyek pun terkesan asal-asalan dan belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan kajian kualitatif dari kebijakan mengenai investasi swasta yang dilihat dari segi ekonomi jika investasi swasta diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh pernyataan Kasub. Bid. Ekonomi Bappeda Kabupaten Tabanan :

“...di mana telah dilakukan upaya-upaya untuk merangsang masuknya investor datang ke Kabupaten Tabanan untuk menanamkan modalnya seperti memberikan keringanan pajak dan membuat fasilitas jalan menuju daerah yang dibuka untuk diinvestasikan...”

dan diperkuat dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis yang menyatakan kenaikan 1 persen investasi swasta akan mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,464 persen. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan juga telah ditanyakan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan pendapat beliau sbb :

“.....dari segi teknis di lapangan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada...”

Jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal dari

masyarakat dan swasta dan telah dilakukan oleh Bidang Perekonomian pada kantor Bappeda Kabupaten Tabanan dengan berbagai upaya menarik penanam modal domestik maupun asing.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan investasi swasta ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak. Sedangkan aspek sosial, yaitu input rumusan kebijakan investasi swasta tidak banyak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat. Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap input rumusan kebijakan investasi swasta yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat dukungan dari masyarakat ini terbukti dari usulan-usulan dari Desa atau Kecamatan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Sedangkan pada Kebijakan pertumbuhan penduduk dilihat dari segi ekonomi kalau pertumbuhan penduduk diupayakan sebagai penyedia tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda perekonomian tidak dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan koefisien regresi memperlihatkan hasil dengan kenaikan 1 persen pertumbuhan Penduduk akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -1,885 persen. Menyangkut pertimbangan dalam

UPT-PUSTAK-INDIP

pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan sbb:

“...Kebijakan ini tidak relevan dilakukan dan akan cukup mengalami kesulitan karena kebijakan ini tidak populer, karena program pemerintah adalah untuk menekan pertumbuhan penduduk agar dapat dikendalikan yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi...”

Jika dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk ini kurang dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis. Jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini kurang menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan penduduk kurang sesuai karena program pemerintah Kabupaten Tabanan justru menekan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan Pertumbuhan Penduduk ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku. Sedangkan aspek sosial kebijakan Pertumbuhan Penduduk akan menimbulkan masalah-masalah baru beban sosial dalam masyarakat seperti kekurangan lahan pekerjaan, banyaknya pengangguran yang akan cenderung berdampak negatif dalam kehidupan

masyarakat. Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap kebijakan pertumbuhan penduduk yang akan dilaksanakan nantinya, para pengambil kebijakan melihat kurang mendapat dukungan dari masyarakat.

Pada pengeluaran pembangunan dilihat dari segi ekonomi kalau pengeluaran pembangunan diupayakan, tidak akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan di dapat hasil koefisien regresi $-3,852$ yang berarti kenaikan 1 persen pengeluaran pembangunan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 3,852 persen. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Bapak Kabag Keuangan Kabupaten Tabanan sbb:

“.....Kebijakan pengeluaran pembangunan tidak akan mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada...”

Jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur, maka dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari pengamatan penulis terlalu banyak alokasi dana

pembangunan digunakan untuk membangun gedung –gedung yang sifatnya tidak produktif seperti balai pertemuan, rumah dinas, kantor dsb.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan pengeluaran pembangunan ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi. Sedangkan aspek sosial kebijakan pengeluaran pembangunan tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat hanya saja yang akan menimbulkan kesan negatif jika alokasi dananya tidak tepat seperti pembangunan gedung-gedung yang sifatnya tidak produktif dan sedikit sekali berdampak pada masyarakat. Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat dukungan dari masyarakat ini terbukti dari banyaknya usulan-usulan proyek datang dari bawah (Desa atau Kecamatan) yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pada pengeluaran rutin dilihat dari segi ekonomi kalau pengeluaran rutin diupayakan sebagai pembentukan modal yang akan di konsumsi kan dalam rangka menjalankan roda perekonomian secara signifikan akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung prasarana dan sarana yang ada, Jika dilihat dari segi

administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal pemerintah yang nantinya digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang selanjutnya menjadi efek penggandaan dari perekonomian setempat.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan pengeluaran rutin ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak.. Sedangkan dari aspek sosialnya, yaitu input rumusan kebijakan pengeluaran rutin akan menimbulkan kritikan-kritikan dari masyarakat karena dana yang dialokasikan pemerintah banyak yang tidak produktif seperti perjalanan dinas yang tidak begitu perlu pengeluaran tunjangan-tunjangan yang sangat besar jumlahnya baik di kalangan eksekutif maupun legislatif. Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan pengeluaran rutin yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat kurang mendapat dukungan dari masyarakat ini terbukti banyak usulan agar pengeluaran rutin dikurangi dialihkan ke pengeluaran pembangunan .

Pada pajak kalau peningkatan pajak diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana didapat hasil yang memperlihatkan kenaikan 1 persen pajak akan mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 109,586 persen. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Kepala Dipenda Kabupaten Tabanan sbb:

“... tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada...”

Dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan menarik modal dari masyarakat dan swasta melalui pajak dan salah satu bukti yang dicapai pemerintah adalah hampir tiap tahun target penerimaan PAD dari pajak dapat terealisasi, yang selanjutnya digunakan sebagai modal pembangunan di Kabupaten Tabanan .

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan Peningkatan pajak ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku

dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak. Sedangkan aspek sosial dari kebijakan peningkatan pajak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat karena akan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga dapat pula mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa di Kabupaten Tabanan. Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan peningkatan pajak yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat kurang akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Pada kebijakan ekspor jika dilihat dari segi ekonomi akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana didapat hasil kenaikan 1 persen ekspor akan mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192 persen. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan sebagaimana dikatakan oleh kepala Deperindag. Kabupaten Tabanan :

“...dalam pelaksanaan di lapangan dilihat dari segi teknis tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh sarana dan prasarana lainnya yang ada, walaupun ada sedikit kendala-kendala di pengurusan dokumen ekspor namun masih bisa diatasi baik dari pemerintah maupun pengusaha/ eksportir...”

Dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini

telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal melalui ekspor.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu kebijakan ekspor ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak. Sedangkan aspek sosial, kebijakan ekspor tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat. Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap kebijakan ekspor yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat dukungan dari masyarakat.

Sebelum penulis membuat alternatif model dari kajian faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maka ada baiknya kembali melihat model –model yang pernah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sepanjang pengetahuan penulis, seperti dalam penelitiannya Surya Atmaja menggunakan metode alat analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel, variabel yang digunakan adalah penyediaan tenaga kerja (*Labor supply growth*), investasi swasta, konsumsi pemerintah, *revenue effort* dan variabel pengeluaran pembangunan.

Dengan model Sbb:

$$GRW = F (PIY, Pop, GIY, GY, RY,)$$

di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen (%).

GIY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB dalam satuan persen (%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutin pemerintah dengan PDRB dalam satuan (%).

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

Hakim (2001) meneliti " Peranan Investasi Swasta, Investasi Publik dan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 26 Provinsi, di Indonesia " Dalam penelitian Hakim yaitu Pengaruh Investasi Swasta dan Pemerintah serta Jumlah Penduduk di 26 propinsi di Indonesia dari tahun 1988 – 1999 dengan menggunakan pertumbuhan Solow.

Dengan Model sbb:

$$GRW = F (PIY, Pop, GIY,)$$

di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen (%).

GIY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB dalam satuan persen (%).

Sedangkan dalam penelitian ini setelah dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda dan di kaji dengan aspek kualitatif dengan menggunakan *PETS Analysis* yang dimodifikasi maka dari faktor –faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi didapatkan suatu model alternatif yang bisa ditawarkan penulis, model seperti ini telah pernah dibuat oleh penulis terdahulu namun dalam penelitian ini variabelnya dikembangkan lagi dengan memasukkan ekspor sebagai variabel independen , dan membuat skala prioritas dari variabel tersebut di dalam model yang akan dibuat, model yang ditawarkan penulis sbb :

$$GRW = F (PIY^{***}, Pop, GIY, GY, RY^{**}, XY^*)$$

Ket :

- *** = Prioritas Pertama
- ** = Prioritas Kedua
- * = Prioritas Ketiga
- = Prioritas dst.

di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen (%).

GIY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB dalam satuan persen (%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutin pemerintah dengan PDRB dalam satuan (%).

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

Untuk lebih jelasnya penulis akan membuat suatu tabel dari alternatif kebijakan pertumbuhan ekonomi yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dan alternatif kebijakan pertumbuhan Ekonomi yang akan ditawarkan penulis, seperti dapat dilihat pada tabel.

4.38

Tabel. 4.38
Alternatif Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Alternatif Kebijakan	Variabel Kebijakan
1. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang diteliti oleh Hakim, AR. kurun waktu 1988 s/d 1999, 26 Provinsi di Indonesia	1. Investasi Swasta 2. Investasi Publik 3. Penduduk
2. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang diteliti oleh Surya Atmaja, kurun waktu 1995 s/d 2000 di Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali	1. Investasi Swasta 2. Penduduk 3. Sektor Publik (Pengeluaran Pembangunan, Pengeluaran Rutin dan Pajak)
3. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang diteliti oleh Penulis, Kurun Waktu 1990 s/d 2001 di Kabupaten Tabanan Bali	1. Investasi Swasta 2. Penduduk 3. Pengeluaran Pembangunan 4. Pengeluaran Rutin 5. Pajak 6. Ekspor

Sumber : Data diolah

Dalam kaitannya dengan Kebijakan Publik yang mana menurut Thomas R. Dye, (dalam Budi Winarno, 1989: 2), kebijakan publik adalah " *Whater governments choose to do or no to do* " (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Maka apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan, ada di dalam variabel independen pada model yang telah dibuat penulis seperti kebijakan investasi swasta, Kebijakan pertumbuhan penduduk, kebijakan pengeluaran pembangunan, kebijakan pengeluaran rutin, kebijakan perpajakan dan kebijakan ekspor. Kesemuanya kebijakan-kebijakan inilah yang akan nantinya dilakukan pemerintah dan diurut sesuai dengan prioritas yang selanjutnya digunakan sebagai formulasi kebijakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali.

BAB V

SIMPULAN dan SARAN

Pada bab ini diuraikan simpulan dan saran yang merupakan hasil rangkuman dari hasil pembahasan dan diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta alternatif rumusan kebijakan yang akan diterapkan di Kabupaten Tabanan Bali.

A. SIMPULAN

Dari hasil analisis memperlihatkan ada beberapa faktor dominan membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan diantaranya Investasi swasta, pajak dan ekspor. Sedangkan faktor-faktor lain seperti, pertumbuhan penduduk, pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran rutin signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh negatif. Pajak mempunyai koefisien yang paling besar diantara variabel yang lainnya, hal ini memperkuat bahwa kebijakan fiskal yang oleh pemerintah untuk tujuan “ stabilisasi atau pembangunan” benar –benar efektif, maka untuk menjebak tabungan wajib, perpajakan merupakan instrumen yang paling bermanfaat sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan investasi swasta dominan dalam pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 6,464 yang berarti bahwa setiap peningkatan investasi swasta sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata bertambah sebesar 6,464 persen.
2. Peranan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari koefisien regresinya negatif sebesar $-1,885$ dan probabilitasnya $0,535 > 0,005$.
3. Investasi pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Ini disebabkan karena investasi pemerintah selama ini tidak sepenuhnya diarahkan untuk hal-hal yang mendukung perekonomian. Dana yang dialokasikan keproyek-proyek yang tidak produktif, hal tersebut dapat dilihat dari probabilitasnya $0,226 > 0,005$. Hal ini menunjukkan dengan peningkatan investasi pemerintah sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar $-3,852$ persen.
4. Pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini ditunjukkan oleh besarnya probabilitas $0,025 < 0,005$ tetapi berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah, hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi $-2,722$ yang berarti

kenaikan 1 persen pengeluaran konsumsi pemerintah akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,722 persen, hal ini diakibatkan belanja rutin lebih banyak dibelanjakan di tempat lain sehingga efek multifier tidak terjadi di Kabupaten Tabanan.

5. Penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak daerah sangat dominan ini mencerminkan peningkatan peran sektor publik dalam usaha menggali pendapatan sendiri, mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Pengaruh ini ditunjukkan dengan koefisiennya sebesar 109,586 persen, dengan ditingkatkannya pajak daerah, sehingga peningkatan rasio pajak sebesar 1 persen yang dipungut dari masyarakat berarti terjadi kenaikan pertumbuhan rata-rata sebesar 109,586 persen. Hal ini tidak mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat tetapi justru sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang efektif.
6. Peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak terlalu dominan, ini dilihat dari besarnya probabilitas $0,031 < 0,005$ dan koefisien regresi 0,192 yang berarti kenaikan volume ekspor 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192 persen .
7. Berdasarkan hasil analisis dari faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan ada

tiga rumusan kebijakan yang perlu mendapat prioritas penanganan dari pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu investasi swasta, pajak dan ekspor, prioritas yang pertama pada investasi swasta karena memiliki nilai ekonomis dan resiko paling rendah. Prioritas yang kedua adalah pajak walau memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi memiliki resiko yang tinggi pula. Sedangkan kebijakan Ekspor mendapat prioritas ketiga karena memiliki nilai ekonomis yang kecil tetapi memiliki beban sosial yang kecil dan didukung oleh masyarakat setempat. Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan penduduk mendapat prioritas keempat dst.

Dari hasil analisa secara kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda dan di kaji dengan aspek kualitatif dengan menggunakan *PETS Analysis* yang dimodifikasi maka didapatkan suatu model yang bisa ditawarkan penulis, model yang ditawarkan penulis sbb :

$$GRW = F (PIY^{***}, Pop, GIY, GY, RY^{**}, XY^*)$$

Ket :

- *** = Prioritas Pertama
- ** = Prioritas Kedua
- * = Prioritas Ketiga
- = Prioritas dst.

di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen (%).

GIY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB dalam satuan persen (%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutin pemerintah dengan PDRB dalam satuan (%).

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

XY adalah rasio volume Ekspor Daerah terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan daerah untuk merumuskan kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dapat menentukan pilihan kebijakan yang dapat merangsang iklim investasi karena investasi merupakan faktor yang sangat dominan terhadap pertumbuhan ekonomi, langkah konkrit yang bisa ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan menyederhanakan perijinan dan keringanan pajak bagi investor. Perhatian lainnya adalah adanya pemerataan investasi khususnya segala sektor. Sedangkan dampak sosial dari kebijakan investasi

swasta yang akan dilaksanakan dan sekiranya dapat menimbulkan dampak negatif akibat investasi swasta ini agar didiskusikan dan disosialisasikan terlebih dahulu dan kalau nyata-nyata berbenturan dengan nilai adat istiadat setempat agar tidak dipaksakan realisasinya.

2. Pajak daerah menunjukkan pengaruh yang sangat besar dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Hal ini perlu mendapat perhatian agar dalam upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dari pajak daerah yang ada selama ini tetap memperhatikan kemampuan membayar dari masyarakat dan berdasarkan asas manfaat serta keadilan. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan, walaupun tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada, juga diperlukan kreativitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sekiranya bisa di kembangkan. Sedangkan menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap kebijakan peningkatan pajak yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat akan kurang mendapat dukungan dari masyarakat, maka untuk mengurangi resiko kebijakan peningkatan pajak ini salah satu jalan yang mungkin bisa ditempuh ialah dengan mendiskusikan dengan para

stakeholder dan kebijakan kenaikan/ pengenaan pajak yang akan diberlakukan oleh pemerintah agar disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tabanan.

3. Dilihat dari segi ekonomi kalau ekspor diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan walaupun dampaknya kecil, langkah kongrit yang bisa dilakukan pemerintah seperti menyederhanakan perijinan dokumen ekspor dan memberi informasi pasar tujuan ekspor, upaya ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan walaupun tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, namun alangkah lebih bagusnya jika pemerintah Kabupaten Tabanan berperan aktif atau dengan kata lain menjemput bola kepada investor untuk memberi pembinaan dan fasilitas kepada investor yang baru maupun yang sudah lama.
4. Rumusan kebijakan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan resiko terendah seperti investasi swasta agar mendapat prioritas penanganan yang utama oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Bali, baru diikuti oleh Kebijakan Pajak sebagai prioritas kedua,

kebijakan ekspor prioritas ketiga dan kebijakan – kebijakan seperti
Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan; Pertumbuhan
Penduduk mendapat prioritas keempat dst.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Hakim, **Statistika Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis**, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2001.

Abdulkahar Badjuri, & Teguh Yuwono, **Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi**, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Semarang, 2002.

Boediono, **Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar ilmu Ekonomi no. 4 Edisi Pertama**, BPFE, Yogyakarta, 1981..

Boediono, **Indonesia Menghadapi Ekonomi Global, Seri Perekonomian Indonesia no. 1 Edisi Pertama**, BPFE, Yogyakarta, 2001.

Budi Winarono, **Teori Kebijaksanaan Publik**, PAU Studi Sosial-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.

Cooper, R. Donald dan Emory, C. William, **Metode Penelitian Bisnis jilid 1 Edisi Kelima**, Ellen Gunawan Dkk. (Trans), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999.

Dunn William N, **Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi**, Muhadjir Darwin dkk (Trans) , Hanindita Graha Widia, Yogyakarta, 2001.

Fadilah Putra, **Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar Offset, Surabaya, 2001.

Faried Wijaya, **Kompedium Ekonomika**, BPFE, Yogyakarta, 1992.

Guritno Mangkoesobroto, **Ekonomika Publik**, Edisi ketiga, BPFE, Yogyakarta, 1993.

Irawan, M. Suparmoko, **Ekonomi Pembangunan**, Edisi kelima, BPFE, Yogyakarta. 1992.

Irfan Islamy, **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Jhingan, M.L., **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan cetakan ke Delapan**, Guritno D. (Trans), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Lincoln Arsyad, **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**, Edisi Pertama, BPFE, 1999.

Masri Singarimbun, Sofian Effendi, **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta, 1995.

Mohamad Nazir, **Metode Penelitian**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1988.

Samodra Wibawa, **Evaluasi kebijakan Publik**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994.

Soediyono Reksoprayitno, **Pengantar Ekonomi Makro**, Edisi 6, BPFE, Yogyakarta, 2000.

Solichin Abdul Wahab, **Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara**, Riineka Cipta, Jakarta, 1990

Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung, 1999

Sadono Sukirno, 1976. **Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah**. Jakarta : LPFE-UI

Suseno Triyanto Widodo, **INDIKATOR EKONOMI Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Todaro, M.P., **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Agustinus Subekti (Trans), Edisi keenam, Penerbit Erlangga, 1999.

Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar, metoda, teknik**, Penerbit Transito, Bandung, 1982.

Non Buku :

Bappeda Provinsi Bali, **Data Bali Membangun Tahun 2000**, Bappeda, Bali, 2001.

Biro Pusat Statistik Kabupaten Tabanan Bali, Tabanan Dalam Angka Tahun 2000, BPS Kabupaten Tabanan, 2001.

Fitriani, " Analisis Alternatif Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Kota Bengkulu Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, Tesis S2, Program Pasca sarjana, UGM, Yogyakarta, 2001.

Hakim, AR, " Peranan Investasi Swasta, Investasi Publik dan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 26 Provinsi, di Indonesia " , Tesis S2, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 2001.

Suahasil Nazara, " Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia " dalam Prisma No. 8 Tahun XXIII Agustus 1994, LP3ES, Jakarta, 1994

Surya Atmaja, " Pengaruh Sektor Publik, Investasi Swasta dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali " , Tesis S2, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 2001.

